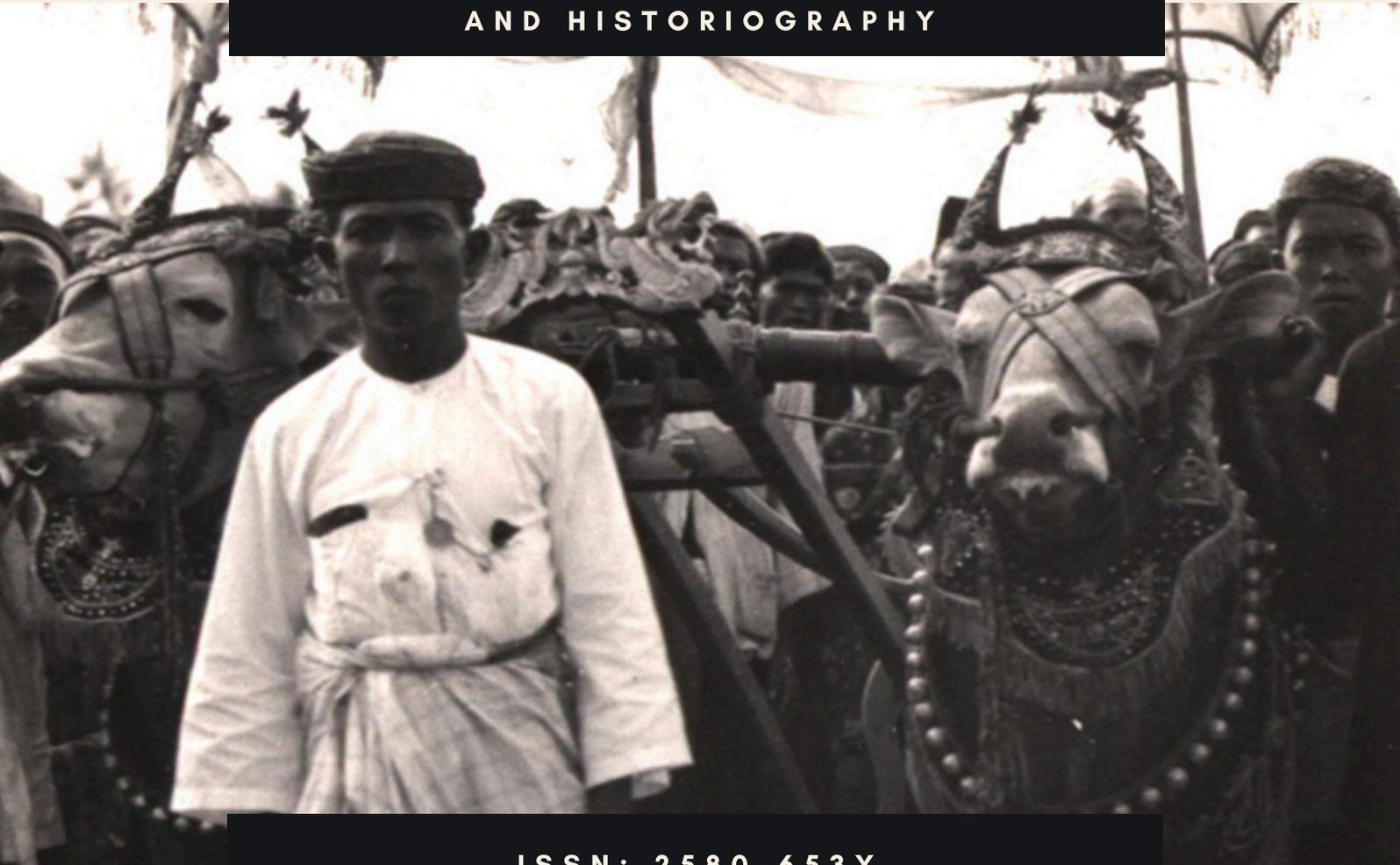


VOLUME: 9 / ISSUE: 1 / JUNE 2025

kronik

JOURNAL OF HISTORY EDUCATION
AND HISTORIOGRAPHY



ISSN: 2580-653X

Published by Department of History Education,
Faculty of Social Science and Political Science,
Universitas Negeri Surabaya.

In collaboration with Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia
and Masyarakat Sejarawan Indonesia



SEKAPUR SIRIH

Edisi ke-9 No. 1 *Kronik: Journal of History Education and Historiography* ini mempersembahkan kumpulan tulisan yang merefleksikan semangat dekolonisasi pengetahuan dan penulisan sejarah alternatif yang lebih inklusif. Tulisan-tulisan dalam edisi ini menggarisbawahi pentingnya meninjau ulang narasi sejarah yang selama ini bersifat dominan, bias gender, dan kurang memberi ruang bagi perspektif lokal serta marginal.

Salah satu artikel menyoroti peran tersembunyi perempuan dalam sejarah maritim Indonesia, dengan pendekatan yang memperlihatkan bahwa perempuan bukan hanya pelengkap domestik, tetapi aktor penting dalam perdagangan, ritual laut, diplomasi, hingga navigasi dan produksi maritim. Artikel ini menjadi kontribusi penting dalam upaya memperluas cakrawala historiografi maritim yang lebih adil gender dan berspektif interseksional. Artikel lainnya melakukan dekonstruksi terhadap pertunjukan Damarwulan–Minak Jinggo di Banyuwangi, yang secara tajam membongkar konstruksi naratif kolonial dan feodal dalam representasi tradisi lokal. Kritik ini membuka diskusi lebih luas tentang bagaimana seni pertunjukan dapat digunakan sebagai medium resistensi maupun kooptasi politik budaya. Tak kalah menarik, edisi ini juga menampilkan artikel yang mengangkat urgensi pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah di jenjang SMA. Di tengah dunia yang semakin plural dan terkoneksi, penulis menegaskan perlunya pembelajaran sejarah yang tidak hanya fokus pada fakta dan kronologi, tetapi juga pada penanaman nilai toleransi, empati, dan pemahaman terhadap keragaman budaya. Artikel ini menekankan bahwa sejarah harus diajarkan dengan berbagai perspektif agar siswa mampu berpikir kritis, memahami kompleksitas masa lalu, serta mampu hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat yang multikultural.

Secara keseluruhan, edisi ini menunjukkan bahwa pendidikan sejarah dan sejarah bukanlah narasi tunggal yang beku, melainkan ruang dialektis yang terus-menerus dinegosiasikan. Baik dalam bentuk narasi akademik, praktik pendidikan, maupun representasi kultural, sejarah harus dipahami sebagai arena pertarungan makna, pengakuan, dan identitas. *Kronik: Journal of History Education and Historiography* berkomitmen untuk terus menjadi ruang bagi artikulasi sejarah yang memihak pada keberagaman, keadilan epistemik, dan kesadaran kritis.

Melalui beragam kontribusi dalam edisi ini, *Kronik: Journal of History Education and Historiography* terus berkomitmen menjadi ruang reflektif dan kritis bagi akademisi, pendidik, dan penulis untuk mengembangkan narasi sejarah yang lebih membumi, inklusif, dan memberdayakan. Kami berharap edisi ini tidak hanya menambah khazanah keilmuan, tetapi juga menjadi pemantik diskusi yang relevan dengan kebutuhan zaman.

Kami juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para penulis, mitra bestari, dan pembaca yang setia mendukung perjalanan jurnal ini. Semoga edisi ini menjadi

kontribusi bermakna dalam pengembangan studi sejarah yang progresif dan kontekstual di Indonesia.

Surabaya, Juni 2025
Chief in Editor

Mohammad Refi Omar Ar Razy

PROPAGANDA INTELEKTUAL INDISCHE PARTIJ: STRATEGI MEDIA DAN PENDIDIKAN DALAM MEMBANGKITKAN KESADARAN NASIONAL (1912–1925)

Rezza Fauzi Muhammad Fahmi¹, Septi Laila Nurpadilah², Siti Rahmawati Sudrajat³, Rahil Syamsi Nur⁴
^{1, 2, 3, 4} STIABI Riyadul 'Ulum Tasikmalaya

rezzafauzi@stiabiru.ac.id¹, septilailanurpadilah@student.stiabiru.ac.id², rahmamew55@gmail.com³,
rahilsyamsungkar@gmail.com⁴

Correspondence author rezzafauzi@stiabiru.ac.id

Abstract

This research is entitled Intellectual Propaganda of the Indische Partij: Media and Education Strategies in Raising National Consciousness (1912-1925). Amidst colonial domination, Indische Partij faced significant challenges in fostering unity among a society fragmented by ethnic differences, social classes, and colonial political influences. This study aims to analyze Indische Partij strategies in utilizing media and education as propaganda tools to overcome these challenges and drive national consciousness. The historical method, which includes heuristics, criticism, interpretation, and historiography, was employed in the preparation of this article. Additionally, qualitative analysis and a historical approach were applied through an examination of archival documents, publications, and educational texts designed by Indische Partij. The findings reveal that media played a crucial role in widely and rapidly disseminating ideas of unity and independence, particularly through provocative articles criticizing colonial policies. On the other hand, education was used as a long-term strategy to shape national character by instilling values of justice, equality, and unity among the younger generation. These findings demonstrate that the combination of media and education as propaganda tools successfully influenced public discourse and laid the initial foundation for national awareness. Indische Partij strategies not only addressed the colonial challenges of their time but also served as an inspiration for subsequent nationalist movements in the struggle for Indonesia's independence.

Keywords: Education; Indische Partij; Media; Propaganda

Pendahuluan

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia menuju kemerdekaan, berbagai bentuk perjuangan dilakukan oleh para tokoh dan kelompok pergerakan nasional untuk membebaskan diri dari belenggu kolonialisme. Perjuangan tersebut tidak hanya berlangsung dalam bentuk fisik atau perlawanan bersenjata, tetapi juga melalui jalur intelektual, kultural, dan komunikasi massa. Salah satu aspek penting dalam upaya tersebut adalah penyebaran ide dan pembentukan opini publik yang mampu menumbuhkan semangat kebangsaan dan kesadaran politik di kalangan rakyat. Di sinilah strategi komunikasi seperti propaganda memainkan peran sentral dalam mengarahkan arus pemikiran dan sikap masyarakat terhadap cita-cita kemerdekaan.

Strategi propaganda merupakan serangkaian upaya sistematis yang dirancang untuk memengaruhi opini, sikap, atau perilaku suatu kelompok masyarakat guna mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, propaganda sering kali digunakan untuk menyebarkan gagasan-gagasan revolusioner, membangun kesadaran kolektif, serta memobilisasi dukungan rakyat terhadap perjuangan nasional. Hal ini merupakan bagian dari pergerakan Nasional yang memiliki makna yang sangat krusial bagi bangsa Indonesia (Fahmi, Isfaturohmah, et al., 2025).

Menurut Harold Lasswell Propaganda adalah usaha untuk mengelola sikap suatu kelompok dengan cara memanipulasi simbol-simbol yang dianggap penting. Misalnya, ketika kita mengatakan bahwa para pemilih di suatu daerah tidak menyukai seorang calon pemimpin berkulit hitam, itu berarti kita sedang merangkum kecenderungan kelompok tersebut untuk bersikap atau bertindak terhadap seseorang tertentu dalam situasi tertentu (Parsons, 1935). Propaganda merupakan alat yang sangat ampuh dalam membentuk opini publik (Nugraha, 2019). Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, propaganda memiliki peran yang sangat krusial dalam membangun narasi nasional. Propaganda menciptakan rasa identitas bersama di antara masyarakat yang beragam. Dengan menyoroti sejarah, budaya, dan nilai-nilai yang sama, propaganda memperkuat ikatan emosional dan rasa kebangsaan (Dergisi, 1990).

Istilah atau terminologi propaganda pertama kali saat Paus mendirikan sebuah lembaga penyebaran agama *sacra congregatio de propaganda fide*. Maka sebagian orang menganggap propaganda sebagai konteks penyebaran agama. Namun, seiring berjalannya waktu propaganda banyak dilakukan untuk menanamkan ajaran politik dalam kampanye, mencari kekuasaan, sehingga penggunaan ini membuat citra terminologi propaganda menjadi buruk (Munthe, 2012).

Dalam konteks sejarah Indonesia, propaganda memainkan peran penting dalam membangkitkan kesadaran nasionalisme. Sejak awal abad ke-20, berbagai organisasi pergerakan nasional mulai tumbuh, seperti Budi Utomo (1908) yang menekankan pentingnya pendidikan, Sarekat Islam (1912) yang menggalang kekuatan ekonomi dan sosial umat Islam, serta *Indische Partij* (1912) yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Organisasi-organisasi ini memanfaatkan berbagai media, termasuk surat kabar, pamflet, pidato, hingga pertunjukan seni untuk menyebarkan gagasan kebangsaan dan menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang.

Indische Partij, yang didirikan pada tahun 1912 oleh tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker (Danudirja Setyabudi), Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat, merupakan organisasi yang sangat menekankan pentingnya pembentukan opini publik dan kesadaran rakyat melalui tulisan, media, dan pendidikan. Mereka sadar betul bahwa perjuangan sejati harus melibatkan perubahan cara pandang rakyat terhadap dirinya sendiri dan terhadap kekuasaan kolonial. Dari sinilah kita melihat peran penting *Indische Partij*, sebuah organisasi yang menjadi tonggak awal penyatuan pribumi dan keturunan Eropa dalam satu cita-cita yaitu Indonesia merdeka. *Indische Partij* bukan hanya menjadi pelopor pergerakan politik yang lebih radikal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana propaganda digunakan sebagai alat untuk menggugah kesadaran politik rakyat dan mempertegas siapa musuh bersama bangsa yaitu kolonialisme.

Propaganda juga mengidentifikasi musuh bersama, baik itu penjajah maupun kelompok-kelompok yang dianggap mengancam persatuan bangsa. Hal ini menciptakan rasa solidaritas dan semangat untuk melawan. Media yang digunakan untuk menyebarkan propaganda sangat beragam, tergantung pada kondisi dan teknologi yang ada. Memahami strategi propaganda dalam konteks perjuangan kemerdekaan sangat penting untuk memahami dinamika politik saat ini. Propaganda masih terus digunakan oleh berbagai pihak, baik itu pemerintah, kelompok kepentingan, maupun individu, untuk memengaruhi opini publik. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memiliki literasi media yang tinggi agar tidak mudah termanipulasi oleh propaganda.

Dalam pusran sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, *Indische Partij* memainkan peran sentral dalam membangun kesadaran nasional. *Indische Partij* juga menjadi pionir dalam memperkenalkan konsep persatuan lintas etnis yang saat itu masih jarang diangkat (Mandasari et al., 2023). Salah satu visi utama organisasi ini adalah menciptakan sebuah identitas kolektif yang melampaui sekat-sekat suku, agama, dan golongan. Hal ini menjadi penting mengingat kondisi

masyarakat Hindia Belanda yang terfragmentasi akibat politik kolonial yang sering menerapkan politik pecah-belah (*divide et impera*).

Para pendiri *Indische Partij* percaya bahwa kemerdekaan hanya dapat dicapai jika seluruh rakyat, baik pribumi, Indo-Eropa, maupun kelompok minoritas lainnya, bersatu dalam tujuan yang sama: melawan kolonialisme dan ketidakadilan (Nurhasanah et al., 2025). Sikap progresif *Indische Partij* terhadap isu-isu sosial dan politik membuat mereka sering kali berbenturan langsung dengan pemerintah kolonial Belanda. Salah satu momen paling terkenal adalah ketika Soewardi Suryaningrat menulis esai "*Als Ik Een Nederlander Was*" (Seandainya Aku Seorang Belanda), yang secara tajam mengkritik kebijakan pemerintah kolonial dalam merayakan 100 tahun kemerdekaan Belanda, sementara rakyat pribumi terus menderita di bawah penjajahan.

Esai tersebut mendapat reaksi keras dari pemerintah, yang kemudian mengasingkan Soewardi bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo ke luar negeri. Meskipun demikian, pembuangan mereka justru memperkuat semangat perlawanan rakyat dan memperluas jaringan perjuangan di tingkat internasional. Oleh karena itu, pembakaran pada artikel ini dimulai sejak tahun 1912, yaitu sejak pendirian *Indische Partij* itu sendiri, sampai 1925, dimana dalam rentang waktu tersebut menjadi bukti perjalanan yang tak mudah bagi partai ini untuk membebaskan pribumi dari belenggu penjajahan kolonial Belanda (Hasan et al., 2023).

Melalui berbagai kegiatan politik dan propaganda, partai ini berhasil menghimpun kekuatan rakyat dan menanamkan semangat perjuangan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Melalui penerbitan surat kabar, penyelenggaraan pertemuan, dan aksi-aksi demonstrasi, partai ini berhasil membangkitkan semangat perlawanan dan menanamkan kesadaran nasional di kalangan rakyat (Firmansyah, 2013). Meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk penindasan dari pemerintah kolonial dan perbedaan pendapat di internal partai, *Indische Partij* tetap berjuang gigih untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Warisan sejarah *Indische Partij* menjadi inspirasi bagi generasi penerus dalam melanjutkan perjuangan mencapai kemerdekaan.

Strategi propaganda yang dijalankan oleh *Indische Partij* bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja secara tiba-tiba (Ummah, 2019). Justru, langkah tersebut merupakan respons atas kondisi sosial dan politik di Hindia Belanda yang sangat tidak seimbang dan penuh dengan ketidakadilan. Pemerintah kolonial dengan sengaja membangun jurang pemisah sosial antara kelompok Eropa, Indo-Eropa, dan pribumi, yang pada akhirnya menimbulkan ketegangan dan kekecewaan di masyarakat.

Dalam konteks pemikiran Antonio Gramsci, *Indische Partij* berupaya membangun hegemoni tandingan terhadap ideologi kolonial yang selama ini mengakar kuat di masyarakat (Endah Siswati, n.d.). Melalui strategi pendidikan dan propaganda media, organisasi ini tidak hanya menyuarakan penolakan terhadap ketidakadilan, tetapi juga menggunakan pendidikan sebagai alat untuk membentuk kesadaran kolektif yang menolak dominasi budaya kolonial. Dengan demikian, perjuangan *Indische Partij* bukan hanya bersifat politis, tetapi juga kultural, yakni membongkar dominasi ideologis kolonial dan membangun kesepahaman baru tentang kemerdekaan, kesetaraan, dan kebangsaan melalui hegemoni ide dan wacana.

Memahami propaganda sebagai bagian dari strategi perjuangan *Indische Partij* sangat penting, karena menunjukkan bahwa upaya meraih kemerdekaan tidak hanya bergantung pada kekuatan senjata atau perlawanan fisik semata. Namun, kemerdekaan juga dirintis lewat narasi, tulisan, dan pendidikan yang mendalam. Media massa digunakan untuk membangkitkan emosi dan kesadaran publik, sementara pendidikan berfungsi membentuk pola pikir rakyat dalam jangka panjang. Dengan demikian, perjuangan *Indische Partij* bukan hanya soal membebaskan wilayah secara fisik dari

penjajahan, tapi juga membebaskan cara pandang masyarakat dari dominasi kolonial yang mengekang.

Penggunaan pendidikan dan media yang menjadi inti strategi mereka juga memberikan pelajaran penting bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan di medan pertempuran, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran dan pemahaman rakyat terhadap hak-hak mereka (Tampubolon, 2001). Dalam hal ini, pendekatan yang digunakan selaras dengan teori Paulo Freire yang memandang pendidikan sebagai praksis pembebasan, yaitu proses dialogis yang mendorong rakyat untuk menyadari kondisi penindasan mereka dan secara aktif terlibat dalam perubahan sosial (Harisuddin, 2013). Freire menolak model pendidikan “banking” yang menempatkan peserta didik sebagai objek pasif, dan sebaliknya menekankan pentingnya kesadaran kritis (*conscientization*) yang memungkinkan rakyat melihat realitas secara utuh dan bertindak untuk mentransformasinya. Melalui penyebaran ide-ide nasionalisme dan kesetaraan lewat pendidikan dan media, perjuangan *Indische Partij* mencerminkan praktik pendidikan yang membebaskan, di mana rakyat didorong untuk menjadi subjek yang sadar dan aktif dalam melawan penindasan kolonial.

Melalui propaganda, media digunakan untuk membangkitkan emosi dan kesadaran publik, sementara pendidikan berfungsi membentuk pola pikir rakyat dalam jangka panjang. Mereka memahami bahwa penjajahan tidak hanya menindas secara fisik, tetapi juga secara psikologis dan ideologis disisi lain program-program pemerintah kadang tidak tepat sasaran (Fahmi, Nurholis, et al., 2025). Oleh karena itu, penggunaan pendidikan dan media menjadi inti strategi mereka. Inilah pelajaran penting dari sejarah pergerakan nasional: bahwa perjuangan sejati tidak semata dilakukan di medan pertempuran, tetapi juga melalui pembentukan kesadaran dan pemahaman rakyat terhadap hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat.

Strategi ini juga terbukti efektif dalam mempercepat lahirnya rasa kebangsaan yang kuat dan terorganisir. Perpaduan antara pendidikan, media, dan kesadaran nasional menjadi formula penting dalam membangun kekuatan perjuangan yang holistik. Pendidikan memiliki peranan kunci dalam membentuk kesadaran nasional. Dalam masa kolonial, pendidikan yang awalnya dibatasi oleh pemerintah kolonial untuk kalangan pribumi tertentu ternyata justru melahirkan kaum terpelajar yang kritis terhadap ketidakadilan sistem penjajahan. Sekolah-sekolah seperti STOVIA, dan HIS, serta pendidikan luar negeri, melahirkan tokoh-tokoh seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, dan Tan Malaka, yang kemudian menjadi pelopor dalam merumuskan ide-ide kebangsaan (Annisa Nur Hidayah et al., 2023). Pendidikan menjadi jalan untuk membuka wawasan masyarakat tentang konsep kemerdekaan, persamaan hak, dan nasionalisme.

Lebih dari sekadar transmisi ilmu pengetahuan, pendidikan juga menjadi wahana pembentukan kesadaran politik dan sosial yang memungkinkan rakyat untuk menyadari hak-haknya sebagai manusia merdeka. Pendidikan dalam arti luas juga meliputi kegiatan informal seperti diskusi, pelatihan organisasi, hingga ceramah keagamaan yang mulai membawa gagasan-gagasan modern dan revolusioner ke tengah-tengah rakyat. Sementara itu, media massa memainkan peran yang tak kalah penting dalam menyebarkan semangat perjuangan.

Dalam masa pergerakan nasional, media menjadi sarana efektif untuk membangkitkan emosi rakyat, mengkritik kebijakan pemerintah kolonial, serta menyatukan aspirasi perjuangan di berbagai daerah. Surat kabar seperti Medan Prijaji, Soeara Moehammadijah, Warta Deli, dan Bintang Hindia menjadi corong bagi para aktivis nasionalis dalam menyuarakan perlawanan (Fakhri & Makassar, 2020). Melalui artikel, opini, puisi, dan berita-berita perjuangan, media menjadi alat propaganda yang sangat kuat dalam menggugah kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Bahkan dalam kondisi serba terbatas, media bawah tanah pun digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan perjuangan secara

sembunyi-sembunyi. Media tidak hanya menjadi penyampai informasi, tetapi juga penggerak opini dan pembentuk identitas nasional. Peran media ini sangat penting dalam menyatukan berbagai elemen masyarakat yang berbeda suku, bahasa, dan agama dalam satu semangat kebangsaan yang sama.

Lalu, kesadaran nasional merupakan kesadaran kolektif yang tumbuh dalam diri suatu bangsa tentang pentingnya hidup bersama dalam satu identitas, satu cita-cita, dan satu tanah air. Dalam konteks Indonesia, kesadaran nasional mulai tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai reaksi terhadap penindasan kolonial Belanda yang telah berlangsung berabad-abad. Perjuangan yang sebelumnya bersifat lokal dan kedaerahan mulai bergeser menjadi perjuangan yang bersifat nasional ketika masyarakat pribumi mulai menyadari bahwa mereka memiliki musuh bersama dan nasib yang harus diperjuangkan secara kolektif (Pergerakan & Suwirta, 1999). Kesadaran ini tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor seperti penderitaan kolonial, kemunculan kaum intelektual, serta meluasnya akses terhadap pendidikan dan media massa. Kesadaran nasional menjadi fondasi penting dalam pergerakan nasional yang akhirnya mengarah pada proklamasi kemerdekaan tahun 1945.

Dalam era modern, nilai-nilai dan strategi perjuangan ini tetap relevan. Indonesia saat ini memang telah merdeka secara politik, tetapi tantangan lain muncul dalam bentuk penjajahan budaya, ekonomi, dan informasi. Globalisasi membawa dampak positif sekaligus tantangan terhadap kesadaran nasional (Nasution & Hafizsutrino, 2024). Generasi muda saat ini hidup dalam dunia yang dibanjiri oleh informasi, budaya luar, dan arus digital yang cepat. Tanpa adanya filter kesadaran nasional yang kuat, mereka akan mudah terbawa arus dan melupakan sejarah serta jati diri bangsanya. Oleh karena itu, pendidikan dan media harus kembali memainkan perannya sebagai pilar utama dalam memperkuat identitas nasional. Pendidikan harus membentuk karakter yang kritis, berwawasan kebangsaan, dan sadar sejarah. Media, baik konvensional maupun digital, harus diarahkan untuk menciptakan narasi kebangsaan, memerangi disinformasi, dan menjadi alat edukasi publik yang mencerdaskan (Angraini, 2017).

Dengan kata lain, perjuangan belum berakhir. Saat ini kita tidak lagi berhadapan dengan kolonialisme dalam bentuk senjata, tetapi kolonialisme baru dalam bentuk ideologi, budaya, dan informasi yang bisa melemahkan semangat nasionalisme jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan pendidikan yang kuat (Edi, 2018). Maka dari itu, pelajaran dari perjuangan *Indische Partij* dan tokoh-tokoh nasional lainnya harus terus digali dan ditanamkan dalam kehidupan generasi masa kini. Kekuatan narasi, tulisan, dan pendidikan harus menjadi senjata utama dalam menjaga kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Jika pada masa lalu media cetak dan sekolah menjadi alat perjuangan, maka hari ini media digital dan sistem pendidikan modern harus mengambil peran yang sama membangun kesadaran nasional yang kokoh dan berkelanjutan.

Pergerakan nasional Indonesia merupakan hasil dari proses panjang yang melibatkan interaksi antara pendidikan, media, dan propaganda yang cerdas seperti yang dilakukan oleh *Indische Partij*. Kemerdekaan bangsa ini bukan hanya hasil dari perlawanan bersenjata, tetapi juga dari perlawanan naratif dan intelektual yang secara perlahan membentuk cara pandang rakyat tentang bangsa dan kemerdekaan. Sejarah membuktikan bahwa kekuatan kata dan pendidikan mampu menggerakkan jutaan rakyat untuk bangkit dan bersatu. Maka dari itu, dalam menjaga kemerdekaan dan membangun masa depan bangsa, strategi serupa harus terus dijalankan dengan menyesuaikan pada perkembangan zaman (Angraini, 2017).

Pendidikan yang mencerdaskan, media yang bertanggung jawab, dan kesadaran nasional yang terus dibina akan menjadi kekuatan utama Indonesia dalam menghadapi segala bentuk tantangan,

baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam kerangka penelitian ilmiah, studi-studi sebelumnya menjadi dasar penting untuk memahami perkembangan topik ini. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dasar artikel ini ditulis.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Muallif dalam artikel yang berjudul *Indische Partij: Partai Politik Pertama di Hindia Belanda*, yang diterbitkan oleh Universitas Islam An-nur Lampung pada 13 Agustus 2023 yang membahas tentang *Indische Partij* sebagai organisasi yang mengusung nasionalisme, persatuan, dan perjuangan kemerdekaan di Hindia Belanda. Organisasi ini merupakan pelopor yang menggugah kesadaran masyarakat akan pentingnya membangun persatuan lintas etnis untuk meraih kemerdekaan. Partai ini secara tegas memperjuangkan kemerdekaan Hindia dari penjajahan Belanda melalui jalur politik dan menolak diskriminasi kolonial. Meskipun dibubarkan oleh pemerintah Belanda pada 1913, *Indische Partij* menjadi tonggak awal kesadaran nasional dan menginspirasi pergerakan kemerdekaan Indonesia selanjutnya.

Berikutnya, artikel yang berjudul *Perjuangan E.F.E Douwes Dekker dari Politik ke Pendidikan 1913–1941* ditulis oleh Akhmad Bima Firmansyah yang diterbitkan oleh jurnal AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah yang terbit pada Januari 2013. Membahas bagaimana perjalanan hidup Douwes Dekker mengalami perubahan, dari seorang tokoh politik menjadi pelopor dalam dunia pendidikan. Dalam perjalanannya, pendidikan dimanfaatkan sebagai sarana penting untuk menyebarkan semangat kebangsaan dan melawan penjajahan. Sedangkan, artikel kami akan menganalisis media dan pendidikan sebagai alat propaganda kolektif bukan hanya kontribusi individu. selain itu rentang waktu pada jurnal kami lebih panjang hingga 1941.

Kajian mengenai peran *Indische Partij* dalam perjuangan nasional telah banyak dilakukan dari beragam perspektif, terutama yang menyoroti tokoh-tokoh utamanya serta strategi perjuangan yang mereka usung. Salah satu contohnya adalah tulisan Wildan Sena Utomo dalam artikelnya yang berjudul "*Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal: Pemikiran Soewardi Suryaningrat, Tjiptomangoenkoesoemo dan Douwes Dekker (1912–1914)*". Dalam artikel tersebut, Wildan menyoroti peran besar Tiga Serangkai sebagai penggagas awal semangat nasionalisme Indonesia. Fokus utamanya terletak pada ide-ide yang mereka usung, bukan pada sarana atau strategi penyebaran gagasan tersebut kepada masyarakat. Sementara itu, dalam penelitian yang akan dilakukan dengan menggali bagaimana *Indische Partij* menjalankan propaganda secara terencana dan berkelanjutan. Melalui media dan pendidikan sebagai alat utama yang digunakan, dengan menerbitkan majalah *De Express*, tulisan-tulisan tajam yang memantik kesadaran rakyat, serta pendekatan pendidikan yang menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Penelitian ini bertujuan menunjukkan bahwa penyebaran ide kemerdekaan tidak terjadi secara alamiah, melainkan melalui strategi komunikasi dan edukasi yang sistematis untuk membentuk kesadaran nasional di tengah tekanan kolonialisme.

Ketiga artikel tersebut memberikan pemahaman mendalam mengenai *Indische Partij* dari berbagai aspek, mulai dari gagasan nasionalisme, peran tokoh utama, hingga strategi penyebaran ide yang mereka gunakan dalam perjuangan. Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian ini menetapkan tiga rumusan masalah utama sebagai fokus pembahasan, yakni: pertama, mengenal *Indische Partij* dalam konteks sosial dan politik Hindia Belanda pada masa itu; kedua, mengkaji peran strategis *Indische Partij* dalam mempersatukan berbagai kelompok etnis dan membangkitkan kesadaran nasional; serta ketiga, menganalisis tantangan yang dihadapi dan pengaruh yang ditinggalkan oleh *Indische Partij* dalam perjalanan perjuangan kemerdekaan. Ketiga rumusan ini menjadi kerangka utama untuk mendalami kajian dalam penelitian ini. Maka, fokus penelitian ini akan menganalisis bagaimana propaganda *Indische Partij* melalui media dan pendidikan.

Pembahasan

Mengenai *Indische Partij*

Indische Partij adalah organisasi politik pertama di Indonesia yang memelopori gagasan nasionalisme politik. Organisasi ini didirikan oleh E.F.E. Douwes Dekker, yang dikenal pula dengan nama Danudirdjo Setiabudi, seorang tokoh Indonesia yang memiliki kepedulian mendalam terhadap keadilan sosial dan persamaan hak (Wiryoprato et al., 2017). Douwes Dekker terinspirasi untuk mendirikan organisasi ini karena ia menyaksikan secara langsung diskriminasi rasial yang terjadi di Hindia Belanda pada masa itu (Susilo & Isbandiyah, 2018). Perbedaan perlakuan antara bangsa Barat, khususnya Belanda dan Eropa, dengan keturunan Indonesia serta pribumi sangat mencolok dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, pekerjaan, dan status sosial.

Melalui *Indische Partij*, Douwes Dekker bersama para pendukungnya berupaya menghapuskan sekat-sekat rasial dan mempromosikan persatuan nasional di kalangan semua penduduk Hindia Belanda, tanpa memandang latar belakang ras atau etnis. Organisasi ini juga menjadi cikal bakal pergerakan nasional Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan (*Pergerakan Nasional (Indische Partij)*, n.d.). *Indische Partij* menjadi organisasi pertama yang berhasil menyerukan “Hindia untuk Belanda” kemerdekaan Hindia dari Belanda (Utomo, 2014).

Tujuan utama pembentukan *Indische Partij* adalah untuk memperjuangkan nasib masyarakat Indonesia yang pada masa itu sering dianggap sebagai golongan yang terlupakan oleh bangsa Belanda (Ningsih, 2023). Selain itu, *Indische Partij* bertujuan untuk membangun patriotisme terhadap tanah air, yang menjadi tempat tinggal mereka agar mendapat dorongan untuk bekerja sama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanah air dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia (Naseh, 2013).

Kaum Indo, yang merupakan keturunan campuran Eropa dan pribumi, berada dalam posisi yang serba sulit, terpinggirkan baik oleh komunitas pribumi maupun kolonial Belanda. *Indische Partij* hadir dengan visi besar yaitu “*Indie Merdeka*,” sebuah cita-cita nasionalis untuk mewujudkan kemerdekaan Hindia Belanda. Organisasi ini menjadikan nasionalisme sebagai dasar perjuangannya, dengan semboyan “*Indier untuk Indies*” yang mencerminkan upaya menyatukan semua penduduk Hindia, baik pribumi, Indonesia, maupun kelompok lainnya, untuk mencintai tanah air mereka.

Indische Partij tidak hanya mendorong rasa cinta tanah air, tetapi juga menekankan pentingnya kerja sama yang erat di antara semua kelompok masyarakat untuk kemajuan bangsa. Dengan berlandaskan perasaan nasional sebagai ikatan yang kuat, organisasi ini berusaha membangun persatuan nasional yang kokoh, sekaligus mempersiapkan rakyat Hindia Belanda menuju kemerdekaan. Perjuangan ini menjadikan *Indische Partij* sebagai pelopor gerakan nasional yang memperjuangkan persatuan dan kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat.

Douwes Dekker menyadari bahwa kaum Indo merupakan kelompok minoritas di Hindia Belanda, sehingga perjuangan mereka tidak akan berhasil tanpa adanya kerja sama dengan kelompok lain. Untuk itu, Dekker menggunakan media sebagai alat perjuangannya, salah satunya melalui majalah *De Express*, tempat ia menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam bentuk tulisan yang sarat propaganda. Dalam karya-karyanya, ia menekankan dua hal utama (Zul Fadhli, 2016).

Pertama, pentingnya melaksanakan program yang berbasis pada kepentingan “Hindia” sebagai dasar gerakan politik yang sehat, dengan tujuan menghapuskan hubungan kolonial yang eksploitatif (Zed, 2017). Kedua, ia berusaha menyadarkan kaum Indonesia dan penduduk bumiputra bahwa perjuangan mereka tidak dapat dilakukan secara terpisah, sebab keduanya menghadapi

ancaman yang sama, yaitu bahaya eksploitasi kolonial yang terus menguras sumber daya dan menindas rakyat.

Melalui tulisan-tulisannya, Dekker menekankan perlunya mendirikan sebuah organisasi yang mampu menjadi wadah bagi semua lapisan masyarakat, tanpa terhalang oleh batas-batas sempit seperti perbedaan ras, status sosial, atau agama. Ia menginginkan sebuah gerakan yang inklusif, di mana masyarakat Indonesia, bumiputra, dan siapa pun yang tinggal di Hindia Belanda dapat bersatu melawan ketidakadilan kolonial. Pandangan visioner ini menjadi dasar pembentukan *Indische Partij*, yang berusaha mewujudkan cita-cita persatuan dan kemerdekaan nasional dengan menghilangkan sekat-sekat diskriminasi yang memecah belah masyarakat Hindia Belanda.

Berdasarkan gagasan-gagasan visioner Douwes Dekker tentang persatuan dan perlawanan terhadap kolonialisme, lahirlah sebuah organisasi pergerakan bernama *Indische Partij* pada tahun 1912 (Ningsih, 2023). Organisasi ini didirikan oleh tiga tokoh besar yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu Douwes Dekker sendiri, Suwardi Suryaningrat (yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantara), dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Ketiganya memiliki visi yang sama untuk memperjuangkan keadilan sosial dan kemerdekaan bagi Hindia Belanda. Semboyan organisasi ini, "*Indie untuk Indier*," mencerminkan semangat kebangsaan yang inklusif, mengajak semua kelompok masyarakat di Hindia Belanda—baik Indo, bumiputra, maupun lainnya—untuk bersatu demi tanah air mereka (Simamora et al., 2024). *Indische Partij* bertujuan membangun rasa nasionalisme yang kuat di antara bangsa Indonesia, yang selama ini tercerai-berai akibat diskriminasi kolonial.

Organisasi ini tidak hanya berupaya menghapuskan sekat-sekat rasial, tetapi juga mendorong kerja sama yang erat antar lapisan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Lebih dari itu, *Indische Partij* memainkan peran penting dalam mempersiapkan masyarakat Hindia Belanda menuju kemerdekaan, melalui gerakan politik dan sosial yang memperjuangkan kesetaraan dan persatuan nasional. Gagasan dan semangat yang dibawa oleh *Indische Partij* menjadi salah satu pondasi awal bagi gerakan kebangsaan Indonesia di masa-masa berikutnya.

Peran *Indische Partij*

Indische Partij, yang dibentuk pada 25 Desember 1912, merupakan organisasi politik pertama di wilayah Hindia Belanda yang memainkan peran penting dalam masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Organisasi ini didirikan oleh tiga tokoh utama, yang dikenal sebagai Tiga Serangkai, yaitu E.F.E. Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Ki Hajar Dewantara (Muhlis, 2011). Berikut adalah sejumlah cara bagaimana *Indische Partij* memberikan pengaruhnya pada masyarakat kala itu (Ningsih, 2023).

Indische Partij memiliki peran yang sangat signifikan dalam membangun dan menyebarkan semangat nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Organisasi ini memanfaatkan media seperti tulisan, pamflet, dan pidato sebagai alat untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan kolonial Belanda yang dianggap menindas rakyat pribumi. Dengan pendekatan ini, *Indische Partij* berhasil menarik perhatian masyarakat luas terhadap pentingnya kesadaran akan hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka (Astuti et al., 2023).

Salah satu kontribusi penting *Indische Partij* adalah penyebaran semboyan-slogan yang penuh semangat perjuangan, seperti "*Indie los van Holland*" yang berarti Hindia harus bebas dari kekuasaan Belanda, dan "*Indie voor Indiers*" yang bermakna Hindia harus diperuntukkan bagi rakyat Hindia sendiri (Zuly Qodir, 2015). Slogan ini tidak hanya sekadar kata-kata, tetapi menjadi manifestasi dari gagasan utama perjuangan mereka, yakni membangun masyarakat yang bebas dari penjajahan dan dikelola oleh anak bangsa.

Dengan menyuarakan gagasan ini, *Indische Partij* mendorong rakyat Indonesia untuk mulai memahami pentingnya persatuan dan kemerdekaan. Mereka menunjukkan bahwa kebebasan tidak akan datang dengan sendirinya, melainkan membutuhkan perjuangan bersama yang terorganisasi.

Melalui kritik-kritik yang disampaikan kepada pemerintah kolonial, organisasi ini menjadi salah satu penggerak awal kesadaran nasional yang kelak menjadi fondasi utama gerakan kemerdekaan Indonesia.

Indische Partij turut berperan dalam mengkritisi dan melawan berbagai bentuk diskriminasi sosial yang dialami masyarakat pribumi di bawah kekuasaan kolonial. Mereka dengan tegas menyoroti ketidakadilan dalam sektor ekonomi, termasuk kesenjangan penghasilan yang mencolok antara penduduk pribumi dan orang-orang Belanda. Selain itu, mereka juga memperjuangkan kesetaraan hak politik bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang etnis (Ningsih, 2023).

Organisasi ini berusaha keras untuk menyatukan berbagai kelompok etnis yang ada di Indonesia dengan tujuan membangun solidaritas dalam melawan ketidakadilan dan penindasan sistemik yang diterapkan oleh pemerintah kolonial. Melalui perjuangan ini, *Indische Partij* tidak hanya mengadvokasi perubahan sosial, tetapi juga mendorong terciptanya persatuan yang kuat di tengah keragaman masyarakat Indonesia.

Indische Partij secara aktif menggunakan media, terutama surat kabar *De Express*, sebagai alat utama untuk menyampaikan ide-ide perjuangan mereka kepada masyarakat. Melalui artikel-artikel yang diterbitkan, mereka tidak hanya memberikan kritik tajam terhadap berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap tidak adil, tetapi juga menyebarkan pemahaman tentang pentingnya kesadaran politik di kalangan rakyat Hindia (Sudiyo, Santoso, D., Nugroho, A., dan Suwardi, 2019).

Tulisan-tulisan tersebut berfungsi untuk membuka mata masyarakat terhadap ketidakadilan yang mereka alami sekaligus mengajak mereka untuk bersatu melawan sistem kolonial. Selain itu, *De Express* menjadi medium yang efektif dalam memperkuat solidaritas dan memotivasi rakyat untuk memperjuangkan hak mereka sebagai bangsa yang merdeka. Strategi ini menjadikan media sebagai senjata penting dalam membangun gerakan politik dan menyatukan beragam lapisan masyarakat.

Organisasi ini memahami bahwa persatuan lintas latar belakang sangat penting untuk memperkuat perlawanan terhadap kolonialisme (Pratama, 2022). Melalui pendekatan inklusif, mereka mendorong kerja sama antara orang Indonesia dan pribumi sebagai strategi untuk memperjuangkan hak-hak bersama dan memperbaiki kondisi sosial mereka yang terpinggirkan. Dengan cara ini, *Indische Partij* tidak hanya memperjuangkan kesetaraan, tetapi juga menanamkan semangat kolektif yang mampu melawan dominasi kolonial secara lebih efektif.

Pendidikan menjadi salah satu fokus utama Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendiri *Indische Partij*, dalam upayanya memberdayakan masyarakat Indonesia. Ia meyakini bahwa pendidikan memegang peranan penting sebagai sarana untuk membangun kesadaran sosial dan politik di tengah rakyat. Dengan pendidikan, Ki Hajar Dewantara berharap dapat menciptakan generasi yang tidak hanya memahami hak-haknya, tetapi juga mampu berkontribusi secara aktif dalam perjuangan melawan penjajahan (Purwanto, 2021).

Melalui konsep pendidikannya, ia menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis pada budaya dan nilai-nilai kebangsaan. Ki Hajar Dewantara tidak hanya berusaha mendidik rakyat agar melek huruf, tetapi juga agar mereka memiliki kesadaran kritis terhadap kondisi sosial di sekitarnya. Pendidikan bagi Ki Hajar Dewantara adalah jalan untuk membebaskan rakyat dari kebodohan, ketergantungan, dan penindasan, sehingga mereka mampu menjadi individu yang mandiri dan turut berjuang demi kemerdekaan bangsa (Suparlan, 2016).

Meskipun pemerintah kolonial Belanda membubarkan *Indische Partij* pada 4 Maret 1913 karena dianggap mengancam stabilitas kolonial, pengaruh organisasi ini tetap hidup dan memberikan dampak yang signifikan bagi pergerakan nasional Indonesia di masa depan (Fauzi & Santosa, 2020). Gagasan-gagasan yang mereka sebarkan tentang nasionalisme dan persamaan hak terus menjadi sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya dalam perjuangan merebut kemerdekaan.

Meskipun gerakannya tergolong radikal untuk zamannya, *Indische Partij* memiliki keterbatasan dalam menjangkau kelompok perempuan dan kelas bawah (Margret et al., 2018), terutama dalam konteks pendidikan dan media. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh latar belakang para pendirinya yang berasal dari kalangan priyayi dan Indo-Eropa terdidik, serta karena sifat

organisasi yang lebih elit dan berbasis pada wacana intelektual yang sulit dijangkau oleh masyarakat awam.

Dalam bidang pendidikan, *Indische Partij* memang menyadari pentingnya pendidikan sebagai sarana pembebasan bangsa dari penjajahan. Namun, mereka lebih banyak menekankan pendidikan politik dan kesadaran kebangsaan kepada kaum muda terpelajar, terutama yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Perhatian terhadap pendidikan perempuan maupun rakyat kelas bawah belum menjadi fokus utama. Hal ini dapat dimaklumi mengingat struktur sosial kolonial pada saat itu membatasi akses perempuan dan kelas bawah terhadap pendidikan formal.

Disisi lain, tokoh-tokoh *Indische Partij* juga memberikan pengaruh jangka panjang terhadap pendidikan yang lebih merakyat. Soewardi, misalnya, setelah pengasingannya ke Belanda, kembali dengan gagasan pendidikan yang lebih bumi dan sesuai dengan kondisi lokal. Ini tercermin dari pendirian Taman Siswa pada 1922 yang menekankan nilai-nilai kebudayaan Indonesia dan akses pendidikan untuk semua kalangan, termasuk perempuan dan rakyat biasa. Dalam lembaga ini, peran perempuan mulai diperhatikan sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk dididik dan berpartisipasi dalam kehidupan kebangsaan.

Sementara itu, peran perempuan dalam gerakan nasional baru mulai tampak lebih signifikan pada masa setelah *Indische Partij*, terutama lewat organisasi seperti "Putri Mardika", "Kongres Perempuan Indonesia" atau Organisasi perempuan dan kelaskaran yang tumbuh dan berkembang di Indonesia (Ningrum, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa *Indische Partij* menjadi salah satu titik awal dalam sejarah pergerakan nasional yang kemudian berkembang lebih luas dan inklusif. Meskipun tidak langsung memperjuangkan kepentingan perempuan dan kelas bawah, kontribusi *Indische Partij* dalam menyebarkan ide nasionalisme dan pentingnya pendidikan menjadi fondasi bagi gerakan yang lebih progresif dan menyeluruh.

Sedangkan dalam hal media, *Indische Partij* menggunakan surat kabar sebagai alat propaganda dan pendidikan politik. Bahasa yang digunakan serta isu-isu yang dibahas membuat media mereka tidak sepenuhnya dapat diakses oleh perempuan dan masyarakat kelas bawah yang tidak memiliki latar pendidikan tinggi atau kemampuan berbahasa Belanda. Dengan demikian, media mereka cenderung eksklusif dan lebih efektif menjangkau kelompok terbatas yang sudah memiliki kesadaran nasional atau pendidikan formal.

Meskipun demikian, keberadaan *Indische Partij* dan gagasannya memberi inspirasi awal bagi munculnya gerakan yang lebih inklusif di masa-masa berikutnya. Wacana-wacana tentang persamaan hak, nasionalisme, dan pendidikan mulai masuk ke ruang publik, yang pada gilirannya membuka jalan bagi partisipasi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan. Dalam konteks ini, meskipun tidak secara langsung menjangkau perempuan dan kelas bawah, *Indische Partij* tetap berkontribusi terhadap terciptanya ruang diskusi baru yang memperluas cakupan gerakan nasional.

Secara keseluruhan, *Indische Partij* memainkan peran penting dalam membangun kesadaran politik dan sosial di kalangan rakyat Indonesia pada awal abad ke-20. Walaupun keberadaannya terbilang singkat, warisan ideologinya meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah perjuangan bangsa.

Tantangan dan Pengaruh *Indische Partij*

Indische Partij, partai politik pertama di Hindia Belanda ini memiliki visi progresif: memperjuangkan kemerdekaan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang ras atau latar belakang etnis. Namun, meski membawa gagasan besar yang mendahului zamannya, *Indische Partij* menghadapi berbagai hambatan yang tak terhindarkan dalam perjalanannya. Hambatan terbesar bagi *Indische Partij* datang dari pemerintah kolonial Belanda, yang secara tegas menentang segala upaya yang berpotensi mengguncang status penjajahan mereka. Penolakan status hukum dan tindakan represif menjadi senjata utama Belanda untuk melemahkan partai ini. Untuk memahami mengapa *Indische Partij* akhirnya mengalami pembubaran dalam waktu yang relatif singkat sejak didirikan, penting untuk menelaah berbagai hambatan yang mereka hadapi baik dari eksternal maupun internal.

Tantangan-tantangan ini tidak hanya menunjukkan bagaimana ketatnya kontrol kolonial atas ruang politik di Hindia Belanda, tetapi juga menggambarkan kompleksitas perjuangan organisasi yang mencoba melampaui sekat-sekat rasial dan kelas sosial. Hambatan tersebut muncul dalam berbagai bentuk: mulai dari tekanan politik, pembatasan hukum, hingga respons keras dari pihak kolonial terhadap tokoh-tokoh pergerakan. Di samping itu, dinamika internal dan perbedaan latar belakang dalam tubuh partai turut menjadi faktor yang memengaruhi konsistensi gerakannya. Adapun tantangan-tantangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Perbedaan internal antara keturunan Indo dan Bumiputera dalam strategi perjuangan mereka pada masa pergerakan nasional di Hindia Belanda dapat dilihat dari latar belakang sosial, pendidikan, dan posisi mereka dalam struktur kolonial. Keturunan Indo, yakni hasil perkawinan campuran antara Eropa (umumnya Belanda) dan pribumi, memiliki kedudukan yang relatif lebih tinggi dalam hierarki sosial kolonial dibandingkan dengan kaum Bumiputera murni. Mereka biasanya mendapatkan akses pendidikan Barat lebih awal dan memiliki jaringan sosial yang lebih dekat dengan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, strategi perjuangan mereka cenderung bersifat moderat, legalistik, dan berorientasi pada reformasi sistem kolonial dari dalam.

Sebaliknya, Bumiputera yang merupakan penduduk asli dan seringkali menjadi korban utama diskriminasi sosial, ekonomi, dan pendidikan, mengembangkan strategi perjuangan yang lebih radikal dan berakar pada semangat kebangsaan (Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, n.d.). Mereka mengalami langsung ketidakadilan kolonial dan ketertinggalan akibat kebijakan diskriminatif, sehingga strategi yang mereka tempuh lebih condong pada pembentukan identitas nasional dan mobilisasi massa. Organisasi seperti Sarekat Islam dan kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi wadah perjuangan yang menyuarakan kemerdekaan penuh dari kolonialisme. Strategi Bumiputera umumnya lebih fokus pada penguatan kesadaran nasional, pendidikan massa, dan perlawanan terbuka terhadap dominasi kolonial.

Ketegangan strategi ini juga dipengaruhi oleh perbedaan orientasi ideologis. Kaum Indo sering melihat masa depan dalam kerangka kerjasama dengan Belanda, sedangkan Bumiputera melihat Belanda sebagai kekuatan penindas yang harus dilawan. Walaupun terdapat titik temu dalam keinginan menghapuskan diskriminasi, pendekatan yang dipilih sangat berbeda. Bahkan dalam organisasi multietnis seperti *Indische Partij*, friksi sering muncul karena adanya perbedaan persepsi terhadap arah perjuangan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sama-sama tertindas oleh sistem kolonial, pengalaman sosial dan akses terhadap kekuasaan sangat memengaruhi bentuk dan intensitas strategi perjuangan mereka.

Secara internal, kelompok Indo lebih terfragmentasi dan sering menghadapi dilema identitas. Sebagai bukan Eropa sepenuhnya dan juga bukan pribumi, mereka berada dalam posisi ambigu yang membuat solidaritas kolektif mereka lemah. Sebagian besar dari mereka takut kehilangan status sosial jika terlalu dekat dengan perjuangan Bumiputera yang dianggap radikal. Di sisi lain, Bumiputera memiliki basis sosial yang lebih luas dan ideologi yang lebih terarah karena dukungan dari pesantren, tokoh adat, dan elit nasionalis yang mulai bangkit. Strategi perjuangan mereka banyak bertumpu pada penggalangan semangat kebangsaan melalui media cetak, pendidikan alternatif, dan konsolidasi organisasi politik berbasis massa.

Perbedaan ini tidak hanya mencerminkan keragaman strategi, tetapi juga menunjukkan bagaimana struktur kolonial membentuk kesadaran dan respons kelompok yang berbeda terhadap penindasan. Dalam jangka panjang, strategi Bumiputera terbukti lebih berpengaruh terhadap proses dekolonisasi karena bersifat menyeluruh dan mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Sementara itu, strategi kaum Indo cenderung kehilangan relevansi seiring meningkatnya tekanan nasionalisme radikal dan keinginan rakyat untuk merdeka secara penuh.

Dengan demikian, perbedaan internal antara keturunan Indo dan Bumiputera dalam strategi perjuangan terletak pada posisi sosial, akses terhadap kekuasaan kolonial, serta visi jangka panjang terhadap masa depan Hindia Belanda. Keduanya memainkan peran yang penting dalam dinamika pergerakan nasional, namun strategi Bumiputera yang lebih radikal dan masiflah yang akhirnya menjadi pendorong utama menuju kemerdekaan Indonesia. Kelompok Indo lebih sering mendirikan organisasi-organisasi yang menggunakan pendekatan diplomatik, seperti *Indische Partij*, yang menuntut persamaan hak antara semua warga Hindia, tanpa langsung menyerukan kemerdekaan.

Ketika *Indische Partij* mengajukan permohonan resmi untuk mendapatkan pengakuan sebagai badan hukum yang sah, pemerintah kolonial Belanda dengan tegas menolak permohonan tersebut. Penolakan ini disertai dengan alasan bahwa partai tersebut dianggap memiliki sifat subversif atau gagasan yang dapat membahayakan stabilitas dan kedaulatan pemerintahan Belanda di wilayah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menuduh *Indische Partij* sebagai organisasi yang berpotensi menghasut rakyat untuk memberontak, sehingga keberadaannya dipandang sebagai ancaman langsung terhadap dominasi politik, ekonomi, dan sosial yang telah lama mereka kuasai. Sebagai partai yang bercita-cita tinggi untuk menyatukan kaum Indo dan pribumi dalam semangat nasionalisme, *Indische Partij* menjadi simbol perlawanan terhadap sistem kolonial yang menindas. Gagasan ini tentu tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah kolonial, yang berupaya mempertahankan hierarki sosial demi mengamankan kekuasaannya. Penolakan pengakuan ini bukanlah sekadar langkah formalitas administratif (Handoko, 2016), melainkan bagian dari strategi yang lebih luas dan sistematis untuk membungkam suara perlawanan yang semakin berkembang. Dengan menolak pengakuan, pemerintah kolonial berharap dapat melemahkan legitimasi dan pengaruh *Indische Partij* di kalangan masyarakat, sekaligus menghambat perjuangannya untuk menciptakan perubahan fundamental di Hindia Belanda (Muallif, 2023).

Pemerintah Belanda tidak berhenti pada penolakan status hukum. Mereka juga menggunakan berbagai tindakan represif untuk membatasi ruang gerak *Indische Partij*. Anggota partai kerap ditangkap, diusir, atau dihukum karena aktivitas politik mereka. Media yang digunakan partai untuk menyuarakan aspirasi, seperti surat kabar dan pamflet sering kali dilarang peredarannya. Bahkan, pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh partai pun dilarang, memaksa para aktivis untuk bekerja dalam bayang-bayang. Represi ini tidak hanya melumpuhkan organisasi secara struktural, tetapi juga menciptakan ketakutan di kalangan pendukung dan simpatisan (Hafidz Azhar, 2023).

Salah satu aksi nyata dari tindakan represif pemerintahan Belanda dalam mengatasi pergerakan dari *Indische Partij* ini adalah dengan mengasingkan ketiga *founder* dari *Indische Partij* ke Belanda. Pengasingan para pemimpin *Indische Partij* pada tahun 1913 menjadi pukulan telak bagi partai ini. Douwes Dekker, yang merupakan motor penggerak utama, bersama dengan Tjipto dan Ki Hajar, dipandang sebagai figur-figur inspiratif yang mampu menggerakkan massa. Tanpa kehadiran mereka, *Indische Partij* kehilangan arah dan fokus perjuangan. Dukungan dari anggota dan simpatisan pun perlahan memudar, hingga akhirnya partai ini dibubarkan.

Meskipun pengasingan ini melemahkan *Indische Partij* secara langsung, pengaruh dari ketiga tokoh ini tetap terasa dalam pergerakan nasional Indonesia. Ide-ide nasionalisme yang ditanamkan oleh *Indische Partij* menjadi fondasi bagi pergerakan-pergerakan lain yang lahir setelahnya, seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (Sudiyo, Santoso, D., Nugroho, A., dan Suwardi, 2019). Disamping mendapatkan pengecaman dari pemerintahan Belanda, *Indische Partij* pun mendapat hambatan lain dari aksi penolakan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat. Penolakan ini muncul dari dua arah:

kelompok orang Belanda totok dan kalangan Indo konservatif yang merasa tidak terwakili oleh perjuangan partai. Dengan demikian, tantangan yang dihadapi *Indische Partij* semakin kompleks karena datang dari berbagai arah, baik eksternal maupun internal. Untuk memahami dinamika ini lebih jauh, berikut adalah beberapa bentuk penolakan masyarakat terhadap *Indische Partij*:

Orang Belanda totok, atau warga keturunan Belanda asli yang tinggal di Hindia Belanda, merasa terancam oleh keberadaan *Indische Partij*. Mereka melihat partai ini sebagai ancaman serius terhadap status sosial, ekonomi, dan politik yang selama ini mereka kuasai dengan kokoh. *Indische Partij*, sebagai organisasi yang memperjuangkan kesetaraan antara kaum Indo dan pribumi, dinilai dapat merusak tatanan hierarki kolonial yang memberi keuntungan besar bagi komunitas Belanda totok. Karena itu, mereka merasa perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk upaya mempertahankan dominasi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, kelompok Belanda totok melancarkan berbagai strategi untuk melemahkan pengaruh *Indische Partij*. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan menyebarkan kampanye hitam yang penuh fitnah. Melalui media, pertemuan komunitas, dan berbagai jalur komunikasi lainnya, mereka menuduh *Indische Partij* sebagai organisasi rasis dan separatis. Tuduhan ini disusun dengan cermat untuk menciptakan citra negatif tentang partai tersebut di mata masyarakat luas, termasuk di kalangan penduduk pribumi dan Indo yang mungkin tertarik bergabung. melindungi posisi mereka (Muallif, 2023).

Selain itu, tuduhan tersebut bertujuan untuk membangun narasi bahwa persatuan antara kaum Indo dan pribumi adalah gagasan yang tidak realistis dan utopis. Mereka ingin meyakinkan masyarakat bahwa kedua kelompok ini memiliki perbedaan fundamental yang tidak mungkin disatukan, baik dari segi budaya, nilai-nilai, maupun kepentingan politik. Dengan menciptakan narasi ini, mereka berharap dapat memecah belah dukungan terhadap *Indische Partij* dan menggagalkan upaya partai untuk menciptakan aliansi yang lebih kuat antara kaum Indo dan pribumi. Kampanye hitam ini tidak hanya terbatas pada upaya propaganda. Kelompok Belanda totok juga menggunakan pengaruh politik mereka untuk menekan *Indische Partij* secara langsung. Pemerintah kolonial, yang sebagian besar dikuasai oleh Belanda totok, diberdayakan untuk mengeluarkan kebijakan yang merugikan partai ini. Aktivitas politik *Indische Partij* sering kali diawasi dengan ketat, dan para pemimpinnya, termasuk tokoh-tokoh seperti Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Suwardi Suryaningrat, menghadapi berbagai bentuk intimidasi, bahkan hingga pengasingan.

Tekanan ini menunjukkan betapa besar ancaman yang dirasakan kelompok Belanda totok dari perjuangan *Indische Partij*. Partai ini, dengan gagasan progresifnya, dianggap menggoyahkan struktur sosial kolonial yang selama ini memberikan posisi superior bagi Belanda totok. Bagi mereka, mempertahankan status adalah cara untuk melindungi keuntungan ekonomi dan sosial yang telah mereka nikmati. Maka dari itu, segala upaya dilakukan untuk meredam pengaruh *Indische Partij*, baik melalui strategi halus seperti propaganda maupun langkah keras seperti tekanan politik dan hukum. Namun, meskipun menghadapi perlawanan yang begitu besar, *Indische Partij* tetap menjadi simbol perlawanan terhadap kolonialisme. Keberanian partai ini untuk memperjuangkan persatuan antara kaum Indo dan pribumi menunjukkan bahwa gagasan kesetaraan dan keadilan tidak bisa dibungkam begitu saja oleh kekuatan kolonial. Justru, tekanan yang diterima semakin memperkuat semangat perjuangan para anggotanya, yang terus mencari cara untuk melawan narasi yang dibuat oleh Belanda totok. Persatuan yang mereka perjuangkan menjadi harapan baru bagi masyarakat Hindia Belanda untuk melepaskan diri dari belenggu ketidakadilan dan diskriminasi.

Di sisi lain, beberapa orang Indo yang memiliki kedekatan emosional, budaya, dan loyalitas terhadap Belanda juga tidak memberikan dukungan kepada *Indische Partij*. Sikap ini muncul dari rasa ketidakpastian mereka terhadap visi dan tujuan yang diusung oleh partai tersebut. Sebagai kelompok

minoritas yang memiliki posisi unik di Hindia Belanda, orang Indo ini merasa bahwa perjuangan *Indische Partij* tidak sepenuhnya mencerminkan atau mewakili kepentingan mereka secara menyeluruh. Bagi mereka, status mereka yang berada di antara dua dunia yakni sebagai keturunan campuran Belanda dan pribumi membuat mereka berada dalam situasi yang rumit, sehingga mereka merasa sulit untuk sepenuhnya menyelaraskan diri dengan gagasan-gagasan radikal yang diusung oleh partai tersebut (Beno et al., 2022).

Kekhawatiran terbesar kelompok ini adalah potensi konflik antar kelompok etnis yang mungkin timbul apabila ide-ide progresif *Indische Partij* diterapkan tanpa mempertimbangkan dinamika sosial yang kompleks di Hindia Belanda. Mereka menganggap bahwa perjuangan untuk menyatukan komunitas Indo dan pribumi, meskipun terdengar mulia, dapat menciptakan ketegangan baru, terutama di antara mereka yang sudah terbiasa hidup dalam hierarki kolonial yang terstruktur. Dalam pandangan mereka, struktur sosial yang ada, meskipun penuh dengan ketidakadilan, memberikan stabilitas tertentu yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kehidupan sehari-hari tanpa harus terlibat dalam konflik besar.

Penolakan dari beberapa kaum Indo ini tidak hanya didasarkan pada rasa takut akan perubahan, tetapi juga pada persepsi bahwa perjuangan *Indische Partij* terlalu idealistis dan kurang mempertimbangkan realitas praktis di lapangan. Mereka merasa bahwa membangun aliansi antara kaum Indo dan pribumi, meskipun terdengar baik, memerlukan upaya yang jauh lebih hati-hati dan tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Mereka khawatir, jika partai ini gagal merealisasikan tujuannya, justru komunitas Indo yang akan menanggung risiko terbesar, karena posisi mereka yang terjepit di antara masyarakat pribumi dan komunitas Belanda totok.

Selain itu, komunitas Indo yang menolak *Indische Partij* juga merasa lebih nyaman dengan keterkaitan mereka dengan budaya dan sistem kolonial Belanda. Mereka melihat identitas mereka sebagai sesuatu yang berbeda dari masyarakat pribumi, dan dalam beberapa kasus, mereka merasa memiliki keunggulan tertentu karena kedekatan mereka dengan kebudayaan Eropa. Perasaan ini memperkuat jarak emosional antara mereka dan perjuangan *Indische Partij*, yang mengedepankan persatuan dengan pribumi sebagai inti dari visinya. Penolakan ini menciptakan jurang yang cukup signifikan di antara komunitas Indo itu sendiri. Alih-alih bersatu dalam melawan ketidakadilan kolonialisme, mereka justru terpecah menjadi beberapa kubu dengan pandangan yang berlawanan. Di satu sisi, ada kaum Indo yang mendukung gagasan kesetaraan dan persatuan yang diusung oleh *Indische Partij*, sementara di sisi lain, ada pula mereka yang memilih untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Belanda, mengutamakan stabilitas dan kenyamanan yang ditawarkan oleh sistem kolonial.

Jurang ini menunjukkan bahwa perjuangan melawan kolonialisme tidaklah sederhana, terutama di masyarakat dengan latar belakang yang begitu beragam. Kompleksitas ini menjadi tantangan besar bagi *Indische Partij* dalam membangun dukungan yang solid dari komunitas Indo. Meskipun visi partai ini menjanjikan masa depan yang lebih adil dan setara, perbedaan perspektif di dalam komunitas Indo sendiri menjadi salah satu hambatan utama yang sulit diatasi. Pada akhirnya, perpecahan ini menggarisbawahi betapa pentingnya pendekatan yang inklusif dan bijaksana dalam memperjuangkan perubahan sosial yang berkelanjutan (Atikurrahman et al., 2021).

Berdirinya *Indische Partij* pada tahun 1912 oleh Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, dan Ki Hajar Dewantara merupakan bagian penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia, partai ini menjadi wadah bagi kaum pelajar pribumi untuk menyuarkan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak mereka dibawah tekanan pemerintah kolonial Belanda (Susilo & Isbandiyah,

2018). Keberadaan *Indische Partij* memberikan dampak yang cukup signifikan baik dalam bidang politis, sosial, maupun kultural bagi perkembangan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan.

Indische Partij membantu meningkatkan kesadaran nasionalisme dan merangsang semangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Menggunakan media sebagai alat propaganda menjadikan pendidikan sebagai strategi jangka panjang. *Indische Partij* juga memperjuangkan kesetaraan dengan mengusulkan semua penduduk Indonesia harus diperlakukan dengan cara yang sama dan mendapatkan hak yang sama pula. Bahkan dari *Indische Partij* ini juga mendorong semangat timbulnya gerakan politik lainnya. Dilihat dari dampak sisi negatifnya *Indische Partij* dipandang tidak mewakili seluruh penduduk Indonesia karena partai ini didirikan oleh keturunan Eropa, sehingga hal tersebut memancing perpecahan antar etnis (Aiden, 2023).

Konklusi

Hasil penelitian ini menganalisis strategi propaganda yang dijalankan oleh *Indische Partij* (IP) dalam membangkitkan kesadaran nasional di Hindia Belanda melalui media dan pendidikan pada tahun 1912–1925. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran *Indische Partij* dalam membentuk nasionalisme Indonesia di tengah tekanan kolonialisme dan ketimpangan sosial yang akut. Dari hasil kajian historis dan analisis kualitatif terhadap sumber-sumber primer dan sekunder, dapat disimpulkan bahwa strategi propaganda *Indische Partij* secara sistematis memanfaatkan dua sarana utama, yaitu media dan pendidikan. Media, khususnya surat kabar *De Express*, digunakan sebagai alat agitasi politik dan kritik terhadap kebijakan kolonial. Sedangkan pendidikan dimanfaatkan sebagai strategi jangka panjang untuk membentuk karakter dan kesadaran kebangsaan generasi muda.

Indische Partij tidak hanya berhasil menyuarakan ide-ide persatuan dan keadilan sosial lintas ras dan kelas, namun juga menjadi pelopor dalam memperkenalkan nasionalisme modern di kalangan masyarakat Hindia Belanda. Meski menghadapi tantangan serius berupa penindasan dari pemerintah kolonial, penolakan status hukum, hingga pengasingan tokoh-tokohnya, *Indische Partij* tetap meninggalkan warisan penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjuangan kemerdekaan tidak semata-mata dilakukan melalui kekuatan fisik, melainkan juga melalui narasi, pendidikan, dan media sebagai alat pembentuk opini publik dan kesadaran kolektif. Strategi komunikasi *Indische Partij* memberi pelajaran berharga bahwa pembebasan dari kolonialisme juga memerlukan transformasi kesadaran dan solidaritas sosial. Dengan demikian, *Indische Partij* menjadi simbol awal dari gerakan intelektual terorganisir yang menanamkan benih nasionalisme dan mempersiapkan masyarakat menuju kemerdekaan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih khusus disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Pergerakan Nasional Rezza Fauzi Muhammad Fahmi, M.Hum, rekan seperjuangan, serta pihak-pihak yang telah memberikan masukan, data, dan referensi yang sangat berharga. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumbangsih ilmiah yang berarti dalam pengembangan kajian di bidang yang dibahas.

Referensi

- Aiden. (2023, April). dampak positif dan negatif Indische Partij. *ID Sejarah Kita*, 19.
Alifia Nurhusna Afandi, Aprilia Iva Swastika, E. Y. E. (n.d.). *PENDIDIKAN PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL DI HINDIA BELANDA TAHUN 1900-1930*.

- <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.25157/ja.v7i1.3038>
- Angraini, R. (2017). Karakteristik Media Yang Tepat Dalam Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Nilai. *Journal of Moral and Civic Education*, 1(1), 14–24.
- Annisa Nur Hidayah, Ayu Lisda, & Denisa Ramadhani. (2023). Stovia Dan Kehidupan Sosial Masyarakat Di Hindia Belanda. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(1), 95–104. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i1.18>
- Astuti, M., Studi, P., Sejarah, P., Pendidikan, F., Pengetahuan, I., Dewantara, K. H., Nasional, P., & Siswa, T. (2023). *Peran Ki Hadjar Dewantara Dalam Pergerakan Nasional Indonesia (1908 – 1930)*. 2(1), 24–33.
- Atikurrahman, M., Ilma, A. A., Dharma, L. A., Affanda, A. R., Ajizah, I., & Firdaus, R. (2021). Sejarah Pemberontakan dalam Tiga Bab: Modernitas, Belasting, dan Kolonialisme dalam Sitti Nurbaya. *SULUK: Jurnal Bahasa, Sastra, Dan Budaya*, 3(1), 1–22. <https://doi.org/10.15642/suluk.2021.3.1.1-22>
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Perjuangan Budi Utomo Pada Masa Pergerakan Nasional Indonesia 1908-1935. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Dergisi, K. (1990). *Yollardan Yaymak*. 1–4.
- Edi, S. (2018). Ideologi, Kekuasaan, Dan Pengaruhnya Pada Arah Sistem Pendidikan Nasional Indonesia (1950-1965). *Journal of Indonesian History*, 7(1), 19–34.
- Endah Siswati. (n.d.). *ANATOMI TEORI HEGEMONI ANTONIO GRAMSCI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/translitera.v5i1.355>
- Fahmi, R. F. M., Isfaturohmah, D., Adima, F. N., & Sopiah, A. Z. (2025). *Transformasi Jong Java : Dari Gerakan Kedaerahan ke Gerakan Nasional National Movement 1915-1928*. 06, 24–35.
- Fahmi, R. F. M., Nurholis, E., Rahayu, T. K., Apriliani, A., & Ramadhan, A. A. (2025). *Dinamika Kehidupan Nelayan Pangandaran 1970-2012 : Transformasi Sosial Ekonomi dalam Konteks Negara Maritim*. 12(1), 147–158.
- Fakhri, N., & Makassar, U. N. (2020). *Volume 2 No 2 Maret 2017*. 2(March 2017).
- Fauzi, W. I., & Santosa, A. B. (2020). Kehidupan Sosial Budaya Masa Pergerakan Nasional di Indonesia (1900-1942) dari Sudut Pandang Novel Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 3(2), 187–196. <https://doi.org/10.17509/historia.v3i2.21675>
- Firmansyah, A. B. (2013). Perjuangan Ernest Francois Eugene Douwes Dekker dari Politik Menuju Pendidikan 1913-1941. *AVATARA: E-Journal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 57–63. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/1102>
- Hafidz Azhar. (2023). RIWAYAT INDISCHE PARTIJ #8: Pemerintah Kolonial Menolak Badan Hukum. *Bandung Bergerak*.
- Handoko, S. T. (2016). BOVEN DIGOEL DALAM PANGGUNG SEJARAH INDONESIA: Dari Pergerakan Nasional Hingga Otonomi Khusus Papua. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.14710/jscl.v1i2.12084>
- Harisuddin, A. (2013). *TEORI-TEORI PENDIDIKAN PEMBEBASAN PAULO FREIRE*. 1–12.
- Hasan, M., Hasan, S., Anita, A., Yasir, A., & Basirun, B. (2023). Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam Di Indonesia Zaman Pra Kemerdekaan Masa Kolonial Belanda Dan Jepang. *Al Wildan: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 126–136. <https://doi.org/10.57146/alwildan.v1i3.711>
- Mandasari, R., Gamelia, N., & Nurlaili, N. (2023). Persatuan Dalam Keberagaman. *Science and Education Journal (SICEDU)*, 2(2), 340–345. <https://doi.org/10.31004/sicedu.v2i2.125>
- Margret, A., Panjaitan, Y., Novitasari, M., & Iksarana, J. (2018). *Menyoal Data Representasi Perempuan di Lima Ranah*. <http://cakrawikara.id>
- Muallif. (2023). *Indische Partij: Partai Politik Pertama di Hindia Belanda*. 13 Agustus.
- Muhlis, H. (2011). *Kekuatan-kekuatan Politik di Indonesia*. UMMU Press.
- Munthe, M. G. (2012). Propaganda dan Ilmu Komunikasi. *Jurnal ULTIMA Comm*, 4(1), 39–50. <https://doi.org/10.31937/ultimacomm.v4i1.429>
- Naseh, A. H. (2013). Nasionalisme Dalam Tinjauan Islam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 12–26.

- Nasution, S., & Hafizsutriono, H. (2024). Pendidikan Politik Generasi Muda Melalui Pendekatan Budaya Populer. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(April), 38–45.
- Ningrum, A. D. (2014). *Laskar Pemuda Putri Republik Indonesia Dalam Revolusi Di Surabaya Tahun 1945-1946*. Universitas Airlangga.
- Ningsih, S. (2023). Kontribusi Gagasan Kritis Dari Tiga Serangkai Dalam Mewujudkan Nasionalisme Indonesia (1912-1914). *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Sejarah*, 2(3), 47–55. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i3.24812>
- Nugraha, M. T. (2019). Hoax di Media Sosial Facebook: Antara Edukasi dan Propaganda Kepentingan. *JSW (Jurnal Sosiologi Walisongo)*, 3(1), 97–108. <https://doi.org/10.21580/jsw.2019.3.1.3359>
- Nurhasanah, A., Bagus, M., Jaya, R., & Ajmain, M. (2025). *SEJARAH BERDIRINYA INDISCHE PARTIJ (PARTAI HINDIA) PADA TAHUN 1912 HISTORY OF THE ESTABLISHMENT OF THE INDISCHE PARTIJ (INDIAN PARTY) IN 1912*. 4623–4633.
- Parsons, P. (1935). *Early Media Effects Theory & the Suggestion Doctrine*. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/96924/1/parsons-early-media-effects-2024.pdf#page=300>
- pergerakan Nasional (Indische Partij)*. (n.d.).
- Pergerakan, Z., & Suwirta, O. A. (1999). Zaman Pergerakan, Pers, dan Nasionalisme di Indonesia *) Oleh: Andi Suwirta. *Mimbar Pendidikan*, 4(4).
- Pratama, Py. P. R. A. (2022). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia. In *Lakeisha*.
- Purwanto, B. (2021). Ki Hadjar Dewantara, Berpolitik dengan Akal Budi dan Hati Nurani. *Patra Widya: Seri Penerbitan Penelitian Sejarah Dan Budaya.*, 22(2), 43–64. <https://doi.org/10.52829/pw.323>
- Simamora, J., Sianturi, R. E., & Kholijah, S. (2024). *Jurnal Inovasi Pendidikan KEBIJAKAN POLITIK ETIS : MUNCULNYA GOLONGAN*. 7, 57–62.
- Sudiyo, Santoso, D., Nugroho, A., dan Suwardi, E. (2019). Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan. *Sejarah Pergereakan Nasional Indonesia*, 2(1), 1–134.
- Suparlan, H. (2016). Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara Dan Sumbangannya Bagi Pendidikan Indonesia. *Jurnal Filsafat*, 25(1), 56. <https://doi.org/10.22146/jf.12614>
- Susilo, A., & Isbandiyah, I. (2018). Politik Etis Dan Pengaruhnya Bagi Lahirnya Pergerakan Bangsa Indonesia. *HISTORIA Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 403. <https://doi.org/10.24127/hj.v6i2.1531>
- Tampubolon, D. P. (2001). Perguruan Tinggi Bermutu: Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Tinggi Menghadapi Tantangan Abad ke-21. *PT. Gramedia Pustaka Ilmu*, XX(4), 345–346.
- Ummah, M. S. (2019). Presfektif Belajar dan Strategi Pembelajaran. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Utomo, W. S. (2014). Nasionalisme dan Gagasan Kebangsaan Indonesia Awal : Pemikiran Soewardi Suryaningrat , Tjiptomangoenkusumo dan Douwes Dekker 1912-1914. *Lembaran Sejarah*, 11(1), 51–69.
- Wiryooprato, S., Herlina, N., Marihandono, D., & Tangkilisan, Y. (2017). *Perjuangan Ki Hajar Dewantara: Dari Politik ke Pendidikan*. Museum Kebangkitan Nasional Direktorat Jendral Kebudayaan.
- Zed, M. (2017). Warisan Penjajahan Belanda Di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan Dan Kesenambungan). *Diakronika*, 17(1), 88. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol17-iss1/18>
- Zul Fadhl, Y. (2016). Kedudukan Kelompok Minoritas dalam Perspektif HaM dan Perlindungan Hukumnya Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 352. <https://doi.org/10.31078/jk1128>
- Zuly Qodir. (2015). *Nasionalisme Tulen Singa Podium Kasman Singodimedjo: pemikiran dan pergerakan*.

PERUBAHAN SOSIAL-EKONOMI MASYARAKAT BUMIPUTRA, EROPA, DAN CINA DI JAWA, ABAD KE-17 HINGGA AWAL ABAD KE-20

Mohammad Masrudin Firdiyansyah¹,

¹Departemen Sejarah, Universitas Gadjah Mada

Masrudin049@gmail.com

Abstrak

Artikel ini membahas perubahan struktur sosial-ekonomi masyarakat kolonial di Jawa dari abad ke-17 hingga awal abad ke-20, dengan menekankan dinamika relasi antara kelompok Bumiputra, Cina, dan Eropa dalam konteks kebijakan kolonial yang terus berubah. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya penelitian yang secara komprehensif melihat bagaimana kebijakan kolonial yang menindas sekaligus menciptakan peluang mobilitas sosial bagi kelompok tertentu. Dengan menggunakan metode sejarah yang mencakup heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, penelitian ini menelusuri kronologi perubahan sosial dalam lintas periode kolonial, mulai dari masa VOC, tanam paksa, liberalisasi ekonomi, hingga politik etis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur sosial masyarakat kolonial bersifat fluktuatif. Masing-masing kelompok mengalami fase dominasi dan kemunduran tergantung pada kedekatannya dengan kekuasaan kolonial. Temuan ini menegaskan bahwa kolonialisme tidak hanya menghasilkan ketimpangan yang statis, melainkan juga membuka ruang terbatas bagi perubahan sosial. Studi ini berkontribusi pada historiografi kolonial Indonesia dengan menyoroti pentingnya pendekatan diakronis dalam memahami dinamika sosial masyarakat multietnis di bawah kekuasaan kolonial.

Kata Kunci: kolonialisme; perubahan sosial; Bumiputra; Eropa; Cina;

Pendahuluan

“Segala sesuatu mengalir. Tak ada yang abadi kecuali perubahan.”

— Heraclitus (Müller-Merbach, 2006),

Ungkapan Heraclitus tersebut menemukan relevansinya dalam studi tentang masyarakat kolonial, yang kerap diasumsikan sebagai struktur sosial yang ajek dan hierarkis. Dalam wacana historiografi Indonesia, kolonialisme sering digambarkan sebagai sistem dominasi yang timpang, di mana penduduk Bumiputra menjadi korban pasif dari eksploitasi politik dan ekonomi oleh kolonial Belanda (Purwanto, 2004). Perspektif ini, meskipun valid, cenderung mengabaikan kompleksitas dan dinamika internal masyarakat kolonial itu sendiri—terutama pergeseran relasi antar kelompok etnis seperti Bumiputra, Cina, dan Eropa dalam konteks perubahan kebijakan kolonial yang fluktuatif.

Beberapa penelitian terdahulu yang telah mengungkap ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi yang dihadapi rakyat kolonial, khususnya Bumiputra, dalam rentang waktu yang panjang dapat dilihat dari karya-karya klasik Sartono Kartodirdjo *Pengantar Sejarah Indonesia Baru* (1987), M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200–2008* (2008), George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia* (2013), serta studi-studi tentang eksploitasi struktural seperti Sailal Arimi

(2008) dan Nurmalasyari dkk. (2024). Namun, karya-karya ini cenderung kurang menggali dinamika sosial intra dan antar kelompok etnis di bawah kolonialisme.

Artikel ini bertolak dari asumsi bahwa struktur sosial masyarakat kolonial di Jawa tidak bersifat statis, melainkan senantiasa mengalami perubahan yang kompleks dan tidak linier. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh intervensi kolonial, yang tidak hanya membuat satu kelompok menjadi termarginalkan tetapi memungkinkan kelompok lain untuk melakukan mobilitas sosial. Dalam konteks ini, masyarakat kolonial lebih tepat dipahami sebagai sebuah konfigurasi relasi kuasa yang terus bergeser, bukan sekadar piramida kekuasaan yang beku.

Studi ini mengambil fokus pada tiga kelompok utama yang hidup berdampingan dalam lanskap kolonial Jawa: Bumiputra, Cina, dan Eropa. Ketiganya mengalami perubahan posisi sosial-ekonomi yang signifikan dalam rentang abad ke-17 hingga awal abad ke-20, seiring dengan perubahan rezim politik dan ekonomi yang silih berganti—mulai dari masa VOC, reformasi Daendels dan Raffles, tanam paksa, liberalisme ekonomi, hingga politik etis. Meskipun mencakup semua kelompok, fokus utama diarahkan pada masyarakat Bumiputra, mengingat tingkat dinamikanya yang paling mencolok—baik dalam relasinya dengan kelompok Eropa dan Cina, maupun dalam relasi internal antara elite (priayi) dan masyarakat biasa. Sementara itu, transformasi sosial kelompok Cina dan Eropa cenderung lebih stabil pada fase-fase awal kolonialisme, dan baru mengalami guncangan signifikan dalam era liberalisme dan politik etis.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama, yaitu heuristik (pengumpulan sumber), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah) (Kuntowijoyo, 2013). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan erat dengan dinamika perubahan sosial-ekonomi masyarakat dalam konteks kolonial yang berlangsung dalam kurun waktu panjang (abad ke-17 hingga awal abad ke-20). Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap proses perubahan tersebut hanya dapat dicapai melalui metode yang bersifat diakronis dan kontekstual seperti yang ditawarkan oleh metode sejarah.

Pembahasan

Kedatangan Eropa dan Perubahan Struktur Sosial Masyarakat Kolonial pada Abad ke-17

Sebelum kedatangan bangsa Eropa, masyarakat di pesisir Jawa telah menunjukkan kemajemukan sosial dan ekonomi yang kompleks. Komunitas Bumiputra hidup berdampingan dengan para pendatang dari Cina, India, dan Arab—kebanyakan berprofesi sebagai pedagang. Interaksi dagang lintas etnis ini turut mempercepat penyebaran Islam, sekaligus menciptakan ruang sosial yang relatif egaliter di antara para pelaku ekonomi (Husain, 2017). Di antara kelompok tersebut, peran elite lokal seperti raja dan bangsawan sangat dominan. Mereka bukan hanya bertindak sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai aktor ekonomi penting yang membiayai pelayaran, menetapkan cukai, dan bahkan memonopoli komoditas tertentu (Burger, 1962, hlm. 25).

Hubungan perdagangan antarkerajaan di Jawa dan luar Jawa kala itu didasarkan pada prinsip kesetaraan. Misalnya, raja Jawa dapat mengirimkan utusan diplomatik ke Tiongkok sekaligus memberi mereka kebebasan berdagang, dan sebaliknya, para utusan dari Tiongkok pun diperlakukan serupa oleh penguasa Jawa (Burger, 1962, hlm. 28). Namun, kesetaraan ini mulai terkikis ketika VOC, sejak awal abad ke-17, menancapkan dominasinya dalam sektor politik dan ekonomi.

VOC secara sistematis menggerus otonomi ekonomi para bangsawan lokal dengan mengambil alih hak monopoli, penarikan cukai, dan penguasaan jalur distribusi komoditas strategis (Robinson, 2012, hlm. 15). Peran sebagai pelaku ekonomi utama yang sebelumnya dipegang bangsawan dan pedagang Bumiputra direduksi menjadi posisi subordinat. Para pedagang lokal dipaksa bertahan di pinggiran pasar, dan banyak di antaranya akhirnya hanya mampu berdagang komoditas pertanian atau kerajinan tangan di kawasan pedesaan dan sekitar pelabuhan (Purwanto, 2003, hlm. 292–293).

Pada saat inilah awal perubahan struktur sosial terjadi. Kelompok yang paling diuntungkan dari sistem baru ini adalah orang Eropa sendiri, disusul oleh orang Cina sebagai mitra ekonomi menengah. Orang Cina diberi konsesi atas tanah, hak pemungutan pajak, dan otoritas atas sejumlah aktivitas ekonomi seperti pasar, jalan, garam, dan rumah potong hewan (Robinson, 2012, hlm. 15). Jika sebelumnya orang Cina berfungsi sebagai penghubung antara penduduk lokal dan saudagar di Cina, di era VOC mereka bertransformasi menjadi perantara antara VOC dan masyarakat lokal (Kahin, 2013, hlm. 9).

Dominasi ekonomi orang Cina tidak terjadi secara alamiah, melainkan direkayasa oleh VOC sebagai strategi untuk menciptakan kelas menengah kolaborator yang loyal. Mereka diangkat menjadi pemilik toko, pengelola pelabuhan, pengusaha pertanian, hingga kolektor hasil bumi dan pajak (Hellwig, 2007, hlm. 6–8). Dalam kacamata kolonial, keberadaan orang Cina diperlukan untuk meningkatkan efisiensi eksploitasi kolonial dan menghambat potensi perlawanan dari kelas menengah Bumiputra (Kahin, 2013, hlm. 9; Sahrasad, 2019, hlm. 210). Meskipun persekutuan ini sempat terhenti sementara pasca terjadinya geger Pecinan, persekutuan ini kembali harmonis beberapa waktu kemudian (Ota, 2006).

Di era VOC, mulai terlihat ketimpangan sosial dalam masyarakat. Eropa di puncak sebagai penguasa, disusul Cina sebagai mitra dagang istimewa, sementara Bumiputra tersingkir ke posisi paling bawah. Di dalam komunitas Bumiputra sendiri, fragmentasi sosial semakin tajam—pedagang kehilangan ruang gerak, sementara petani semakin tereksplorasi. Persaingan ekonomi menjadi tidak setara, dan mobilitas sosial kelompok lokal semakin terbatas di bawah sistem yang disusun untuk menguntungkan kelompok asing (Raben, 2000).

Perubahan struktur sosial ini juga berdampak kepada petani Bumiputra. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, petani Bumiputra menikmati tingkat keleluasaan tertentu dalam mengelola lahan pertanian. Dua bentuk kepemilikan lahan yang umum kala itu adalah kepemilikan pribadi dan komunal. Petani yang memiliki hak guna lahan secara pribadi dikenal sebagai sikep, yakni individu yang memperoleh hak atas tanah dari raja atau priayi setelah membuka suatu wilayah pemukiman. Sebagai imbalannya, mereka membayar upeti kepada raja sebesar sepertiga hingga setengah dari hasil panen, serta menyediakan tenaga kerja untuk kerja bakti pada pejabat yang lebih tinggi dalam hierarki kekuasaan (Onghokham, 2008, hlm. 8–9 & 153).

Namun, posisi sikep tidak sepenuhnya subordinatif. Mereka memiliki ruang negosiasi melalui mobilitas spasial—dapat berpindah ke wilayah lain jika beban upeti dianggap memberatkan. Relasi dengan buruh tani atau numpang, yang hidup di atas tanah milik sikep, juga bersifat relatif fleksibel. Buruh tani bisa memilih sikep lain yang dianggap lebih ringan bebannya. Dengan demikian, sistem sosial pertanian pra-kolonial, meskipun hierarkis, mengandung unsur timbal balik dan resistensi yang

membuatnya tidak sepenuhnya otoriter (Kahin, 2013, hlm. 2; Onghokham, 2018, hlm. 158 & 167; Wahyono, 2017, hlm. 303).

Situasi ini berubah drastis ketika VOC memanfaatkan sistem feodal lokal untuk kepentingan ekspansi komersialnya. VOC tidak menghapus struktur kekuasaan lokal, melainkan menyusunnya ulang dalam kepentingan kolonial. Priayi dan bangsawan dijadikan agen kolonial yang bertugas memobilisasi tenaga dan hasil panen petani demi mendukung perdagangan ekspor VOC. Di bawah kendali VOC, kewajiban upeti yang sebelumnya bersifat normatif berubah menjadi beban eksploitatif yang melampaui ketentuan resmi. Petani sering kali dipaksa menyerahkan lebih dari separuh hasil panennya dan diwajibkan bekerja dalam proyek non-pertanian (Itawan, 2023, hlm. 158; Kahin, 2013, hlm. 4–7).

Dominasi VOC membuat petani kehilangan alat negosiasi yang sebelumnya mereka miliki. Dukungan militer VOC kepada bangsawan dan priayi menghilangkan kemampuan petani untuk menuntut hak mereka. Dalam konteks ini, muncul fragmentasi baru dalam struktur sosial internal Bumiputra, di mana bangsawan dan priayi—meskipun kehilangan peran dominan di sektor perniagaan—justru memperkuat kuasa politik mereka di tingkat desa dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Mereka tetap memungut hasil panen dari petani meskipun setoran kepada VOC telah terpenuhi, demi membiayai ritual, gaya hidup, dan kebutuhan konsumtif lainnya (Kahin, 2013, hlm. 6–8).

Sementara petani Bumiputra makin terpinggirkan, pejabat VOC menikmati hasil eksploitasi tersebut. Pada abad ke-18, gaya hidup pejabat VOC berubah drastis dari kesederhanaan menjadi kemewahan. Mereka membangun rumah besar dan mengonsumsi barang mewah sebagai simbol status. Konsumerisme ini mendorong praktik korupsi yang sistemik di dalam tubuh VOC, dari gubernur jenderal hingga juru tulis, yang mencari penghasilan tambahan melalui penyalahgunaan wewenang (Kroef, 1948, hlm. 123). Pada akhirnya, praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat VOC menjadi salah satu penyebab kebangkrutan perusahaan ini. Pada 1 Januari 1800, Republik Batavia secara resmi mengambil alih utang, harta, dan kekuasaan VOC atas Hindia Belanda (Kroef, 1948, hlm. 134).

Upaya Perubahan di Era Daendels dan Raffles yang tidak Berhasil

Transformasi dalam struktur kekuasaan kolonial terjadi setelah Belanda berada di bawah kendali Prancis pada 1806. Pembentukan Kerajaan Belanda di bawah Louis Bonaparte membawa dampak langsung ke Hindia Belanda, terutama melalui penunjukan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Jawa pada 1808. Dalam upaya modernisasi administratif, Daendels secara sistematis mengurangi otonomi politik dan hak-hak istimewa kaum bangsawan dan priayi. Mereka direduksi menjadi aparat negara bergaji yang tunduk pada otoritas pusat, bukan lagi sebagai penguasa wilayah dengan kekuasaan patrimonial. Ini merupakan awal dari integrasi elite lokal ke dalam struktur kolonial sebagai *functionarissen* (pejabat negara), yang menandai pergeseran dari kekuasaan feodal ke model birokrasi kolonial yang lebih rasional dan terpusat (Sutherland, 1983, hlm. 37).

Reformasi ini mengikis basis kekuasaan tradisional bangsawan—baik politik maupun ekonomi—dan menempatkan mereka dalam kerangka baru sebagai bagian dari birokrasi kolonial. Identitas mereka mengalami reklasifikasi: dari penguasa lokal yang semi-otonom menjadi priayi kolonial. Priayi kolonial ini tidak hanya terdiri dari keturunan bangsawan tetapi juga elite birokrasi pribumi non-bangsawan yang berhasil menjadi priayi karena sistem meritokrasi. Namun, transformasi

ini bersifat parsial karena status sosial dan latar belakang keluarga tetap menjadi penentu dalam rekrutmen birokrasi, memperlihatkan bahwa struktur sosial lama tetap membatasi transisi ke birokrasi meritokratis (Carey, 2011, hlm. 302 & 305; Pratama, 2024, hlm. 14).

Kebijakan reformasi birokrasi dilanjutkan dan diperluas oleh Thomas Stamford Raffles setelah Inggris mengambil alih Jawa pada 1811. Raffles berupaya menciptakan hubungan langsung antara negara kolonial dan petani melalui penghapusan kerja rodi dan sistem penyerahan hasil paksa. Sebagai gantinya, ia memperkenalkan *land rent system*, di mana pemerintah kolonial menjadi pemilik tanah formal dan petani diwajibkan membayar sewa berdasarkan nilai produksi. Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat agraris yang rasional dan bebas dari dominasi elite lokal, seperti dalam model agraria Inggris dan India (Iswahyudi, 2021, hlm. 6672).

Namun, idealisme Raffles berbenturan dengan realitas sosial dan geografis Jawa yang kompleks. Pemerintah kolonial Inggris pada saat itu tidak memiliki birokrasi yang cukup kuat maupun data yang akurat untuk menerapkan sistem sewa tanah secara menyeluruh. Tidak ada pemetaan agraria yang sistematis, dan pengetahuan tentang struktur kepemilikan serta penguasaan tanah di tingkat desa sangat terbatas. Akibatnya, meskipun secara prinsip Raffles ingin menyingkirkan peran para priayi, dalam praktiknya ia tetap harus bergantung pada mereka. Para elite lokal masih memegang kendali atas informasi penting terkait batas-batas tanah, kesuburan lahan, serta struktur sosial desa (Wahid, 2021, hlm. 33).

Meskipun terdapat sedikit perubahan, tidak terjadi perubahan signifikan dalam struktur masyarakat di periode ini. Orang Eropa masih menempati puncak hierarki, disusul dengan Orang Cina, dan Bumiputra. Di internal Bumiputra sendiri, priayi tetap menjadi aktor yang dapat dengan leluasa menggunakan pengaruhnya untuk menekan para petani. Petani yang diharapkan menjadi agen ekonomi yang mandiri justru semakin tereksklusi karena beban sewa, fluktuasi harga, dan ketidakpastian panen.

Krisis Keuangan dan Penguatan Struktur Feodal dalam Sistem Tanam Paksa

Krisis keuangan yang melanda pemerintah kolonial pasca-gagalnya ekspedisi militer melawan Belgia dan meningkatnya perlawanan rakyat di Nusantara memaksa pemerintah Hindia Belanda mengambil langkah drastis. Di tengah dilema antara membuka keran liberalisasi ekonomi atau menghidupkan kembali sistem monopoli seperti pada masa VOC, pilihan jatuh pada opsi kedua. Untuk menjamin efektivitas monopoli tersebut, pemerintah kolonial memperkuat kembali peran elite tradisional, khususnya kaum priayi lokal (Kahin, 2013, hlm. 11).

Bupati, sebagai figur sentral dalam struktur pemerintahan lokal, diposisikan kembali sebagai ningrat dengan hak-hak istimewa yang sebelumnya sempat dikurangi. Mereka kembali diberi wewenang mewariskan jabatan, memungut hasil panen, dan mengelola wilayah administratif secara semi-otonom. Strategi ini bukan hanya menandai kemunduran dari proyek rasionalisasi birokrasi Daendels, tetapi juga memperkuat kembali struktur kekuasaan patrimonial di tingkat lokal (Kahin, 2013, hlm. 15; Sutherland, 1983).

Restorasi kekuasaan priayi ini menciptakan hubungan patronase yang lebih erat antara elite lokal dan pemerintah kolonial. Para bupati menjadi agen kolonial yang loyal karena merasa berhutang budi. Kepala desa pun menunjukkan kecenderungan serupa. Mereka lebih mengabdikan kepada negara dan atasan birokratisnya ketimbang kepada komunitasnya sendiri. Negara kolonial tidak lagi sekadar

menaklukkan elite lokal, tetapi juga melibatkan priayi dalam proyek eksploitasi ekonomi melalui sistem tanam paksa (Kahin, 2013, hlm. 15; Zanden & Marks, 2010, hlm. 97).

Priayi mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tanaman ekspor yang ditanam oleh petani, sementara pegawai sipil Eropa seperti residen, asisten residen, dan *controleur*—menerima komisi dari hasil panen ekspor, suatu pendapatan di luar gaji tetap mereka. Dengan demikian, struktur kolonial menciptakan persekutuan ekonomi lintas ras antara elite Eropa dan elite lokal. (Hellwig, 2007, hlm. 14; Zanden & Marks, 2010, hlm. 98).

Orang-orang Cina juga mendapatkan peran strategis dalam sistem tanam paksa, terutama dalam sektor industri gula. Pemerintah kolonial memberikan mereka akses kredit untuk membangun pabrik, menjamin suplai tenaga kerja, dan memastikan petani menanam tebu di lahan terbaik. Gula yang diproduksi oleh orang Cina ini nantinya dibeli oleh pemerintah dengan harga yang tetap. Dengan skema ini, posisi orang Cina tidak hanya berhasil menjadi pedagang perantara tetapi juga sosok kapitalis pemilik gula (Zanden & Marks, 2010, hlm. 98).

Meskipun berada pada posisi bawah, sebagian kecil petani Bumiputra sempat merasakan dampak positif dari sistem tanam paksa, terutama pada 1830-an. Peningkatan harga komoditas di pasar global memberi mereka pendapatan tambahan dari penjualan hasil pertanian. Ketersediaan beras juga relatif cukup, bahkan terkadang mencapai surplus sehingga kelebihanannya bisa dijual. Indikator kesejahteraan seperti kemampuan membayar pajak dan konsumsi barang manufaktur pun meningkat. Penduduk tak bertanah turut terlibat dalam ekonomi baru ini, baik sebagai buruh pabrik gula maupun pedagang kecil (Fernando, 1998, hlm. 149–152; Padmo, 1998, hlm. 173–174).

Namun, fenomena ini bersifat sementara dan terbatas secara geografis. Memasuki 1840-an, keuntungan yang didapatkan petani berkurang. *Pertama*, harga komoditas menurun drastis di pasar internasional. Hal yang pada gilirannya menggerus pendapatan petani (Zanden & Marks, 2010, hlm. 108–109). *Kedua*, kebijakan pembayaran berbasis produksi pabrik, bukan volume atau jumlah pasokan yang disetorkan oleh petani, sehingga menciptakan celah untuk mengakali petani. Bahkan, banyak petani tidak menerima bayaran sama sekali karena rendahnya hasil produksi pabrik (Furnivall, 2009, hlm. 146–147; Hellwig, 2007, hlm. 14).

Di balik kewajiban menanam tanaman ekspor, petani pemilik tanah di Jawa juga menghadapi tanggungan lain. Selain harus menyerahkan sebagian hasil tanam mereka kepada pemerintah kolonial, mereka juga diwajibkan membayar sewa tanah (*landrente*) serta menjalani kerja rodi yang tidak hanya untuk pemerintah pusat, tetapi juga untuk aparat lokal seperti kepala desa dan pejabat daerah. Tugas yang dibebankan meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung, layanan pos, penjagaan desa, hingga tugas administratif lainnya. Dengan demikian, status sebagai pemilik tanah bukannya menjadi bentuk jaminan kesejahteraan, melainkan justru menjadi dasar legal bagi negara kolonial untuk membebani mereka secara lebih berat dibandingkan mereka yang tidak memiliki tanah (Hermawati, 2013, hlm. 65).

Meskipun penduduk tak bertanah juga tidak lepas dari eksploitasi—mereka diwajibkan bekerja di tanah pemerintah selama 66 hari per tahun—beban yang lebih kompleks pada petani pemilik tanah mendorong terjadinya pergeseran kepemilikan tanah. Banyak petani pemilik tanah yang akhirnya memilih untuk menyerahkan tanahnya kepada pemerintah desa demi mengurangi tanggungan kerja dan pajak yang kian menjerat. Akibat dari proses ini, luas tanah komunal (desa) bertambah secara

signifikan selama periode tanam paksa. (Hermawati, 2013, hlm. 65 & 68; Onghokham, 2018, hlm. 154,158, 168–169) Dengan demikian, kondisi petani secara umum pada periode ini tetap menderita.

Struktur sosial pada periode ini juga relatif tidak berubah : Eropa di puncak, diikuti oleh orang Cina, dan Bumiputra, yang mana petani Bumiputra tak bertanah menjadi kelompok yang paling rentan. Struktur ini ditegaskan melalui segregasi rasial yang diterapkan pada tahun 1854. Melalui sistem ini, orang Eropa ditetapkan sebagai puncak hierarki, disusul oleh orang Timur Asing dan Bumiputra (Latif, 2015, hlm. 274). Sebuah hierarki yang mempertegas perbedaan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan hal-hal mendasar lainnya.

Liberalisasi Ekonomi, Pendatang Baru, dan Marginalisasi Masyarakat Hindia

Liberalisasi ekonomi yang dimulai sejak tahun 1870, melalui kebijakan *Agrarische Wet*, menandai pergeseran besar dalam struktur sosial masyarakat kolonial Hindia Belanda. Jika sebelumnya akses terhadap sumber daya ekonomi lebih banyak dimonopoli oleh birokrat kolonial, maka kini terbuka lebar bagi pemodal swasta Eropa yang tidak memiliki afiliasi langsung dengan struktur pemerintahan (Achdian, 2020, hlm. 97). Hal ini melahirkan konfigurasi kekuasaan baru, di mana kelas kapitalis industri mulai menggantikan dominasi pegawai sipil sebagai aktor ekonomi utama.

Kondisi ini turut mendorong arus migrasi orang Eropa dari negeri asal ke Hindia dalam jumlah signifikan. Mereka datang bukan sebagai pejabat kolonial, melainkan sebagai tenaga terampil yang dibutuhkan oleh sektor industri dan perkebunan yang tengah berkembang pesat. Keterbatasan lembaga pendidikan lokal dalam mencetak tenaga kerja industri, serta terbukanya jalur pelayaran melalui Terusan Suez, semakin mempercepat proses ini (Basundoro, 2016, hlm. 98; Bosma, 2007, hlm. 525).

Para pendatang Eropa tersebut kemudian bekerja di industri perkotaan yang menunjang industri perkebunan atau di sektor perkebunan itu sendiri. Mereka mulai menyewa lahan pertanian milik penduduk Bumiputra untuk menanam tebu, yang kemudian ditanam secara bergiliran dengan padi yang biasanya telah dibudidayakan oleh petani Bumiputra pada musim hujan. Dengan menjalin persekutuan dengan kepala desa yang memiliki kendali atas tanah komunal, para pengusaha Eropa memperoleh lahan dan tenaga kerja dengan biaya murah (Wertheim, 1956, hlm. 93). Pada periode ini, pengusaha Eropa berhasil mengendalikan sektor ekonomi utama, terutama di bidang perkebunan. Mereka tidak hanya berperan sebagai pemilik modal, tetapi juga sebagai pengelola dan pengorganisir komoditas pertanian yang diekspor ke Eropa (Blackburn, 2011, hlm. 96; Eng, 1998, hlm. 15; Idi, 2018, hlm. 436).

Namun, munculnya kelas kapitalis baru ini disertai dengan marginalisasi terhadap kelompok Eropa lama, khususnya orang Indo-Eropa dan mantan militer yang telah menetap di Hindia. Jika pada masa sebelumnya mereka masih memiliki ruang dalam struktur ekonomi kolonial, maka kini mereka mulai terpinggirkan karena tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang diprasyaratkan. Oleh sebab itu, para pengusaha swasta lebih memilih merekrut Eropa totok terdidik dari negeri asal ketimbang mempekerjakan mantan militer dan Indo-Eropa yang lahir di tanah jajahan. Khusus untuk orang Indo-Eropa, penolakan ini tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya kualifikasi pendidikan, melainkan juga oleh prasangka rasial yang melekat di kalangan elite Eropa. Bahkan ketika tidak ada pelamar yang memenuhi syarat, pengusaha tetap lebih memilih mendatangkan pekerja dari Eropa daripada mempekerjakan Indo-Eropa yang setara secara pendidikan. Namun, tidak lantas kemiskinan orang

Indo-Eropa dimulai pada periode ini, pada awal abad ke-19, orang Indo-Eropa sudah banyak yang miskin. Hanya saja marginalisasi Indo-Eropa pasca tahun 1870 menjadi sebuah ironi, di saat kelompok ini sudah mulai diperhatikan dan diakui secara resmi menjadi kelompok Eropa. (“*De Inlandsche Kinderen en handenarbeid.*,” 1880; Mansvelt, 1932, hlm. 292; Nirwandhono, 2011; Ress, 1902, hlm. 9).

Liberalisasi ekonomi yang diberlakukan pada akhir abad ke-19 tidak hanya memperlebar jurang sosial di internal orang Eropa, tetapi juga memperdalam penderitaan kaum petani Bumiputra. Di tengah euforia pertumbuhan kapitalisme agraria, petani lokal justru kehilangan kendali atas tanah mereka sendiri. Untuk memenuhi tuntutan pasar ekspor, mereka terpaksa menyewakan lahan kepada pengusaha Eropa, yang memanfaatkannya untuk menanam komoditas ekspor, seperti tebu. Kondisi ini mengakibatkan hilangnya ruang produksi pangan lokal, terutama padi, yang sejak masa awal tanam paksa sempat memberikan keuntungan bagi petani. Namun, pada era liberal, kesempatan menanam padi semakin terbatas, sementara pertumbuhan penduduk terus meningkat tanpa diimbangi oleh ketersediaan pangan (Furnivall, 2009, hlm. 227; Wertheim, 1956, hlm. 93).

Ketimpangan akses terhadap peluang ekonomi juga terlihat jelas dalam sektor perdagangan. Meskipun industrialisasi membutuhkan jaringan distribusi hasil-hasil pertanian, penduduk Bumiputra gagal mengisi posisi sebagai pedagang perantara. Kekosongan ini justru diisi oleh orang Cina yang telah lebih dahulu memiliki pengalaman dalam perdagangan serta jaringan bisnis dengan pihak Eropa. Dengan modal dan pengetahuan ekonomi yang kuat, orang Cina mengambil alih peran strategis dalam rantai distribusi hasil pertanian, menjauhkan penduduk Bumiputra dari kemungkinan mobilitas sosial (Daliman, 2012, hlm. 49; Kahin, 2013, hlm. 30).

Dominasi orang Cina di sektor perdagangan diperkuat oleh faktor sejarah kolonial yang telah lama meminggirkan logika ekonomi petani. Sejak masa VOC dan tanam paksa, petani hanya dilibatkan sebagai produsen komoditas ekspor tanpa diajarkan bagaimana terlibat dalam perdagangan bebas. Akibatnya, mereka terputus dari dinamika pasar dan tidak memiliki kemampuan bersaing dengan pedagang Cina yang lebih mapan. Hilangnya insting ekonomi ini merupakan dampak panjang dari kebijakan kolonial yang menempatkan petani Bumiputra hanya sebagai obyek produksi, bukan sebagai subjek ekonomi yang otonom (Furnivall, 2009, hlm. 47–48; Kahin, 2013, hlm. 16).

Keterpinggiran ekonomi ini beriringan dengan segregasi spasial yang mengonstruksi ulang struktur sosial berdasarkan ras dan kelas. Pemerintah kolonial secara sengaja membagi kawasan perkotaan menjadi tiga klaster permukiman yang mencerminkan hierarki sosial rasial: Bumiputra, Timur Asing (seperti Cina dan Arab), dan Eropa. Permukiman Bumiputra ditandai oleh infrastruktur yang buruk, sanitasi rendah, serta minimnya akses terhadap air bersih dan listrik. Sebaliknya, permukiman Timur Asing lebih berkembang, meskipun tidak semodern kawasan Eropa. Sementara itu, kawasan Eropa dilengkapi dengan fasilitas kota modern seperti jalan beraspal, trem listrik, penerangan, dan toko-toko besar milik pengusaha Eropa (Basundoro, 2016, hlm. 78–79; Cobban, 1988, hlm. 281; Frederick, 1983, hlm. 259; Setiawan & Prasetyo, 2023, hlm. 60; Susilowati dkk., 2020, hlm. 172).

Dengan demikian, era liberal bukanlah masa pembebasan bagi penduduk Hindia, melainkan periode konsolidasi ulang kekuasaan kolonial dalam format baru. Struktur sosial yang terbentuk semakin tegas menempatkan Bumiputra sebagai kelompok paling subordinat—tidak hanya dalam

aspek ekonomi, tetapi juga dalam representasi ruang dan sosial. Liberalisasi ekonomi justru memperkuat stratifikasi sosial yang diwariskan oleh rezim sebelumnya, dengan pengusaha Eropa dan orang Cina mengisi posisi dominan dalam sistem sosial dan ekonomi yang semakin hierarkis.

Politik Etis, Elite Baru, dan Tersingkirnya Elite Lama

Penerapan Politik Etis pada tahun 1901 menandai titik balik dalam struktur sosial kolonial Hindia Belanda. Kebijakan ini membuka akses pendidikan Barat bagi penduduk Bumiputra melalui pendirian berbagai sekolah baru pada awal abad ke-20. Akibatnya, jumlah kaum terdidik Bumiputra meningkat tajam dan mulai mengisi posisi-posisi yang sebelumnya dimonopoli oleh orang Eropa. Sebagai contoh, pada tahun 1911, jumlah pegawai negeri (*ambtenaar*) Bumiputra telah mencapai 26.000 orang, jauh melampaui jumlah pegawai negeri Eropa yang hanya 8.000. Jumlah ini melonjak drastis pada 1921 menjadi 128.549 orang Bumiputra, sementara jumlah Eropa hanya bertambah menjadi 20.021 (Firdiyansyah, 2024, hlm. 180).

Krisis ekonomi pada awal 1920-an mempercepat perubahan struktur ini. Biaya tinggi untuk mempekerjakan tenaga kerja Eropa menyebabkan para pengusaha dan pemerintah kolonial lebih memilih tenaga Bumiputra yang terampil dan berpendidikan. Sementara kelompok Bumiputra terdidik berhasil masuk ke sektor-sektor strategis, sebagian orang Indo-Eropa dan Eropa berdarah penuh justru mengalami kemunduran sosial. Banyak dari mereka kehilangan pekerjaan dan jatuh ke dalam kemiskinan. Laporan pemerintah kolonial bahkan mencatat adanya orang Eropa totok yang terpaksa tinggal di markas polisi karena tidak mampu lagi membayar sewa rumah (*“De Werkeloosheid,”* 1922; *“Nederlandsch Indie,”* 1931; Ingleson, 1988, hlm. 926).

Namun, dampak paling besar dari mobilitas vertikal Bumiputra terdidik dirasakan oleh kelompok Indo-Eropa. Mereka berada dalam posisi terjepit: tersisih dari jabatan-jabatan tinggi oleh Eropa totok, dan dari pekerjaan menengah-bawah oleh Bumiputra yang kini mengisi sektor tersebut. Keterbatasan akses pendidikan membuat orang Indo sulit bersaing, terlebih karena mereka tidak lagi mendapat preferensi dalam kebijakan kolonial. Jika pada akhir abad ke-19 mereka tergeser oleh Eropa totok, maka pada abad ke-20 mereka tergeser oleh kaum Bumiputra yang baru terdidik (*“Arme Europeanen,”* 1936; Baay, 2010, hlm. 193).

Pendidikan menjadi kunci utama dalam struktur sosial baru ini. Semakin tinggi pendidikan seseorang, semakin tinggi pula peluangnya untuk menempati posisi penting dan memperoleh gaji besar (Soekiman, 2014, hlm. 41). Reformasi birokrasi pada tahun 1913 mengubah syarat pengangkatan bupati dan pejabat tinggi lainnya, dari yang semula berbasis keturunan bangsawan menjadi berbasis kapabilitas dan latar belakang pendidikan (Zanden & Marks, 2010, hlm. 155). Meskipun keturunan bangsawan tetap diutamakan, orang-orang non-bangsawan terdidik mulai memperoleh peluang untuk masuk ke dalam lingkaran kekuasaan administratif.

Konsekuensinya, para bangsawan yang sebelumnya menikmati hak istimewa secara turun-temurun mulai kehilangan prestise dan kekuasaan ekonomi mereka. Jika pada masa tanam paksa mereka adalah pilar penting dalam sistem kolonial, maka pada era ini mereka mulai tersisih oleh elite baru yang lahir dari sistem pendidikan kolonial meskipun mayoritas kaum terdidik ini anak dari kalangan priayi kelas menengah atas. Hanya di wilayah seperti Yogyakarta dan Surakarta, status sosial mereka tetap dihormati secara luas (Kuntowijoyo, 2007, hlm. 83 & 85).

Perubahan struktur sosial tidak hanya terjadi dalam birokrasi, tetapi juga dalam ekonomi urban. Penduduk Bumiputra yang memiliki modal mulai memainkan peran aktif dalam sektor perdagangan dan manufaktur, terutama di kota-kota besar. Ekonomi perkotaan tumbuh pesat, menggantikan desa sebagai pusat kegiatan ekonomi. Gelombang urbanisasi pun terjadi, penduduk desa bermigrasi ke kota untuk mencari peluang hidup yang lebih baik (Husain, 2020; Kuntowijoyo, 2007, hlm. 83).

Dalam proses ini, sejumlah penduduk Bumiputra—baik migran maupun penduduk kota lama—berhasil naik kelas sosial dengan menjadi pengusaha. Mereka aktif dalam industri tekstil dan rokok, dua sektor ekonomi yang berkembang pesat pada masa itu. Pabrik-pabrik tekstil Bumiputra muncul di kota-kota seperti Bandung, Kediri, Tulungagung, Surakarta, Yogyakarta, serta sepanjang jalur Pantura seperti Tegal, Semarang, Surabaya, dan Gresik. Sementara industri rokok Bumiputra yang paling menonjol berpusat di Kudus. Para pelaku usaha ini, bersama kalangan cendekia, pegawai pemerintah, dan pekerja swasta, membentuk kelas menengah baru di kawasan urban kolonial (Kuntowijoyo, 2007, hlm. 84–85).

Seiring meningkatnya jumlah Bumiputra yang berhasil menempati posisi strategis di pemerintahan dan sektor swasta, ketimpangan antar sesama Bumiputra pun melebar. Mereka yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan, modal, maupun keterampilan tetap terjebak dalam kemiskinan struktural. Migrasi ke kota yang dilakukan dengan harapan memperoleh penghidupan yang lebih baik justru seringkali membawa sebagian besar dari mereka ke dalam kondisi marjinal—tinggal di kolong jembatan, menghuni permukiman kumuh, dan hidup dari pekerjaan informal yang tidak menentu (Basundoro, 2012).

Dengan demikian, orang Bumiputra yang mampu menggeser posisi orang Eropa adalah mereka yang terdidik atau yang awalnya memang berasal dari kelas menengah, bukan Bumiputra tak terdidik dari kelas bawah. Menurut Wertheim (1956), keberhasilan segelintir orang Bumiputra dalam memperoleh kestabilan ekonomi melalui pendidikan dan perdagangan tidak mencerminkan perbaikan kondisi struktural secara menyeluruh. Justru, mayoritas Bumiputra tetap terpinggirkan secara ekonomi. Mereka yang telah menjadi pedagang menengah juga tetap rentan tergeser oleh pengusaha asing yang memiliki keunggulan modal dan jaringan perdagangan.

Ketimpangan ini juga diperkuat oleh dominasi Cina atas hasil pertanian. Di pedesaan, penguasaan ekonomi oleh pedagang Cina menyebabkan semakin menyempitnya akses Bumiputra terhadap lahan dan kesempatan kerja, yang kemudian memicu pengangguran dan pemiskinan (Furnivall, 2009, hlm. 428; Kahin, 2013, hlm. 24). Namun, dinamika sosial ini tidak hanya berdampak pada Bumiputra. Pada awal abad ke-20, sebagian orang Cina juga mengalami kemunduran signifikan. Mereka kehilangan hak istimewa dalam sistem *opiumpacht* ketika pemerintah kolonial menerapkan *Opiumregie* pada 1908. Penghapusan monopoli lisensi opium tersebut tidak hanya menghentikan pemasukan utama pakter Cina, tetapi juga meruntuhkan bisnis-bisnis tambahan seperti toko, peminjaman uang, dan usaha lainnya di pedesaan. Banyak pakter akhirnya jatuh miskin dan tidak dapat kembali ke posisi ekonomi mereka sebelumnya (Wahid, 2021, hlm. 158 & 180).

Dengan demikian, kelompok orang miskin sebenarnya tidak hanya orang Bumiputra tetapi juga orang Cina, Indo-Eropa dan orang Eropa berdarah penuh. Mereka banyak yang terjebak dalam pengangguran. Tenaga kerja yang berlebih itu juga tidak mampu ditampung oleh sektor industri yang

sedang bertumbuh. Hal tersebut dikarenakan akumulasi kapital justru terjadi di negeri induk, bukan di koloni. Akibatnya, industrialisasi hanya berkembang dalam ruang ekonomi yang sangat terbatas. Para pemilik modal kolonial lebih memilih berinvestasi dalam sektor yang lebih menguntungkan seperti perkebunan, pertambangan, jasa, dan transportasi daripada mendirikan industri pengolahan hasil pertanian di koloni, karena hal tersebut dianggap dapat mengganggu keuntungan dari ekspor bahan mentah ke Eropa (Bulkin, 1985).

Sementara itu, kelompok sosial yang tergolong sejahtera adalah mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan dan sumber ekonomi. Menurut Kuntowijoyo (2007). para pengusaha besar, pejabat kolonial seperti gubernur jenderal, pedagang skala menengah, kaum terdidik, dan pemilik lahan pertanian luas di pedesaan merupakan golongan yang memperoleh pendapatan cukup besar dan dapat hidup layak. Namun, bagi penduduk—baik Bumiputra, Cina, Indo-Eropa, maupun Eropa totok—yang tidak memiliki modal, pendidikan, atau keterampilan, mereka terperangkap dalam jerat pengangguran dan kemiskinan (Furnivall, 2009, hlm. 228). Bahkan, dalam konteks krisis ekonomi global pada tahun 1930, latar belakang pendidikan pun tidak selalu menjamin peluang kerja yang sepadan.

Dengan latar belakang tersebut, jelas bahwa ketimpangan sosial di Hindia Belanda pada awal abad ke-20 tidak hanya didasarkan pada perbedaan rasial, melainkan semakin dipertajam oleh diferensiasi kelas sosial internal di masing-masing kelompok etnis. Struktur kolonial, yang semula membelah masyarakat secara rasial, kini juga membentuk hierarki baru berdasarkan akses terhadap pendidikan, keterampilan, dan modal (Wertheim, 1947, hlm. 294–295).

Kesimpulan

Perubahan sosial-ekonomi masyarakat kolonial di Jawa antara abad ke-17 hingga awal abad ke-20 merupakan proses yang kompleks, tidak linier, dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan kolonial. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kolonial tidak serta-merta menghasilkan struktur sosial yang statis dan sepenuhnya timpang, tetapi justru menciptakan konfigurasi relasi kuasa yang fluktuatif dan sering kali ambivalen. Setiap kelompok etnis—baik Bumiputra, Cina, maupun Eropa—mengalami naik-turun posisi sosial-ekonominya tergantung pada kemampuan mereka untuk menyesuaikan diri dan berkoalisi dengan kekuasaan kolonial. Orang Cina, misalnya, pada satu masa mendapat keistimewaan sebagai mitra strategis VOC, tetapi pada masa politik etis sebagian di antara mereka justru kehilangan sumber penghidupan akibat pencabutan konsesi opium. Demikian pula dengan orang Indo-Eropa dan Eropa berdarah penuh yang tidak lagi memiliki akses terhadap posisi birokrasi dan pekerjaan tertentu karena kalah saing, tidak memiliki pendidikan yang baik, dan adanya perubahan prioritas kebijakan pemerintah. Di sisi lain, sebagian Bumiputra yang memperoleh pendidikan kolonial mampu naik ke kelas menengah dan mengambil peran penting dalam sektor pemerintahan dan ekonomi. Namun, mayoritas penduduk Bumiputra tetap terpinggirkan akibat terbatasnya akses terhadap sumber daya seperti pendidikan, modal, dan tanah. Dengan demikian, kolonialisme menciptakan struktur sosial yang tidak sepenuhnya tertutup bagi mobilitas, tetapi hanya memberikan peluang terbatas bagi mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya kekuasaan dan pengetahuan. Studi ini menegaskan pentingnya pendekatan jangka panjang dan komparatif dalam memahami perubahan sosial masyarakat kolonial yang bersifat dinamis, berlapis, dan terikat pada konteks historis kekuasaan.

Referensi

- Achdian, A. (2020). Politik Air Bersih: Kota Kolonial, Wabah, dan Politik Warga Kota. *Jurnal Sejarah*, 3(1), 98–104.
- Arimi, S. (2008). Pergeseran Kekuasaan Bangsawan Jawa Indonesia: Sebuah Analisis Wacana Kritis. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 10(2), 1–22.
- Arme Europeanen. (1936, Agustus 26). *De locomotief*.
- Baay, R. (2010). *Nyai & Pergundikan di HIndia Belanda*. Komunitas Bambu.
- Basundoro, P. (2012). Ringkasan Disertasi: Rakyat Miskin dan Perebutan Ruang Kota di Surabaya tahun 1900-1960-an. *Masyarakat Indonesia*, 38(2), 427–457.
- Basundoro, P. (2016). *Pengantar Sejarah Kota*. Ombak.
- Blackburn, S. (2011). *Jakarta: Sejarah 400 tahun*. Komunitas Bambu.
- Bosma, U. (2007). The Cultivation System (1830-1870) and Its Private Entrepreneurs on Colonial Java. *Journal of Southeast Asian Studies*, 38(2), 275–291.
- Bulkin, F. (1985). Nasib Publik dalam sebuah Republik. *Prisma*, No.8.
- Burger, D. H. (1962). *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia* (3 ed.). Pradnjaparamita.
- Carey, P. (2011). Revolutionary Europe and the Destruction of Java's Old Order, 1808-1830. *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/historia.v12i2.12107>
- Cobban, J. L. (1988). Kampung and Conflict in Colonial Semarang. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 266–291. <https://doi.org/10.1017/S0022463400000564>
- Daliman, A. (2012). *Sejarah Indonesia Abad IX - Awal Abad XX*. Ombak.
- De Inlandsche Kinderen en handenarbeid. (1880, Mei 18). *De locomotief*.
- De Werkeloosheid. (1922, April 9). *Archipel-Post*.
- Eng, P. van der. (1998). Economic benefits from colonial assets: The case of the Netherlands and Indonesia 1870-1958. *Economic benefits from colonial assets*.
- Fernando, M. R. (1998). Pertumbuhan kegiatan non-pertanian Pribumi di Jawa, 1820-1880. Dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. LP3ES.
- Firdiyansyah, M. M. (2024). Hegemoni Pendidikan Kolonial dan Munculnya Amtenaar Bumiputra Di Jawa (1900–1932). *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.17509/historia.v7i2.73863>
- Frederick, W. H. (1983). Hidden Change in Late Colonial Urban Society in Indonesia. *Journal of Southeast Asian Studies*, 14(2), 354–371. <https://doi.org/10.1017/S0022463400011012>
- Furnivall, J. S. (2009). *Hindia Belanda: Studi tentang Ekonomi Majemuk*. Freedom Institute.
- Hellwig, T. (2007). *Citra Kaum Perempuan di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia.
- Hermawati, M. (2013). Tanam Paksa sebagai Tindakan Eksploitasi. *Avatara: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1), 64–70.
- Husain, S. B. (2017). *Sejarah Masyarakat Islam Indonesia*. Airlangga University Press.
- Husain, S. B. (2020). *Banjir di Kota Surabaya paruh Kedua Abad ke-20*. Ombak.
- Idi, A. (2018). The Political Ethnicity of the Dutch Colonialism towards the Islamic Sultanates in Indonesia: The Socio-Historical Perspectives. *The Journal of Social Sciences Research*, 4(12), 432–439.
- Ingleson, J. (1988). Urban Java during the Depression. *Journal of Southeast Asian Studies*, 19(2), 292–309.

- Iswahyudi. (2021). - Raffles's observations of the arts of visual culture in Java during his reign in 1811-1816: -. *International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, 8(10), Article 10. <https://doi.org/10.18535/ijsshi/v8i10.08>
- Itawan, D. (2023). Colonialism and Climate Crisis: The Root of Environmental Changes and the Rise of Environmental Awareness in Indonesia. *Indonesian Historical Studies*, 6(2), 192–205. <https://doi.org/10.14710/ihis.v6i2.16037>
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Kartodirdjo, S. (1987). *Pengantar Sejarah Indonesia Baru 1500-1900 dari Emporium sampai Imperium*. Ombak.
- Kroef, J. M. V. D. (1948). The Decline and Fall of the Dutch East India Company. *The Historian*, 10(2), 118–134. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6563.1948.tb00452.x>
- Kuntowijoyo. (2007). *Paradigma Islam: Interpretasi untuk aksi*. Tiara Wacana.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Latif, Y. (2015). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (5 ed.). Gramedia.
- Mansvelt, W. M. F. (1932). *De Positie der Indo-Europeanen*. G. Kolff & Co.
- Müller-Merbach, H. (2006). Heraclitus: Philosophy of change, a challenge for knowledge management? *Knowledge Management Research & Practice*, 4(2), 170–171. <https://doi.org/10.1057/palgrave.kmrp.8500094>
- Nederlandsch Indie. (1931, Januari 17). *De Gooi- en Eemlander*.
- Nirwandhono, P. (2011). *yang ter(di)lupakan: Kaum Indo dan Benih Nasionalisme Indonesia*. Penerbit Djaman Baroe.
- Nurmalasyari, N., Wulandari, N., & Putri, W. A. (2024). Transformasi Masyarakat Indonesia pada Masa penjajahan Bangsa Barat. *SEMAR : Jurnal Sosial Dan Pengabdian Masyarakat*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.59966/semar.v2i4.1317>
- Onghokham. (2008). Perubahan Sosial di Madiun selama Abad XIX : Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Penguasaan Tanah. Dalam *Dua Abad Pemilikan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*. Yayasan Obor Indonesia.
- Onghokham. (2018). *Madiun dalam kemelut Sejarah: Priyai dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Ota, A. (2006). *Changes of Regime And Social Dynamics in West Java: Society, State And the Outer World of Banten, 1750-1830*. BRILL.
- Padmo, S. (1998). Perkembangan Kesempatan Kerja non-pertanian di Keresidenan Cirebon, 1830-1930. Dalam *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. LP3ES.
- Pratama, Y. (2024). The Role of Herman Willem Daendels in Politics in the Dutch East Indies 1808-1811. *SWARNADWIPA*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.24127/sd.v8i1.3278>
- Purwanto, B. (2003). Ekonomi Masa Kolonial. Dalam *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam* (2 ed.). Ihtiar Baru van Hoeve.
- Purwanto, B. (2004). Mereka yang Terlupakan oleh Historiografi Indonesia: Sebuah Catatan Pengantar. Dalam *Mereka*. Syarikat.
- Raben, R. (2000). Round about Batavia: Ethnicity and Authority in the Ommelanden, 1650-1800. Dalam *Jakarta: Socio-cultural Essays*. KITLV Press.
- Ress, D. F. W. van. (1902). *Het pauperisme onder de Europeanen in Nederlandsch-Indië: Eerste gedeelte*. Landsdrukkerij.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia Since C.1200* (4 ed.). Palgrave Macmillan.

- Robinson, R. (2012). *Soeharato dan Bangkitnya Kapitalisme Indonesia* (Harsutejo, Penerj.). Komunitas Bambu.
- Sahasrad, H. (2019). Colonial Structure, Chinese Minority and Racial Violence in Indonesia: A Social Reflection. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal) : Humanities and Social Sciences*, 2(2), 209–221. <https://doi.org/10.33258/birci.v2i2.253>
- Setiawan, Y., & Prasetyo, Y. (2023). Kehidupan sosial budaya etnis Tionghoa di Sidoarjo pada masa kolonial. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya, dan Pengajarannya*, 17(1), Article 1. <https://doi.org/10.17977/um020v17i12023p56-65>
- Soekiman, D. (2014). *Kebudayaan Indies: Dari Zaman Kompeni sampai Revolusi*. Komunitas Bambu.
- Susilowati, D. T., Rochwulaningsih, Y., & Rinardi, H. (2020). The Implementation of the Kampung Improvement Program in Semarang: Some Obstacles and Impacts. *Indonesian Historical Studies*, 4(2), 170–185. <https://doi.org/10.14710/ihis.v4i2.8951>
- Sutherland, H. (1983). *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi* (Sunarto, Penerj.). Sinar Harapan.
- Wahid, A. (2021). *Politik Perpajakan Kolonial di Indonesia: Antara Eksploitasi dan Resistensi*. Gadjah Mada University Press.
- Wahyono, E. (2017, November 18). *Stratifikasi Sosial pada Masyarakat Pedesaan di Jawa Abad ke-19*. Seminar Nasional Riset Inovatif, Bali.
- Wertheim, W. F. (1947). The Indo-European Problem in Indonesia. *Pacific Affairs*, 20(3), 290–298. <https://doi.org/10.2307/2752163>
- Wertheim, W. F. (1956). *Indonesian Society in Transition: A Study of Social Change*. Van Hoeve.
- Zanden, J. L. van, & Marks, D. (2010). *Ekonomi Indonesia 1800-2010: Antara Drama dan Keajaiban Pertumbuhan* (A. Wahid, Penerj.). Kompas.

DEKONSTRUKSI CERITA PERTUNJUKAN DAMARWULAN-MINAK JINGGO DI KABUPATEN BANYUWANGI

Miskawi¹, Maulana Yusuf Arrasuly²,Warto³,

¹Universitas PGRI Banyuwangi, ²Universitas Ibnu Chaldun , ³Universitas Sebelas Maret, ,
miskawihistory@gmail.com

Abstract

The Damarwulan-Minak Jinggo story originates from Langendriyan art and developed in Banyuwangi, depicting the conflict between Damarwulan and Minak Jinggo. This study aims to examine the origins, transformations, and impacts of this performance in a political and cultural context, using historical methods with a deconstruction approach from Derrida. Discussion in its history, this story was used by the Mataram Sultanate to build political legitimacy by depicting Minak Jinggo as rebels, while the Dutch adapted the narrative to stigmatize the Blambangan community. Deconstruction of the Damarwulan-Minak Jinggo story strengthens local identity and makes art a means of resistance to the dominant narrative. The conclusion is that Minakjinggo became a local hero in Banyuwangi. Depicting a culture that is developing and relevant to the values of the local community. This approach teaches history as a result of the interaction of text, power, and society, and fosters a critical attitude in students to see various narratives without getting caught up in one version of the truth.

Keywords: Deconstruction; Damarwulan; Minak Jinggo; History Learning

Pendahuluan

Sejarah dan kebudayaan masyarakat Indonesia, khususnya yang terkait dengan cerita rakyat, seringkali dipenuhi dengan narasi yang berkembang dalam masyarakat, mencerminkan peran berbagai kekuatan politik dan sosial pada masanya. Salah satu contoh penting dari narasi tersebut adalah kisah Damarwulan-Minak Jinggo, yang berasal dari Serat Damarwulan, yang tidak hanya mengandung unsur heroik, tetapi juga berkaitan dengan perjuangan politik dan identitas suatu wilayah. Kisah ini berlatar belakang Kerajaan Majapahit dan menggambarkan konflik antara Damarwulan dan Minak Jinggo, di mana Minakjinggo digambarkan sebagai seorang pemberontak yang terhubung dengan wilayah Blambangan (Ekawati, 1992).

Kisah ini, meskipun dimulai sebagai sebuah cerita rakyat, telah diproduksi ulang dan dipengaruhi oleh berbagai elemen politik dan budaya yang lebih besar, seperti Kesultanan Mataram dan kolonialisme Belanda. Sebagai contoh, Kesultanan Mataram menggunakan cerita ini untuk membangun narasi politik kebudayaannya, dengan menggambarkan Minak Jinggo sebagai tokoh yang merusak, yang menggambarkan Blambangan sebagai wilayah pemberontak. Ini berhubungan erat dengan upaya Mataram untuk memperkuat legitimasi politiknya sebagai penerus kejayaan Majapahit. Damarwulan dan Minak Jinggo terasa seperti nyata (Kompas, com. 2016).

Lebih jauh lagi, kolonialisme Belanda turut andil dalam membentuk cara cerita ini dipersepsikan. Pada tahun 1930, Belanda memanfaatkan pertunjukan Damarwulan-Minak Jinggo sebagai alat untuk mengendalikan identitas politik masyarakat Blambangan. Dengan memanfaatkan cerita ini, Belanda mengkonstruksi narasi yang menggambarkan Blambangan sebagai wilayah pemberontak, yang dipimpin oleh Minak Jinggo yang penuh dengan kekerasan dan keserakahan. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana kebijakan kolonial seringkali mengubah dan mengadaptasi cerita rakyat untuk memperkuat kontrol mereka atas wilayah-wilayah jajahan.

Dalam konteks ini, penting untuk menggali bagaimana Blambangan, yang seringkali diposisikan sebagai wilayah terbelakang atau pemberontak dalam narasi Mataram dan kolonial, memiliki cerita yang berbeda mengenai Minak Jinggo. Masyarakat Banyuwangi, sebagai bagian dari wilayah Blambangan, menganggap Minak Jinggo bukan sebagai raja yang jahat, tetapi sebagai tokoh kesatria yang gagah dan berani. Narasi ini mencerminkan pentingnya transformasi budaya dan dekonstruksi terhadap narasi dominan yang telah lama mengakar dalam masyarakat, baik dari sisi Mataram maupun Belanda.

Melalui pendekatan dekonstruksi Derrida (1967), mempersoalkan makna yang sudah mapan dalam teks-teks sejarah ini dan mencari kebenaran yang lebih utuh mengenai tokoh-tokoh dalam cerita tersebut. Hal ini juga membuka ruang bagi transformasi cerita, dari pemberontak menjadi kesatria, yang lebih inklusif dan relevan dengan nilai-nilai modern. Dengan demikian, proses ini tidak hanya mengungkapkan dinamika politik yang ada, tetapi juga menyadarkan kita akan pentingnya memperlakukan cerita-cerita sejarah sebagai entitas hidup yang bisa berkembang seiring dengan perubahan zaman, tanpa kehilangan akar budaya dan identitas lokal.

Narasi historis ini penting untuk dipahami sebagai pijakan untuk memasuki pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana Kesultanan Mataram memanfaatkan simbolisme Blambangan dalam konstruksi narasi politik kebudayaannya, serta bagaimana Belanda mengadaptasi cerita tersebut sebagai bagian dari rekayasa kebijakan kultural di masa kolonial.

Penelitian ini mengadopsi metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Menurut Collingwood (1946), heuristik adalah proses pengumpulan sumber-sumber yang relevan, seperti buku, jurnal, dan wawancara dengan narasumber berkompeten. Tahap kritik, baik eksternal maupun internal, bertujuan untuk mengevaluasi keaslian dan kesesuaian sumber yang dikumpulkan (Norton, 2000). Interpretasi dilakukan untuk menggali makna lebih dalam dari teks sejarah, sementara historiografi menganalisis cara sejarah ditulis dan diterima oleh masyarakat (Carr, 1961). Pendekatan Derrida (1967) digunakan untuk membaca teks sejarah secara kritis dan mendekonstruksi narasi dominan, dengan tujuan menemukan kebenaran yang lebih utuh dan membuka kemungkinan narasi alternatif. Pendekatan ini menekankan pentingnya mempertanyakan struktur teks dan mengungkap perspektif yang tersembunyi dalam historiografi.

Pembahasan

Asal usul Pertunjukan Damarwulan-Minak Jinggo

Serat Damarwulan diciptakan oleh para pujangga Mataram karena terinspirasi oleh Perang Paregreg yang terjadi pada jaman kerajaan Majapahit. Dengan harapan kekisruhan yang terjadi di Kerajaan Mataram pada waktu itu tidak berakhir seperti Perang Paregreg. Penciptaan Serat Damarwulan sebagai legitimasi politik Mataram yang mengaku bahwa raja-raja Mataram adalah keturunan raja-

raja Majapahit. Tidak ada bukti konkrit pemberian stigma kepada pihak tertentu diciptakannya Serat Damarwulan, yang ada adalah penafsiran-penafsiran dari para penerima cerita Serat Damarwulan baik dalam bentuk wayang, Langendriyan dan pertunjukan dramatari Damarwulan. Ketika sampai kepada penerima cerita, cerita dalam Serat Damarwulan itu cenderung memberikan stigma, karena dalam cerita itu ditampilkan tokoh-tokoh antagonis dan protagonis yang merujuk wilayah tertentu, yaitu Blambangan

Pementasan Damarwulan awalnya berasal dari kesenian Langendriyan salah satu bentuk opera tari Jawa. Surakarta dan Yogyakarta adalah tempat bertumbuh suburnya berbagai seni dan budaya dan sebagai pusat kebudayaan Jawa. Dalam pementasannya drama tari Jawa menggunakan dialog puisi berupa tembang macapat. Dialog yang menggunakan tembang macapat, sajian vokalnya disebut *palaran*. Selain menggunakan tembang macapat juga menggunakan bentuk tembang *gedhe* dan tembang *tengahan* (Muljono, tanpa tahun).

Pada mulanya kesenian Langendriyan berkembang di Yogyakarta dan Surakarta (Mangkunagaran). Di Yogyakarta Langendriyan lahir pada tahun 1876 yang diciptakan oleh K.G.P.A Mangkubumi atas gagasan K.R.T Purwadiningrat semasa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubawana VI (1855-1877). Langendriyan Yogyakarta berawal dari kebiasaan Macapatan yang dilakukan pada saat bulan Ramadhan. Karena pada bulan Ramadhan kegiatan karawitan dihentikan sementara untuk menghormati orang yang menjalankan ibadah puasa. Sebagai bahan Macapatan tersebut, K.R.T Purwadiningrat memilih serat Damarwulan karena tokoh-tokoh utamanya sangat menarik. Langendriyan Yogyakarta ditarikan oleh penari laki-laki karena pada waktu itu menjadi hal yang tabu jika seorang wanita menari kecuali tari Bedaya dan Serimpi. Penari laki-laki itu menari dengan *jongkok* atau *laku dhodhok* dan dipertunjukkan di luar tembok keraton (Widyastutiningrum, 2006).

Serat atau naskah Damarwulan yang tertua menurut Brandes adalah naskah yang disalin oleh Roorda van Eysinga dalam "Handboek voor Land-enVolkenkunde" yang diketahui berangka tahun 1748 masehi (sebagai tahun penyalinannya). Tahun 1748 merupakan masa pemerintahan Pakubuwana II (1725-1749) (Timoer, 1980). Pakubuwana II merupakan satu dari dua Raja Surakarta yang dianggap sebagai pujangga besar (Margana, 2004).

Margana (2012) juga mengatakan bahwa Brandes dan slamet Mulyana berpendapat kisah Damarwulan dan Minakjinggo mendapatkan inspirasi dari perang paregreg (1404-1406) setelah Prabu hayam wuruk lengser. Penulis serat Damarwulan adalah sastrawan Mataram yang mengkisahkan perang Bree Wirabumi (Minakjinggo) raja Blambangan dan Wikrawardhana dan Dewi Suhita (Raja Majapahit).

Langendriyan Mangkunagaran diciptakan pada tahun 1881 oleh R.M.H Tandhacusuma yang diprakarsai oleh Godlieb seorang pengusaha batik di Surakarta. Lahirnya kesenian Langendriyan Mangkunagaran dilatarbelakangi oleh kebiasaan nembang macapat yang dilakukan oleh para Wanita pembatik (yang bekerja di rumah Godlieb) untuk mengatasi kejenuhan saat sedang melakukan pekerjaannya. Dari situlah Godlieb ingin membuat sebuah kesenian dari kebiasaan para pekerjanya itu. Maka Godlieb meminta kepada R.M.H Tandhacusuma untuk merealisasikannya. Langendriyan Mangkunagaran ditarikan oleh penari wanita yang kemudian disebut sebagai Langendriyan Mandraswara. Mandraswara berarti suara yang indah. Dengan demikian Langendriyan Mandraswara bisa dimaknai sebagai pertunjukan hiburan dengan suara yang indah (Widyastutiningrum, 2006).

Setelah R.M.H Tandhacusuma berhasil menciptakan kesenian Langendriyan Mandraswara, usaha batik Godlieb mengalami kemunduran sehingga Godlieb bangkrut dan Langendriyan Mandraswara terbengkalai. Atas usul R.M.H Tandhacusuma dan ijin dari Mangkunagara IV kesenian Langendriyan Mandraswara dikembangkan di keraton Mangkunagaran. Langendriyan Mandraswara

terus mengalami perbaikan dan pengembangan bentuk penyajiannya. Pada masa Mangkunagara V disusun tari dengan tokoh Minakjinggo, Damarwulan dan Dayun. Pertunjukan ini terkenal dengan nama Langendriyan Telu.

Langendriyan Mandaraswara mengalami perkembangan pesat pada masa pemerintahan Mangkunagaran VII (1916-1944). Dibentuk abdi dalem khusus sebagai pendukung kegiatan tari dan karawitan terutama Langendriyan. Selain itu Langendriyan Mandraswara diperankan oleh tujuh orang pemain yang kemudian dikenal dengan sebutan Langendriyan Pitu. Tujuh orang tersebut memerankan tokoh Damarwulan, Minak Jinggo, Dayun, Sabdapalon, Nayagenggong, Dewi Wahita dan Dewi Puyengan. Selain itu juga dilakukan penyempurnaan terhadap gerak tari dan busana yang menjadi khas Mangkunagaran. Lakon yang diperankan pada waktu itu antara lain Damarwulan Ngarit, Ronggolawe Gugur, Minakjinggo Lena dan pernikahan Ratu Ayu dengan Damarwulan. Cerita ini kemudian menjadi begitu populer di kalangan masyarakat Jawa Tengah. Menurut Nurullita, H. (2015) bahwa tersebarnya cerita ini dikarenakan, isi cerita yang bagus dan menjadi hiburan bagi masyarakat. Dalam hal ini, isi cerita Serat Damarwulan sangat menarik cerita ini menyebar ke berbagai daerah dan disalin oleh penulis-penulis lokal maupun Barat.

Naskah Damarwulan diperkirakan dibawa ke Banyuwangi oleh seorang Bupati Banyuwangi yang berasal dari Surakarta. Winarsih Partaningrat Arifin menyebutkan dalam Babad Blambangan ada seorang bernama Arya Suganda anak dari Mangkunegara IV. Arya Suganda menggantikan Bupati Banyuwangi sebelumnya yaitu Pringgakusuma (Arifin, WP. 1995). Keterangan tentang nama Arya Suganda juga terdapat dalam laporan Pigeaud dalam sebuah Catatan-catatan Mengenai Sudut Timur Jawa (Pigeaud, 1932; Alih Bahasa Pitoyo Boedhy Setiawan, 1932). Pada tahun 1881 R.T Pringgokusoema diganti oleh Arya Suganda yaitu keturunan terkenal dari Mangkoenagara, seorang putra Mangkoenagara ke IV yang kemudian menjadi Bupati di Pasuruan. Namun, nama Arya Suganda tidak lagi disebut hanya dinamakan dengan sebutan "Putra Surakarta Wahyu" yang berarti Pangeran terkenal dari Surakarta tanpa sebutan tambahan mengenai asal-usulnya (Nurullita, H. 2015).

Pigeaud (1938) menyebutkan pada tahun 1930 di kabupaten Banyuwangi tepatnya di daerah Rogojampi terdapat kesenian yang menampilkan cerita Damarwulan dan merupakan tiruan dari cerita rakyat sebelumnya yang menampilkan cerita Ande-ande Lumut. Ande-ande Lumut adalah pertunjukan yang pada waktu itu sudah populer di daerah Jawa Tengah dan biasanya dimainkan oleh masyarakat di daerah pesisir dan Jawa Tengah bagian selatan. Penduduk yang sengaja didatangkan Belanda dari luar Banyuwangi dengan tujuan awal mencari tenaga kerja untuk membangun Banyuwangi secara tidak langsung juga membawa budayanya ke tempat yang baru. Tidak menutup kemungkinan bahwa Damarwulan adalah kesenian dari daerah Jawa Tengah yang dibawa oleh para migran karena cerita yang dibawakan memiliki kesamaan latar tempat. Kemudian kesenian ini berakulturasi dengan kesenian Jawa, Banyuwangi dan Bali sehingga menghasilkan Janger seperti yang dikenal di Banyuwangi sekarang.

Semakin banyak cerita Damarwulan yang diproduksi ulang, semakin banyak pula tercipta beragam versi tentang cerita ini dan dimitoskan oleh masyarakat setempat sebagai penerima cerita. Begitu pula dengan masyarakat Banyuwangi yang menerima cerita ini dari orang Mataram sehingga gambaran tentang Minakjinggo seperti yang digambarkan orang Mataram. Dalam perkembangannya, Pada 30 Agustus 1930 pemerintah kolonial Belanda yang diwakilkan kepada Wedana Banyuwangi semakin gencar memainkan cerita Damarwulan (Majapahit) dan Minak Jinggo (Raja Blambangan). Minakjinggo yang merupakan pemberontak buruk rupa namun sakti mandraguna (Suhalik, 2009; Aksoro, 2013).

Dari seluruh kisah Damarwulan yang diciptakan, yang paling populer adalah bab tentang kemenangan Damarwulan melawan pemberontak Minak Jinggo di Blambangan. Minak Jinggo adalah raja kerajaan Blambangan yang sakti mandraguna. Oleh karena kesaktian yang dimiliki, Minakjinggo mampu menguasai kerajaan-kerajaan di tanah Jawa. Namun sayang, Minakjinggo mempunyai wajah yang rusak, tangan cekot dan kaki pincang sebagai akibat dari perkelahiannya melawan Macuwet pada saat Minak Jinggo merebut Kerajaan Blambangan dari tangan Macuwet yang sebenarnya adalah ayah kandungnya sendiri (Aksoro, 2003; Labberton, 1905; Ekawati, 1992).

Mengkritisi Dibalik Pertunjukan Damarwulan-Minak Jingo

Asal-usul pertunjukan Damarwulan-Minak Jinggo mengandung sejumlah persoalan yang perlu dikaji ulang secara kritis. Pertama, diperlukan analisis mendalam mengenai keterkaitan naratif antara cerita Damarwulan–Minak Jinggo dengan konteks politik dan budaya Kesultanan Mataram, khususnya di wilayah Surakarta. Kedua, penting untuk menelaah bagaimana pemerintah kolonial Belanda pada dekade 1930-an semakin intensif mempromosikan dan mengorkestrasi pementasan kesenian Damarwulan–Minak Jinggo sebagai bagian dari strategi kultural tertentu. Untuk mengkritisi dibalik narasi dan pertunjukan Damarwulan-Minak Jingo penting terlebih dahulu menelaah, pertama: konteks historis Kerajaan Blambangan sebagai latar terpenting dalam struktur cerita tersebut. Kedua motivasi Kesultanan Mataram dan ketiga, kepentingan politik kolonial Belanda dalam mengkonstruksi dan memanfaatkan narasi kesenian tersebut.

Pertama, Konteks Historis Kerajaan Blambangan. Asal-usul penamaan Blambangan menunjukkan adanya pluralitas tafsir historis dan filologis yang menggambarkan kompleksitas identitas wilayah ini sepanjang zaman. Berdasarkan bukti epigrafis dari sebuah prasasti tembaga tanpa angka tahun yang diperkirakan berasal dari masa pemerintahan Prabu Jayanegara (sekitar tahun 1316 M), nama wilayah ini tertulis sebagai Malambangan. Selanjutnya, dalam *Negarakertagama* karya Prapanca dari abad ke-14, nama tersebut mengalami perubahan menjadi Balumbungan. Kesaksian serupa muncul dalam naskah *Bujangga Manik* dari abad ke-15 yang juga menyebutnya Balumbungan, sementara catatan Tome Pires dalam *Suma Oriental* (abad ke-16) menyebutnya sebagai Bulambuan. Pada abad ke-17, Pangeran Arya Bajah Binarong kembali mengadopsi bentuk Balumbungan dalam narasi lokalnya.

Nama Balambangan disebut dalam berbagai karya sastra dan historiografi seperti karya-karya Pujangga Purwasastra (1773/1774), *Serat Centhini* (1800–1823), catatan Thomas Stamford Raffles (1812), dan tulisan G.J.B. Biegan (1894). Adapun varian Belambangan digunakan oleh J.J. Stokdate (1811), *Temunggungan Surahadinegara* (1818–1820), serta Tumenggung Notodiningrat (1912–1919). Nama lain seperti Blangbangan dijumpai dalam karya Patih Kertajaya (1767–1804), *Wiralaksana* (1826/1827), serta dalam naskah *Babad Mas Sepuh* yang tidak diketahui penulisnya.

Penulis Inggris William Thorn (1815) mencatat nama Balambuag, sementara J.L.A. Brandes, seorang ahli Belanda, menyebut Blambang(han) dalam kajiannya, meskipun pihak kolonial Belanda sendiri tidak pernah memiliki nomenklatur yang konsisten untuk wilayah ini. Dalam *Daghregister*, Belanda menggunakan istilah yang bervariasi seperti Balamboangan, Belamboangan(han), Baliboangh, dan Balamboan. Keseragaman mulai tampak ketika W.L. Olthof, melalui terjemahan *Babad Tanah Jawi* (1941), mengadopsi nama Blambangan, yang kemudian menjadi penyebutan dominan hingga saat ini. Tafsir etimologis mengenai asal-usul nama Blambangan juga berkembang. Atmosudirjo (1952) mengemukakan bahwa kata Balambangan berasal dari gabungan kata bala (orang) dan mbang (batas), mengindikasikan wilayah perbatasan. Brandes (1894) menambahkan bahwa istilah Balamboangan(han) berasal dari dialek Osing, yang dilafalkan sebagai Balambjangan atau

Balamwangan. P.J. Veth juga menegaskan makna Blambangan sebagai “perbatasan”, yang dikaitkan dengan istilah wong pinggir (orang pinggiran).

Sementara itu, Tan Boen Swie (T.B.S) dalam novelnya *Digdaja* yang dimuat dalam majalah sastra *Penghidoean*, mengajukan hipotesis menarik bahwa komunitas tiyang pinggir atau wong pinggir yang hidup di Surakarta dan Yogyakarta berasal dari ujung timur Pulau Jawa, yakni rakyat Blambangan yang dikenal sakti (*digdaja*) (Sudjana, I Made, 2001; Lekkerkerker, 1923; Graaff, H.J., 1949). Imaji Blambangan sebagai tanah air wong digjaya masih terus bertahan dan menjadi bagian dari ingatan kolektif masyarakat hingga masa kini (Margana, 2012). Narasi mengenai awal mula kekuasaan di Blambangan dapat dijumpai dalam Babad Blambangan, yang menyebut Menak Sopal sebagai raja pertama di wilayah tersebut. Namun demikian, catatan historis mengenai sosok Menak Sopal dan periode pemerintahannya masih sangat terbatas dan belum dapat diverifikasi melalui sumber-sumber sezaman yang lebih dapat dipertanggungjawabkan secara historiografis (Arifin, 1995). Ini menunjukkan bahwa narasi dalam babad lebih bersifat simbolik atau genealogi lokal daripada kronik sejarah yang faktual.

Informasi yang lebih substansial mengenai integrasi Blambangan ke dalam struktur kekuasaan Jawa ditemukan dalam *Serat Pararaton*. Naskah ini mencatat bahwa pada masa pemerintahan Raja Kalagemet atau Jayanegara (1309–1328 M), wilayah kekuasaan Majapahit mulai meluas ke sebelah timur Pulau Jawa. Ekspansi tersebut meliputi wilayah Lumajang dan Blambangan, yang kemudian diserahkan kepada Bhre Wirabumi sebagai penguasa wilayah. Bhre Wirabumi sendiri merupakan paman atau saudara laki-laki dari Tribhuwana Wijayatunggadewi, ibu dari Hayam Wuruk, raja terbesar dalam sejarah Majapahit.

Menurut Suhalik (2020), Blambangan dan Kerajaan Majapahit memiliki hubungan yang tercatat dalam prasasti Butak. Prasasti ini mengungkapkan adanya perjanjian pembagian wilayah administratif antara Raden Wijaya, pendiri Majapahit, dan Arya Wiraraja, yang mencakup Lumajang utara, Lumajang selatan, dan Tigang Juru, yang kemudian dikenal sebagai Blambangan. Nama Blambangan secara resmi muncul setelah prasasti Gunung Lamongan atau prasasti Jayanegara I tahun 1316, yang menyatakan: (1) penarikan kembali wilayah yang dipinjamkan kepada Arya Wiraraja setelah pemberontakan Arya Nambi pada 1316; (2) penetapan Marlambangan sebagai daerah swatantra (Pemerintahan sendiri/otonomi).

Menurut Racharto, T (2023) Blambangan sebagai berstatus sebagai desa yang kuat dengan penguasanya “arya”, Swatantra dengan penguasanya “para rama”, kemudian Vasal Blambangan penguasanya pertama “Menteri atau raja Bawahan” Sri Bima Chili Kepakisan, Bukan sebagai trah raja-raja Kerajaan Majapahit, langkah bijaksana yang diambil atas peran Tri Bhuwana Tungadewi (Ketika masih hidup), Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sebagai strategi jawa bagian timur dan bali sendiri. Meperkokoh persatuan Nusantara dan keagamaan. Setelah pendirian Kerajaan Blambangan berakibat meluasnya ke desa-desa yang lain. Wilayah puger, panarukan bahkan Lumajang berada dibawah pengaruhnya.

Keterangan ini mengindikasikan bahwa Blambangan, jauh dari menjadi wilayah yang memberontak atau melakukan resistensi terhadap pusat kekuasaan Majapahit, justru menunjukkan loyalitas tinggi terhadap Dinasti Rajasa sejak masa penobatan Raden Wijaya (1294 M). Kesetiaan ini dibuktikan pula dalam catatan bahwa hingga tahun 1359 M, pejabat tinggi dari Blambangan bahkan dianggap sebagai salah satu tokoh kepercayaan raja (Margana, 2012). Keterlibatan Bhre Wirabumi dalam ekspedisi militer bersama Hayam Wuruk pada periode 1359–1389 untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain di Jawa, memperkuat asumsi tentang relasi strategis dan saling percaya antara Blambangan dan pusat kekuasaan Majapahit. Racharto, T (2023) Blambangan setelah hayam wuruh

meninggal tetap memberikan Kesetiannya tidak memasuki kanca pertikaian keluarga untuk perebutan tahta kerajaan Majapahit.

Setelah wafatnya Hayam Wuruk pada tahun 1389, tahta Kerajaan Majapahit tidak diwariskan kepada putri mahkota (Kusumawardhani), melainkan kepada Wikramawardhana (menantu, putranya dari seorang selir). Wikramawardhana dinobatkan sebagai Raja Majapahit berikutnya. Breh Wengker mertua dan juga paman Hayam wuruk, wali atau ayah angkat Breh Wirabumi beranggapan bahwa breh wirabumi putra laki-laki hayam wuruk lebih memiliki hak tahta Kerajaan Majapahit dari pada Wikrawardhana. Keputusan ini memicu ketegangan internal, karena Bhre Wirabumi, yang juga merupakan bagian dari keluarga kerajaan dan memiliki kedekatan darah dengan permaisuri, merasa memiliki legitimasi yang lebih kuat untuk menduduki singgasana (Brandes, J.L.A, 1920).

Berbagai upaya musyawarah sudah dilakukan namun mengalami jalan buntu, maka Breh Wengker mengambil Prakarsa bukan dengan cara (kudeta) atau menggulingkan raja yang sedang berkuasa, namun memilih melepaskan diri dari induknya yang berkedudukan di Pamotan sebagai wujud adanya kekuasaan yang baru (Kedaulatan terpisah), mengangkat dirinya sebagai Bhatara ring Pamotan sebagai bentuk fasilitasi untuk Breh Wirabumi sebagai kedaton wetan, Kusumardhani dan Wikrawardhana di posisikan sebagai Kedaton Kulon (Racharto, 2023). Pada tahun 1382 M, Breh Wirabumi mengirimkan hadiah-hadiah persembahan kepada kaisar China yang kemudian disambut dengan penghormatan balasan (C. Lekkerkerker, 1923). Ketegangan ini memuncak dalam konflik terbuka antara Wikramawardhana dan Bhre Wirabumi yang dikenal dalam historiografi Jawa sebagai Perang Paregreg (1404–1406). Pada tahun 1351 C (1429 M), Wikramawardhana digantikan oleh putrinya yang bernama Suhita. Candi Sawentar II didirikan selama masa pemerintahannya, yang berlangsung hingga tahun 1369 C (1447 M). Berdasarkan Pararaton, Suhita merupakan anak kedua dari Bhra Hyang Wisesa (Wikramawardhana), dengan kemungkinan ibunya adalah putri Bhre Wirabumi. Hal ini menunjukkan bahwa Suhita mungkin dilantik sebagai raja untuk meredakan perselisihan antara keluarga Wikramawardhana dan keluarga Wirabumi (Krom, 1931; Soekmono, 1961; Djafar, 1978). Di antara banyak tokoh yang terlibat dalam persengketaan tersebut, Bhra Narapati menjadi salah satu yang paling mencuri perhatian. Meskipun prasasti dan kitab Pararaton hanya sedikit menyebutkan namanya, Bhra Narapati ternyata memiliki peran penting dalam perang Paregreg, karena dia berhasil membunuh Bhre Wirabumi. Sumber lainnya tentang bhra Narapati ditemukan di dalam kitab Nagarakrtagama pupuh 12. Jabatan yang dipegangnya sebagai Patih Daha dan Angabhaya, serta gelar Bhra, menunjukkan bahwa dia berasal dari keluarga kerajaan. Peperangan itu berakhir dengan kekalahan Bhre Wirabumi, yang dipenggal kepalanya dan diserahkan kepada Ratu Majapahit (Suroso, 1985).

Sumber lain yang menyebut tentang peperangan dapat ditemukan di dalam berita Cina yang menyebutkan tentang peperangan antara keraton Barat dan keraton Timur. Peperangan ini berakhir dengan kekalahan di pihak keraton timur serta rajanya ikut terbunuh. Bahkan dapat diketahui pada saat terjadi perang itu, sekitar 170 orang Cina tewas. Akan tetapi sayang di dalam keterangan ini tidak disinggung sedikitpun mengenai tokoh bhra Narapati. (Groeneveldt: 1880). Berdasarkan analisis sumber di atas bahwa: pertama, rakyat Blambangan yang dikenal sakti (digdaja) Kedua, Sebagai desa yang kuat, swatantra (Pemerintahan sendiri/otonomi). Ketiga, hubungan Majapahit dan Blambangan sangat baik. Konstelasi ini menunjukkan bahwa Blambangan tidak hanya berperan sebagai wilayah satelit, melainkan sebagai mitra politik dan militer penting dalam sistem kekuasaan Majapahit. Dalam konteks inilah kemudian muncul konstruksi naratif tentang kesetiaan dan kesaktian tokoh-tokoh dari Blambangan dalam berbagai lakon tradisional Jawa, termasuk dalam kisah Damarwulan–Minak Jinggo, yang merepresentasikan dinamika kekuasaan dan loyalitas politik antara pusat dan daerah. keempat,

Perang paregreg bukan perang Majapahit dengan Blambangan. Perebutan tahta ini bukan perebutan wilayah melainkan tentang siapa yang berhak atas tahta Kerajaan Majapahit.

Kedua, Salah satu naskah Serat Damarwulan tertua yang diteliti oleh J.L.A. Brandes berangka tahun 1748 Masehi, yang menunjukkan waktu penyalinan naskah tersebut. Tahun ini bertepatan dengan masa pemerintahan Pakubuwana II (1725–1749), raja Dinasti Mataram Islam yang dikenal sebagai pelindung para pujangga keraton. Periode ini juga menandai dinamika perkembangan kebudayaan Jawa, terutama dalam bentuk sastra dan pertunjukan istana. Di masa inilah kesenian Langendriyan mulai tumbuh, khususnya di lingkungan Keraton Yogyakarta dan berkembang sepanjang abad ke-18 hingga ke-19 di bawah patronase Sultan Hamengkubuwana IV dan V. Langendriyan adalah seni pertunjukan semi-opera yang memadukan tari, tembang, dan lakon pewayangan, dirancang untuk menyaingi popularitas wayang orang gaya Surakarta. Pura Mangkunegaran di Surakarta kemudian turut mengadopsi dan mengembangkan seni ini sebagai bagian dari dinamika kebudayaan istana. Di antara lakon-lakon yang dipentaskan, kisah Damarwulan dan Minakjinggo menjadi salah satu cerita yang sangat populer dan meluas dalam budaya tutur masyarakat Jawa.

Kisah Damarwulan diduga mengambil inspirasi dari peristiwa sejarah Perang Paregreg yang berlangsung pada tahun 1404–1406, setelah wafatnya Prabu Hayam Wuruk dari Majapahit. Dalam kisah tersebut, Damarwulan adalah tokoh protagonis yang ditugaskan oleh Ratu Majapahit bernama Kencanawungu (nama lain dari Ratu Suhita) untuk mengalahkan Minakjinggo, raja Blambangan yang menolak tunduk pada kedaulatan Majapahit. Narasi ini menggambarkan Minakjinggo sebagai penguasa ambisius yang ingin menikahi sang ratu, namun ditolak. Damarwulan kemudian membunuhnya dan membawa kepalanya sebagai bukti kemenangan. Ratu pun menikah dengan Damarwulan dan mengangkatnya sebagai raja. Kisah ini, meskipun populer, mengandung sejumlah distorsi historis. Dalam kenyataannya, sosok Bhre Wirabhumi, penguasa Kedaton Timur Majapahit yang terbunuh dalam Perang Paregreg, kerap diidentifikasi oleh Brandes (1894) sebagai figur yang diadaptasi menjadi Minakjinggo dalam cerita rakyat. Oleh karena itu, tampak jelas bahwa kisah ini merupakan bentuk alegori dari konflik politik Majapahit yang disajikan dalam bentuk roman atau epos dramatik.

Secara faktual, baik Damarwulan maupun Minakjinggo adalah tokoh fiktif atau legenda yang hidup dalam tradisi sastra dan lisan masyarakat Jawa. Damarwulan diposisikan sebagai pahlawan ideal yang mewakili nilai keberanian dan kesetiaan, sementara Minakjinggo merepresentasikan kekuatan tandingan yang dianggap subversif. Uniknya, sosok Minakjinggo dalam berbagai naskah babad juga digunakan untuk merujuk pada tokoh sejarah nyata, yaitu Prabu Agung Danuningrat, raja terakhir Blambangan yang memerintah pada 1736–1763. Ia dikenal dengan berbagai nama dan gelar, antara lain Pangeran Agung Dupati (dalam Babad Sembar), Mas Noyang atau Danuningrat (Babad Tawangalun), Pangeran Mas Sepuh (Sorosilah Dalem), Pangeran Minakjinggo (Babad Mas Sepuh), dan bahkan sebagai I Dewa Mas Lembur dalam Babad Ratu Mas Wilis. Dalam beberapa sumber Belanda, ia juga disebut Mangkuningrat. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi asimilasi antara tokoh sejarah dan tokoh legenda dalam konstruksi budaya masyarakat Blambangan dan Jawa Timur secara umum.

Ketika naskah Serat Damarwulan disalin antara tahun 1770–1815, kemungkinan besar masyarakat Jawa, khususnya di wilayah Banyuwangi, masih menyimpan memori kuat tentang figur Prabu Danuningrat. Oleh karena itu, penciptaan karakter fiktif Minakjinggo dalam lakon Damarwulan dapat dipahami sebagai bentuk sublimasi ingatan terhadap penguasa Blambangan tersebut. Namun, hal ini juga menimbulkan kekeliruan kronologis. Kisah yang menggambarkan Minakjinggo sebagai musuh Majapahit dalam Perang Paregreg jelas aneh secara historis, sebab Perang Paregreg terjadi pada awal abad ke-15, sedangkan Prabu Jingga baru berkuasa tiga abad kemudian, yakni pada pertengahan abad

ke-18. Dengan kata lain, cerita ini telah mencampuradukkan dua tokoh yang terpisah ratusan tahun, yang jika ditinjau secara kritis, menunjukkan adanya ketidaksesuaian sejarah (anokronisme) yang cukup mencolok.

Kisah Damarwulan kemudian dipentaskan sebagai bagian dari kesenian keraton, termasuk di Pura Mangkunegaran pada masa kekuasaan Adipati Mangkunegara IV, yaitu Raden Mas Sudira, yang memerintah antara 1853 hingga 1881. Pementasan tersebut menandai bagaimana legenda-legenda Jawa, termasuk tokoh fiktif seperti Damarwulan dan Minakjinggo, tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media transmisi nilai-nilai politik, etika kepemimpinan, dan simbol kebudayaan istana. Oleh karena itu, penting bagi studi sejarah dan sastra untuk memilah antara fakta historis dan representasi budaya agar dapat menghasilkan pemahaman yang seimbang dan tidak terjebak pada narasi yang rancu secara kronologi. Gambaran di atas sekaligus dapat menjawab pertanyaan apa yang menjadi motivasi Mataram mengambil naskah pertunjukan Damarwulan dan Minak Jinggo. Subtansi naskah Damarwulan mencerminkan suasana Psikologi-politik sezaman dari Masyarakat di istana Jawa di Surakarta Ketika Roman Damarwulan di tulis. Ini merupakan wujud pemujaan yang berlebihan dari Masyarakat istana Jawa di Surakarta yang menghubungkan diri mereka secara geneologis dengan para pendiri Kerajaan Majapahit.

Saat itu masyarakat istana di Jawa sedang dibayang-bayangi oleh kekuasaan kolonial yang kuku-kukuhnya mencengkram kekuasaan raja-raja Jawa sehingga wibawa Kerajaan Jawa terus menurun. Masyarakat istana memerlukan epitome atau model kerajaan yang agung dan berwibawa yang dapat menyatukan wilayah yang tercerai berai dan mereka menemukan Majapahit sebagai model idealnya. Penggunaan Majapahit melalui epic Damarwulan dimaksudkan untuk mendapatkan inspirasi untuk mengembalikan harga diri bangsawan istana dan Kerajaan Jawa selama berada dibawah kekuasaan Majapahit. Menurut Margana (2012) Setelah keruntuhan Majapahit pada akhir abad ke-15, berbagai negara pengganti, termasuk Mataram dan Blambangan, berusaha mengisi kekosongan kekuasaan dan mengklaim legitimasi atas warisan kejayaan kerajaan tersebut. Blambangan sebagai satu-satunya Kerajaan Hindu di Jawa, mengontrol sebagian besar wilayah ujung timur Pulau Jawa (wilayah ini sekarang terbagi dalam lima kabupaten: Banyuwangi, Jember, Lumajang, Bondowoso dan Situbondo). Hampir selama tiga abad, Blambangan berada diantara dua faksi yang berbeda, Kerajaan Islam Mataram di Barat dan berbagai Kerajaan Hindu di Bali (Gelgel, Buleleng dan Mengwi) di Timur. Kedua kekuatan ini secara simultan memperebutkan Kerajaan Blambangan begitu juga kepentingan kolonial yang ingin menguasai Jawa khususnya Blambangan. Begitu juga Mataram di bawah kepemimpinan Sultan Agung, memosisikan dirinya sebagai penerus sah Majapahit dengan menggabungkan pemerintahan Islam dan budaya Jawa tradisional. Mataram tidak hanya berusaha memperluas wilayahnya melalui penaklukan militer, tetapi juga melalui sintesis budaya yang relevan dengan situasi politik saat itu (Febriyanti, 2024; Prasetya et al., 2024; Handayani et al., 2024).

Pada abad ke-17, Mataram muncul sebagai kekuatan Islam dominan di Jawa, memanfaatkan melemahnya pengaruh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Blambangan. Penaklukan Blambangan pada tahun 1743 menjadi contoh nyata dari strategi militer agresif Mataram, yang tidak hanya memperluas wilayah tetapi juga memperkuat struktur politik Islam di pulau Jawa (Saddhono & Supeni, 2014; Anoeграjekti et al., 2018). Dengan memperkenalkan pemerintahan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, Mataram mengklaim legitimasi kekuasaannya dan memperkenalkan perubahan yang mendalam dalam lanskap politik dan budaya di Jawa (Herho et al., 2023).

Sintesis budaya dan pengaruh Majapahit dalam Mataram sebagai penerus Majapahit, Mataram berusaha menggabungkan budaya Hindu-Buddha dari masa lalu dengan nilai-nilai Islam yang semakin dominan. Sintesis budaya ini melahirkan identitas politik Jawa yang khas, yang

mengintegrasikan elemen-elemen dari kedua tradisi tersebut. Cerita-cerita epik seperti Damarwulan dan Minak Jinggo mencerminkan perjuangan untuk keadilan dan kepahlawanan, yang menggambarkan narasi heroik yang mendalam. Dalam cerita-cerita ini, Mataram menempatkan dirinya sebagai penerus yang sah dari Majapahit dan pengganti penguasa-penguasa sebelumnya yang dianggap tidak sah.

Cerita Damarwulan dan Minak Jinggo berfungsi lebih dari sekadar kisah rakyat; keduanya menggambarkan perjuangan antara kebaikan dan keburukan, antara kepahlawanan dan tirani. Dengan menggunakan tokoh-tokoh ini, Mataram memperkuat legitimasi kekuasaannya dengan menggambarkan penguasa Mataram sebagai pewaris yang sah dari kejayaan Majapahit (Wijaya et al., 2022). Selain itu, Mataram melanjutkan tradisi cerita Panji, yang berasal dari era Majapahit, yang tetap berpengaruh dalam sastra dan seni Jawa, memperlihatkan pengaruh budaya Majapahit yang bertahan dalam berbagai ekspresi budaya Jawa hingga saat ini (Wijaya et al., 2022).

Ketiga, Pada tahun 1930, Pemerintah kolonial Belanda semakin termotivasi untuk merevitalisasi narasi budaya Jawa dan semakin gencar untuk mementaskan kesenian Damarwulan- Minak Jinggo. Revitalisasi ini mencerminkan upaya strategis Belanda untuk memperkuat ide kolonial sebagai pelindung dan penyelenggara kebudayaan Jawa, dan kedua, untuk menggambarkan Belanda sebagai penjaga warisan budaya Jawa (Cahya et al., 2023; Iswahyudi, 2020). kebangkitan cerita rakyat memungkinkan untuk membangun identitas yang menggabungkan kekuasaan kolonial dengan elemen-elemen budaya lokal (Pohan & Izharivan, 2017; Picard, 2008).

Pada 30 Agustus 1930 pemerintah kolonial Belanda yang diwakilkan kepada Wedana Banyuwangi mengundang KARS (Kesenian Agawe Rukun Santoso) untuk pentas di pendopo Kawedanan Banyuwangi dalam rangka memperingati hari ulang tahun Ratu Wilhelmina. KARS menampilkan cerita Bhre Wirabumi Gugat. Dari pementasan itulah Wedana Banyuwangi atas perintah Belanda meminta naskah Bhre Wirabumi Gugat dan melarang KARS mementaskan cerita dalam lontar tersebut karena isi dari lontar itu dianggap melawan pemerintah. Naskah Bhre Wirabumi Gugat menceritakan tentang ketidakterimaan Bhre Wirabumi atas dilantikannya Tribuana Tungga Dewi sebagai Raja Majapahit. Karena Bhre Wirabumi menganggap seorang wanita tidak pantas menjadi Raja. Akhirnya Bhre Wirabumi memberontak dan menyerang Majapahit. Seperti telah dijelaskan diatas, cerita inilah yang tidak boleh ditampilkan dan diganti dengan cerita Minak Jinggo yang gandrung dengan Kenconowungu (Armaya dalam Nurullita, 2015). Pelarangan naskah ini merupakan salah satu usaha Belanda untuk melunturkan kepercayaan Masyarakat Blambangan terhadap pemimpin dan pemerintah yang masih melakukan perlawanan terhadap Belanda.

Sebagai gantinya Wedana Banyuwangi memberikan naskah Damarwulan Ngenger untuk dipentaskan. Naskah tersebut berisikan cerita mulai darileluhur Minak Jinggo sampai dengan Damarwulan Ngenger. Karena KARS hanya diijinkan memainkan cerita Damarwulan, maka orang menyebutnya sebagai kesenian Damarwulan. Pergantian naskah tersebut bertujuan agar masyarakat Blambangan tidak mengenal Wirabumi dan hanya mengetahui bahwa raja Blambangan adalah Minak jinggo yang merupakan pemberontak buruk rupa namun sakti mandraguna (Suhalik, 2009; Aksoro, 2013). Cerita damarwulan dipentaskan dalam kesenian janger di Banyuwangi.

Anoegrajekti menjelaskan dua sudut pandang penempatan tokoh Damarwulan dan Minakjinggo dalam pertunjukan Janger. Dari perspektif Majapahit Damarwulan adalah tokoh protagonis yang diberikan tugas oleh Ratu Majapahit untuk menumpas Minak Jinggo yang mengadakan pemberontakan di kerajaan Blambangan. Di lain pihak, Minakjinggo adalah tokoh antagonis yang melakukan pemberontakan melawan kerajaan Majapahit. Variasi cerita ini terkesan

menyudutkan masyarakat Banyuwangi dan memberikan tuduhan sebagai Masyarakat pemberontak, penentang penguasa dan pengganggu (Anoegrajekti, 2014).

Kepopuleran cerita Damarwulan menjadikan cerita ini banyak ditulis ulang. Penulisan ulang ini banyak dilakukan setelah Perang Jawa (1825- 1830). Alasan penulisan naskah pada masa ini yaitu adanya ketakutan pihak kolonial sebagai akibat dari Perang Jawa yang menyebabkan kerugian besar bagi pihak kolonial. Ini adalah salah satu usaha pihak kolonial dalam menanamkan dan membentuk kebudayaan elit di Jawa yang secara efektif dapat mengontrol penduduk jajahan dan menjauhkan penduduk jajahan dari elemen-elemen Islam yang telah mengilhami perlawanan Perang Jawa (Florida dalam Margana, 2004: 64-65).

Membuka Ruang Transformasi

Cerita Damarwulan–Minak Jinggo merupakan salah satu kisah tradisional Jawa yang telah mengalami berbagai kali produksi ulang. Setiap reproduksi tidak hanya menghasilkan variasi cerita, tetapi juga menciptakan konstruksi baru atas makna dan karakter tokoh-tokohnya. Semakin banyak cerita ini dipentaskan atau dituliskan kembali, semakin banyak pula versi yang berkembang di tengah masyarakat penerima cerita. Di antara versi yang dominan adalah versi Mataram, di mana Minak Jinggo digambarkan sebagai tokoh antagonis: seorang raja Blambangan yang cacat, kejam, melawan kekuasaan Majapahit, dan pada akhirnya tewas secara tragis. Representasi ini kemudian menyebar ke berbagai daerah, termasuk Banyuwangi, yang menjadi wilayah asal tokoh Minak Jinggo menurut tradisi lokal. Sayangnya, narasi yang berkembang dari sudut pandang luar ini justru membentuk stigma negatif terhadap masyarakat Banyuwangi sebagai keturunan “raja jahat”.

Berbeda dengan versi Mataram, masyarakat Banyuwangi memiliki pandangan tersendiri mengenai tokoh Minak Jinggo. Bagi mereka, Minak Jinggo adalah seorang pemimpin yang rupawan, gagah perkasa, dan memiliki sifat kesatria sebagaimana layaknya seorang raja ideal. Ketimpangan representasi ini menjadi dasar munculnya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat Banyuwangi untuk melakukan penolakan terhadap narasi dominan yang dianggap merugikan identitas lokal. Sekitar pertengahan tahun 1970-an, muncul perdebatan yang cukup signifikan mengenai isi cerita Damarwulan–Minakjinggo. Perdebatan ini dipicu oleh keprihatinan atas citra buruk yang dilekatkan pada Banyuwangi melalui figur Minak Jinggo. Didukung oleh kebutuhan akan penguatan identitas lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional, pemerintah daerah setempat, dalam hal ini melalui peran Hasan Ali, seorang budayawan Using yang menjabat sebagai Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemda Dati II Banyuwangi di masa kepemimpinan Bupati Djoko Supaat Slamet (1966–1978), menginisiasi perubahan terhadap cerita tersebut.

Transformasi dilakukan secara menyeluruh, baik dalam penggambaran karakter maupun dalam aspek bahasa dan pentas. Tokoh Minak Jinggo tidak lagi ditampilkan sebagai pemberontak, penindas rakyat, bertubuh cacat, dan berwajah bopeng, yang memiliki istri-istri tidak setia serta berakhir tragis seperti dalam versi ketoprak Mataram. Sebaliknya, ia digambarkan sebagai pahlawan lokal dengan fisik yang elok dan kepribadian yang terpuji. Sebagai bagian dari strategi perlawanan budaya terhadap narasi dominan, dialog dalam pementasan Damarwulan kemudian diubah menggunakan Bahasa Osing, bahasa khas masyarakat Using Banyuwangi. Tujuannya adalah menonjolkan ke-Using-an cerita ini, sekaligus mengklaim cerita tersebut sebagai bagian dari kekayaan budaya lokal.

Upaya ini mendapat dukungan dari para seniman dan budayawan Banyuwangi lainnya. Mereka ikut mengganti naskah dan menampilkan cerita baru sebagai bentuk perlawanan terhadap stigmatisasi. Salah satu contoh nyata dari inisiatif ini adalah pementasan teater Minakjinggo Winisuda, yang menjadikan Minak Jinggo sebagai tokoh sentral. Teater ini dibawa ke berbagai festival seni

nasional dan memperkenalkan Minak Jinggo sebagai raja Blambangan yang heroik. Representasi ini mengakar kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Banyuwangi dan terus direproduksi dalam berbagai bentuk seni visual seperti patung, relief, dan mural Minak Jinggo di ruang-ruang publik. Semua ini menjadi simbol kebanggaan atas identitas lokal yang tidak ingin direduksi oleh pandangan masyarakat luar.

Pada tahun 2019, dalam pagelaran Etno Banyuwangi Carnival (BEC) mengangkat tema “the Kingdom Of Blambangan” dengan menampilkan sosok Minak Jinggo yang selama bertahun-tahun sebagai tokoh antagonis yang sadis. Budayawan Banyuwangi mencoba mendekonstruksi imej Minak Jinggo sebagai tokoh yang buruk rupa, postur tubuh, wajah, suara maupun sifatnya menjadi kesatria, tinggi besar, gagah berani, dan menjadi tokoh lkon dan sebagai pahlawan ,(Historia, 2020). Hal ini juga dikuatkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas bahwa Lewat BEC penonton diajak menyelami sejarah dengan cara yang menyenangkan. Tidak hanya menampilkan pawai kostum saja, tapi juga disertai narasi sejarah dan tradisi lokal yang menambah wawasan. Inilah yang menjadi keunikan dari BEC (<https://jatimnow.com>, 2019).

Representasi Minak Jinggo sebagai raja jahat hanyalah satu dari sekian banyak interpretasi, dan bukan satu-satunya kebenaran. Sebaliknya, versi Banyuwangi menunjukkan bahwa Minak Jinggo dapat dimaknai sebagai simbol kepahlawanan dan perlawanan terhadap dominasi pusat. Perspektif yang beragam ini bukan untuk dipertentangkan, melainkan dapat saling melengkapi dalam memperkaya pemahaman terhadap tokoh Minak Jinggo sesuai dengan konteks sosial dan politik masing-masing.

Narasi tentang Minak Jinggo dapat dialihkan dari tema pertentangan antara pusat dan daerah ke arah penekanan pada nilai-nilai universal seperti keadilan, keberanian, dan penghormatan terhadap keberagaman. Cerita ini dapat dijadikan alat edukatif yang menyuarakan pentingnya memperjuangkan keadilan sosial serta memelihara identitas lokal dalam kerangka kebudayaan nasional. Minak Jinggo, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi tokoh lokal, tetapi juga simbol perjuangan yang kontekstual dengan isu-isu kontemporer.

Dengan demikian, cerita Damarwulan–Minak Jinggo telah berkembang dari sekadar cerita rakyat menjadi ruang naratif yang merepresentasikan konflik identitas, resistensi budaya, dan rekonstruksi sosial. Transformasi cerita ini mencerminkan ketegangan antara narasi pusat dan daerah, serta pentingnya memperlakukan warisan budaya sebagai entitas yang hidup dan dinamis. Reinterpretasi cerita ini tidak hanya memperkuat ikatan sosial masyarakat Banyuwangi, tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk berpikir kritis, kreatif, dan terbuka terhadap perubahan tanpa kehilangan akar budaya mereka.

Konklusi

Cerita Damarwulan-Minak Jinggo telah dimanfaatkan oleh Kesultanan Mataram dan Belanda untuk memperkuat narasi politik mereka. Pendekatan dekonstruksi Derrida membuka ruang untuk membaca ulang teks-teks sejarah, mengungkap makna yang lebih inklusif, serta melihat sejarah sebagai narasi yang dipengaruhi oleh ideologi dan kepentingan tertentu. Dalam konteks ini, cerita Damarwulan-Minak Jinggo diadaptasi di Banyuwangi, di mana karakter Minakjinggo diubah menjadi pahlawan lokal, menciptakan transformasi dari legenda yang lebih relevan dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Ini menunjukkan bahwa budaya lokal bukanlah entitas statis, melainkan dapat berkembang dan beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dalam pendidikan sejarah, pendekatan dekonstruksi ini membuka ruang bagi siswa untuk memahami bahwa sejarah bukanlah suatu narasi tunggal, melainkan

hasil interaksi antara teks, kekuasaan, dan masyarakat. Pembelajaran sejarah yang berlandaskan dekonstruksi dapat menumbuhkan sikap kritis pada generasi muda untuk melihat berbagai narasi sejarah dan budaya lokal tanpa terjebak pada satu versi kebenaran yang sempit.

Referensi

- Aksoro, A. (2003). *Asal-usul Cerita Damarwulan-Minakjinggo Populer di Banyuwangi*. Jejak. Edisi 4 tahun 2003.
- Arifin, WP. (1995). *Babad Blambangan*. Yogyakarta: Bentang Budaya, 1995.
- Anoegrajekti, N., Macaryus, S., Kusumah, M., Izzah, L., & Attas, S. (2018). The oral tradition of petik laut banyuwangi revitalization of tradition and local-global political space. *Kne Social Sciences*, 3(9), 595. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i9.2723>
- Anoegrajekti, N. (2010). *Etnografi Sastra Using: Ruang Negosiasi Dan Pertarungan Identitas*. UNEJ.
- Brandes, J.L.A. (1920). *Pararaton (ken arok) of het boek der koningen van tumapel en van majapahit*. Batavia: 's-Gravenhage.
- Brandes, J.L.A. (1920). *Nagarakertagama. Lofdicht van Prapanntja op koning radjasanagara, hayam wuruk, van madjapahit*. 's-Gravenhage: Nijhof.
- Cahya, D., Kumalasari, D., & Fahri, A. (2023). Variety of indigenous education in the lampung region during the colonization period. *Diakronika*, 23(2), 204-215. <https://doi.org/10.24036/diakronika/vol23-iss2/290>
- Carr, E. H. (1961). *What is History?* London: Macmillan.
- Collingwood, R. G. (1946). *The Idea of History*. Oxford: Oxford University Press.
- Dasuki Noer. (2003). *Upaya Pelestarian dan Pengembangan Teater Rakyat Damarwulan*. Jejak. Edisi 4.
- Derrida, J. (1967). *Of Grammatology*. terj. Gayatri C. Spivak. Baltimore: The John Hopkins University Press.
- Djafar, Hasan. (1978). *Girindrawarddhana Beberapa Masalah Majapahit Akhir*, Jakarta: Yayasan Dana Pendidikan Buddhis Nalanda,.
- Ekawati. (1992). *Serat Damarwulan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan kebudayaan.
- Falk, Gerhard. (2001). *Stigma: How We Treats Outsiders*. New York: Prometheus Books.
- Febriyanti, I. (2024). Peninggalan Kerajaan Majapahit: Candi, Karya Sastra, Prasasti. *Estungkara Jurnal Pengabdian Pendidikan Sejarah*, 3(3), 1-12. <https://doi.org/10.22437/est.v3i3.38511>
- Groeneveldt, W.P. (1880). "Notes on the Malay Archipelago and Malacca Compiled from Chinese Sources", V.B.G. XXXIX, Batavia, Albrecht & Co, 'sGravenhage; Martinus Nijhoff.
- Historia. (2020). Menak Jingga yang Ganteng. <https://historia.id/kultur/articles/menak-jingga-yang-ganteng-PRVJQ>.
- Handayani, M., Malik, M., Yasin, V., & Maulana, M. (2024). Kejayaan Kerajaan Mataram Islam Dan Pengaruhnya Untuk Nusantara Pada Masa Pemerintahan Sultan Agung Tahun 1613-1645 M. *INSANI*, 2(2), 121-138. <https://doi.org/10.70424/insani.v2i2.121-138>
- Herho, S., Herho, K., & Susanto, R. (2023). Did Hydroclimate Conditions Contribute To The Political Dynamics Of Majapahit?: A Preliminary Analysis. *Geographica Pannonica*, 27(3), 199-210. <https://doi.org/10.5937/gp27-44682>
- Iswahyudi, I. (2020). The Implementation Of The Cultuurstelsel In Java: Cases In Afdeeling Demak And Grobogan, Central Java Versus In Afdeeling Pacitan, East Java 1830-1870. *Britain International of Humanities and Social Sciences (Biohs) Journal*, 2(3), 657-668. <https://doi.org/10.33258/biohs.v2i3.316>
- Krom, N. J. (1931). *Hindoe-Javansche Geschiedenis, Tweede herziene druk*, 'sGravenhage: Martinus Nijhoff.
- Lekkerkerker, C. (1923). *Blambangan. De indische Gids, II*. Amsterdam: de Busy.
- Labberton. (1905). *Lajang Damar-Woelan*. Batavia: Boekhandel Visser.
- Margana, S. (2004). *Pujangga Jawa dan Bayang-bayang Kolonial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Nurullita., H.(2015). Stigmatisasi Terhadap Tiga Jenis Seni Pertunjukan Di Banyuwangi: Dari Kreativitas Budaya Ke Politik. *Jurnal Kajian Seni*. Vol.3.No 2. November 2015. Hal 35-51.
- Norton, C. (2000). *The Nature of History*. New York: Routledge.
- Peni Puspito. (1998). *Damarwulan Seni Pertunjukan Rakyat Di Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur Akhir Abad 20*. Tesis. Universitas Gadjah Mada.
- Prasetya, D., Ladiqi, S., & Salleh, M.(2024). Back To The Past: The Roots Of Indonesian Middlepowermanship. *Asian Journal of Comparative Politics*.
<https://doi.org/10.1177/20578911241236518>
- Picard, M. (2008). En Quête De L'identité Balinaise À La Fin De L'époque Coloniale. *Archipel*, 75(1), 27-62. <https://doi.org/10.3406/arch.2008.4080>
- Pohan, H. and Izharivan, Y. (2017). Inside The Indonesian Migration: A Historical Perspective. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 16(2), 145. <https://doi.org/10.28932/jmm.v16i2.385>
- Saddhono, K. and Supeni, S. (2014). The Role Of Dutch Colonialism In The Political Life Of Mataram Dynasty: A Case Study Of The Manuscript Of Babad Tanah Jawi. *Asian Social Science*, 10(15).
<https://doi.org/10.5539/ass.v10n15p1>
- Suhalik. (2020). *Benang Merah Peradaban Blambangan*. Banyuwangi. Banyuwangi PTPN XII
- Soekmono. (1961). *Pengantar Sedjarah Kebudayaan Indonesia, II*, Djakarta: Trikarja.
- Soeroso. 1985. Bhattara Narapati. *Kemdikbud: Berkala Arkeologi*. Vol. 6 No. 2. 5-22.
[10.30883/jba.v6i2.440](https://doi.org/10.30883/jba.v6i2.440)
- Timoer, S. (1980). *Damarwulan Sebuah Lakon Wayang Krucil*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Widyastutiningrum, S.R. (2006). *Langendriyan Mangkunagaran Pembentukan dan Perkembangan Bentuk Sajiannya*. Surakarta: ISI Press.
- Wijaya, Y., Tjahyadi, S., & Yulianto, V. (2022). Paradoxical Aesthetics In Panji Mask Visual Structure: Alusan And Gagahan Profiles In Bobung, Yogyakarta. *Harmonia Journal of Arts Research and Education*, 22(2), 311-325. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v22i2.37093>

URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURALISME DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH JENJANG SMA

Maulana Yusuf Arrasuly¹, Djono²

¹Universitas Ibnu Chaldun, ²Universitas Sebelas Maret
arrasuly72@gmail.com

Abstract

Multiculturalism education in history learning in high school is essential to form a generation that is tolerant and respectful of diversity. This article discusses the urgency of integrating the values of multiculturalism in the learning history, which allows students to understand history from a variety of cultural perspectives. With this approach, students are expected to develop critical thinking skills, empathy, and inclusive attitudes, so that they can contribute to a more harmonious society. The methodology used in this study is a literature review, which is the collection of data and information from various sources, including scientific articles and reference books. A descriptive analysis approach is applied to describe and describe the data that has been collected, without making definitive conclusions. This research also explores the application of technology in history learning to increase students' interest. The results of the study show that multi-year education.

Keywords: Education; Multiculturalism; History Learning

Pendahuluan

Pendidikan multikulturalisme semakin penting dalam pengajaran sejarah di sekolah menengah atas (Amalia et al., 2024). Ini disebabkan oleh kompleksitas masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, budaya, dan agama. Dalam era globalisasi, pemahaman tentang multikulturalisme menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif dan toleran. Oleh karena itu, penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah di SMA. Kebaharuan dalam kajian ini adalah untuk membentuk generasi yang menghargai perbedaan, menghormati keragaman, dan mampu bekerjasama dengan orang dari latar belakang yang berbeda. Dengan memahami sejarah dari berbagai perspektif, siswa diharapkan dapat mengerti kompleksitas dunia modern dan mengembangkan sikap saling menghargai. Peran guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai ini sangat vital untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan menumbuhkan kesadaran pentingnya toleransi di kalangan siswa (Orpa, 2024).

Seorang guru harus memastikan bahwa materi pembelajaran mencakup berbagai perspektif sejarah, bukan hanya dari satu sudut pandang, tetapi juga memperkenalkan berbagai pandangan dengan cara yang adil dan seimbang (Isnani, 2024). Hal ini bertujuan agar siswa memiliki pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang sejarah serta menghargai nilai-nilai yang berbeda. Selain itu, guru perlu menyediakan ruang untuk diskusi dan refleksi mengenai isu-isu multikulturalisme yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan ini, pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi proses penyerapan informasi, tetapi juga sarana untuk membentuk sikap dan nilai-nilai positif pada generasi mendatang. Pendekatan ini memungkinkan siswa menjadi lebih terbuka terhadap beragam perspektif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Diskusi serta refleksi tentang isu-isu

multikulturalisme juga dapat membantu siswa menghargai keberagaman budaya dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan karakter yang inklusif dan menghargai diversitas (Basri & Suhartini, 2024).

Pembelajaran sejarah yang inklusif dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif (Aldi, 2024). Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif dan narasi, siswa belajar memahami kompleksitas sejarah serta menghargai keberagaman pendapat. Selain itu, pembelajaran ini juga membantu siswa mengidentifikasi dan mengatasi bias serta stereotip yang mungkin muncul dalam penyajian sejarah (Mazna et al., 2024). Siswa menjadi individu yang lebih kritis dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang dan pengalaman. Melalui pembelajaran sejarah yang inklusif, siswa dapat mengembangkan empati terhadap orang dari berbagai latar belakang dan budaya, yang berkontribusi pada terciptanya lingkungan yang lebih toleran dan menghargai perbedaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, siswa dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah yang inklusif memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang lebih toleran dan paham keragaman masyarakat (Dunia et al., 2023). Siswa yang memahami sejarah dengan baik juga dapat mengenali pola-pola berulang dan mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif pada generasi mendatang.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, siswa dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan perubahan positif di lingkungan mereka. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah yang inklusif memiliki peranan penting dalam membentuk generasi yang lebih toleran dan memahami keragaman masyarakat (Aldi, 2024). Siswa yang memahami sejarah secara mendalam juga dapat mengenali pola-pola berulang dan mencegah terulangnya kesalahan di masa lalu. Pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter dan sikap positif pada generasi mendatang. Pemahaman yang mendalam tentang sejarah juga membantu siswa mengembangkan empati dan menghargai perbedaan budaya serta pandangan dalam masyarakat global yang semakin terhubung. Dengan demikian, pembelajaran sejarah menjadi landasan yang kuat untuk membangun generasi yang lebih toleran dan inklusif (Daulay et al., 2023). Siswa yang memahami sejarah lebih mampu menghargai keragaman dan menghindari konflik yang muncul akibat ketidaktahuan atau ketidakpekaan terhadap perbedaan. Melalui pemahaman sejarah yang mendalam, generasi masa depan dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan menciptakan masa depan yang lebih harmonis dan saling menghargai.

Pembelajaran sejarah yang inklusif adalah ketika seorang guru menyertakan perspektif dari berbagai budaya (Udmah et al., 2024). Misalnya, saat mempelajari Perang Dunia II, guru tersebut tidak hanya menjelaskan sudut pandang Barat, tetapi juga melibatkan narasi dari Asia dan Afrika. Siswa dapat memahami bahwa peristiwa sejarah memiliki pengaruh yang kompleks dan dampak yang luas di seluruh dunia. Ini juga membantu mereka menyadari bahwa sejarah tidak hanya diceritakan dari satu sudut pandang tetapi dari berbagai perspektif yang berbeda. Pembelajaran sejarah yang inklusif dapat menciptakan generasi yang lebih toleran dan menghargai keragaman budaya di sekitar mereka.

Ketika mempelajari Perang Dunia II, penting untuk mengeksplorasi bukan hanya perspektif Barat yang dominan, tetapi juga bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi negara-negara Asia seperti Jepang dan China, serta negara-negara Afrika yang terlibat. Dengan demikian, siswa dapat melihat bagaimana dampak sejarah global seperti Perang Dunia II memiliki konsekuensi yang kompleks di seluruh dunia, bukan hanya terbatas pada satu wilayah atau sudut pandang. Namun, terlalu banyak fokus pada keragaman budaya dalam pembelajaran sejarah bisa mengaburkan pemahaman tentang fakta-fakta historis yang mendasarinya, sehingga mengurangi kedalaman analisis dan interpretasi (Almujab, 2023). Selain itu, informasi yang terlalu beragam dapat membuat siswa kehilangan fokus dan gagal memahami inti dari topik yang sedang dipelajari.

Terlalu banyak informasi yang beragam dapat menyebabkan siswa kehilangan fokus dan kesulitan memahami inti dari topik yang dipelajari. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menemukan keseimbangan antara memperkenalkan keragaman budaya dan memastikan siswa dapat memahami serta menganalisis fakta-fakta historis dengan baik (Kurdi, 2021). Pembelajaran sejarah dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi perkembangan pemahaman siswa tentang dunia dan sejarah global secara keseluruhan. Dengan pendekatan yang tepat, siswa lebih mudah menyerap informasi dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik sejarah yang dipelajari. Selain itu, dengan memperhatikan kebutuhan individual siswa dan menyediakan bahan pembelajaran yang relevan, pendidik dapat membantu siswa memperoleh pengetahuan yang lebih baik dalam memahami sejarah (Wahyuni, 2022). Dengan demikian, siswa lebih siap menghadapi tantangan sejarah yang kompleks dan memiliki pemahaman yang lebih holistik tentang peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah dunia.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi sejarah dan membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menganalisis serta menafsirkan berbagai sumber sejarah. Dengan pendekatan pembelajaran yang tepat dapat mendorong siswa menjadi pembelajar sejarah yang aktif dan terampil, serta mempersiapkan mereka untuk menjadi warga yang berpengetahuan dan kritis dalam memahami kompleksitas dunia modern. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana penerapan teknologi dalam pembelajaran sejarah dapat meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran tersebut (Nunuk, 2020). Diharapkan bahwa dengan mengidentifikasi strategi pembelajaran yang efektif, para pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang memotivasi dan menantang siswa dalam memahami dan menghargai sejarah. Dengan demikian, generasi muda dapat terus mengembangkan kepekaan terhadap nilai-nilai sejarah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kajian ini menggunakan metodologi studi pustaka. Kajian Pustaka merupakan metode menghimpun data dan informasi yang memiliki keterkaitan dengan topik atau permasalahan yang sedang diteliti (Purwono, 2008). Data atau informasi didapatkan dengan pengumpulan berbagai sumber, antara lain melalui artikel dan buku referensi. Adapun berbagai sumber yang digunakan di dalam penelitian ini didapatkan dari artikel ilmiah (internet). Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan, atau menggambarkan data yang telah terkumpul, apa adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan (Sugiyono, 2013).

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan multikulturalisme merupakan landasan teori yang relevan untuk penelitian ini. Konsep ini menekankan pentingnya mengakui, menghargai, dan merayakan keragaman budaya, latar belakang, dan pengalaman siswa dalam proses pembelajaran (Ni, Ni, I., 2024). Dengan menerapkan pendekatan multikulturalisme dalam pengajaran sejarah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memperkaya pengalaman siswa. Selain itu, pendekatan ini membantu siswa memahami berbagai perspektif dalam menanggapi sejarah, sehingga meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap keragaman budaya di masyarakat (Ewilensia, 2024). Pengajaran sejarah tidak hanya berfungsi sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana untuk memupuk sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan membangun kemampuan beradaptasi dalam lingkungan multikultural. Melalui pendekatan ini, diharapkan siswa memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang sejarah dan budaya di sekitar mereka, yang akan membantu mereka menjadi warga negara yang lebih sadar akan pentingnya keragaman budaya dalam memperkuat keberagaman dan keharmonisan masyarakat (Sibaweh et al., 2024).

Multikulturalisme dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan reflektif. Dengan mempelajari sejarah dari berbagai sudut pandang, siswa belajar untuk melihat peristiwa atau fenomena secara lebih objektif dan tidak terikat pada satu perspektif (Juwita et al., 2020). Hal ini membuat mereka menjadi individu yang lebih terbuka, mampu menerima perbedaan pendapat, dan bekerja sama dengan orang-orang dari beragam latar belakang. Pendekatan multikulturalisme dalam pengajaran sejarah dapat berkontribusi secara signifikan dalam membentuk generasi yang lebih inklusif dan toleran di masa depan.

Tujuan utama dari pendekatan ini adalah mengajarkan siswa mengenai keragaman budaya dan sejarah dunia, serta membantu mereka memahami kompleksitas hubungan antarbangsa. Di sisi lain, siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menganalisis informasi dengan baik, dan memahami berbagai perspektif yang ada. Melalui pendekatan multikultural, harapannya siswa dapat menghargai keberagaman dan membangun hubungan harmonis dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda (Linda, Gardina, Raihan, 2024). Pendekatan multikulturalisme dalam pengajaran sejarah tidak hanya memungkinkan siswa untuk mempelajari sejarah dengan lebih mendalam tetapi juga membentuk mereka menjadi individu yang lebih terbuka, toleran, dan inklusif.

Manfaat pendekatan multikulturalisme dalam pengajaran sejarah sangat besar dan dapat memberikan dampak positif yang signifikan dalam pembentukan karakter siswa. Dengan memahami berbagai budaya dan tradisi, siswa dapat memperluas pandangan dunia mereka dan menghargai keberagaman manusia. Ini juga dapat membantu mereka menjadi warga negara yang lebih peduli dan bertanggung jawab, serta mampu menjaga perdamaian dan kerukunan di antara sesama. Oleh karena itu, pendekatan multikulturalisme dalam pengajaran sejarah tidak hanya berpengaruh pada pembelajaran akademis siswa, tetapi juga pada pembentukan karakter dan nilai-nilai positif yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan (Orpa, 2024).

Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas

Seiring dengan perkembangan zaman dan globalisasi, penting bagi sekolah menengah atas untuk terus memperbarui metode pengajaran sejarah agar sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan

mengintegrasikan pendekatan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah, siswa lebih mudah memahami nilai-nilai keberagaman dan menghargai perbedaan budaya di sekitar mereka (Wibowo, 2024). Pemahaman mendalam tentang berbagai peristiwa sejarah membantu siswa mengembangkan karakter dan nilai-nilai positif seperti kejujuran, toleransi, dan semangat kerja keras. Serta memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, karena generasi muda yang terdidik dengan baik mampu menjadi agen perubahan positif di masa depan. Misalnya, melalui studi tentang Perang Dunia II, siswa dapat belajar tentang pentingnya perdamaian dan kerjasama antar negara serta menghargai pengorbanan para pahlawan, sehingga mereka menjadi individu yang memiliki empati dan kesadaran sosial yang tinggi. Pembelajaran sejarah juga dapat memperkuat identitas nasionalisme siswa, membantu mereka memahami nilai-nilai budaya bangsa, dan mencegah konflik sosial akibat ketidaktahuan sejarah. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah, generasi muda lebih mampu menghargai warisan nenek moyang mereka dan menjaga keutuhan negara. Oleh karena itu, investasi dalam kualitas pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas memberikan dampak jangka panjang yang positif bagi bangsa dan negara (Lestari & Hasyim, 2024).

Namun, ada contoh di beberapa negara di mana pembelajaran sejarah dipolitisasi dan disesuaikan dengan narasi pemerintah yang tidak objektif. Situasi ini dapat menyebabkan manipulasi informasi, yang berujung pada pemahaman sejarah yang bias dan tidak akurat. Akibatnya, generasi muda bisa terpapar pada propaganda dan kehilangan kemampuan untuk memahami peristiwa sejarah secara objektif. Pembelajaran sejarah di sekolah dapat berfungsi sebagai alat propaganda yang digunakan pemerintah untuk mengendalikan narasi yang disampaikan kepada generasi muda, yang mengakibatkan pemahaman yang keliru. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan risiko politisasi sejarah dalam konteks investasi pada kualitas pembelajaran sejarah di sekolah (Ibad, 2019).

Pentingnya pembelajaran Sejarah

Pembelajaran sejarah di sekolah yang objektif dan akurat sangatlah penting. Sejarah merupakan bagian integral dari identitas suatu bangsa, dan pemahaman yang benar tentangnya dapat memperluas pandangan dan pemahaman tentang dunia. Dengan pengajaran sejarah yang seimbang dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik, generasi muda dapat belajar dari kesalahan masa lalu dan mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa depan. Selain itu, pemahaman yang tepat tentang sejarah juga dapat membangun toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat persatuan dalam masyarakat yang multikultural (Aria, Syafana, 2023). Oleh karena itu, investasi dalam pembelajaran sejarah yang berkualitas dan tidak terpengaruh oleh politik sangat penting untuk menciptakan generasi muda yang cerdas, kritis, dan memiliki nilai-nilai moral yang kuat. Dengan pemahaman holistik dan objektif tentang sejarah, generasi muda dapat menjadi agen perubahan yang mendorong kemajuan bagi bangsa dan negara. Mengetahui akar permasalahan dari masa lalu memungkinkan mereka mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah pengulangan kesalahan. Sejarah yang diajarkan dengan benar dan obyektif juga dapat menjadi dasar untuk membangun karakter yang kuat dan menghormati nilai-nilai kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat (Ulung, Yohanes, 2023).

Tantangan dalam pembelajaran sejarah terletak pada penyajian informasi yang menarik dan relevan bagi generasi muda, yang lebih suka teknologi dan informasi instan. Selain itu, diperlukan pendekatan kreatif dan inovatif dalam mengajar sejarah agar siswa termotivasi untuk belajar dan

mendalami masa lalu (Amalia, 2024). Tantangan lainnya adalah memastikan bahwa materi yang diajarkan sesuai dengan perkembangan zaman dan relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi saat ini. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, pembelajaran sejarah dapat menjadi alat yang efektif untuk membentuk generasi muda yang cerdas, peduli, dan bertanggung jawab terhadap masa depan bangsa. Guru juga perlu mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran sejarah agar siswa dapat mengakses informasi dengan lebih mudah dan menarik. Penggunaan metode pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif dapat membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai sejarah (Superman, 2024). Pembelajaran sejarah tidak hanya menjadi proses transfer pengetahuan, tetapi juga sarana untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan analitis pada siswa.

Peran pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah sangat penting untuk memperluas wawasan siswa mengenai berbagai budaya dan tradisi di dunia (Afriva, 2022). Dengan memahami dan menghargai keberagaman tersebut, siswa dapat menjadi individu yang lebih toleran dan terbuka terhadap perbedaan. Ini juga membantu mereka mengembangkan kemampuan berempati dan menghormati hak asasi manusia. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan pengetahuan tentang masa lalu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan yang dapat membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Dengan menerapkan pendekatan multikulturalisme, siswa dapat melihat peristiwa sejarah dari berbagai sudut pandang dan memahami bagaimana budaya serta nilai-nilai yang berbeda memengaruhi perjalanan sejarah. Hal ini juga dapat meningkatkan keterampilan analisis dan pemecahan masalah, serta memperluas pandangan mereka tentang dunia. Oleh karena itu, pembelajaran sejarah bukan hanya kajian fakta-fakta masa lalu, tetapi juga sebuah proses pengembangan diri yang berkelanjutan bagi siswa dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks (Aldi, 2024).

Pembelajaran sejarah tidak hanya sebatas menghafal tanggal dan peristiwa penting, melainkan juga melibatkan analisis dan pemahaman berbagai perspektif yang ada. Dengan pendekatan multikulturalisme, siswa dilatih untuk menjadi pemikir kritis yang mampu memahami kompleksitas hubungan antarbudaya dalam sejarah. Ini memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan beradaptasi dan bersikap inklusif saat menghadapi tantangan global yang semakin rumit di masa depan. Siswa juga diajarkan untuk menghargai keragaman budaya dan pandangan dunia yang berbeda sehingga dapat berkolaborasi secara efektif dengan individu dari latar belakang yang berbeda. Selain itu, pembelajaran sejarah dengan pendekatan ini membantu siswa menghindari prasangka dan diskriminasi terhadap kelompok etnis atau budaya tertentu. Dengan demikian, pembelajaran sejarah tidak hanya memberikan pemahaman tentang masa lalu, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan global yang semakin kompleks di era modern ini. Hal ini dapat memberikan kontribusi pada penciptaan generasi yang lebih toleran dan inklusif dalam membangun masa depan yang lebih baik (Miskawi, Khoirul, Maulana, 2025).

Implementasi Pendidikan Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah di Sekolah Menengah Atas

Pengembangan kurikulum yang inklusif dan representatif harus mencakup berbagai perspektif sejarah dari berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya. Selain itu, perlu diadakan kegiatan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya serta sejarah yang ada. Pelatihan bagi guru juga penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan inklusif

bagi semua siswa. Mendorong kolaborasi antara sekolah, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan lainnya agar dapat memperkuat pemahaman tentang multikulturalisme dan mendorong kerjasama antar kelompok. Dengan penerapan kurikulum yang inklusif, siswa dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang multikulturalisme, sementara kerjasama antar kelompok dapat membantu mempromosikan perdamaian dan toleransi di lingkungan sekolah serta masyarakat secara lebih luas (Hatimah, 2024). Melalui upaya kolaboratif ini, siswa dapat belajar menghormati perbedaan dan merayakan keberagaman yang ada di sekitar mereka. Dengan demikian, sekolah dapat menjadi tempat yang inklusif dan ramah bagi semua individu, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau budaya mereka.

Pelatihan untuk guru dalam menerapkan pendidikan multikulturalisme merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa (Ikfi, 2023). Guru yang terlatih dengan baik dapat menciptakan ruang yang aman dan terbuka untuk diskusi mengenai perbedaan, serta mendorong siswa untuk memahami dan menghargai perspektif yang berbeda. Dengan demikian, pendidikan multikulturalisme tidak hanya menjadi bagian dari kurikulum, tetapi juga tercermin dalam praktik sehari-hari di sekolah. Dukungan yang kuat dari seluruh komunitas sekolah sangat penting untuk mewujudkan visi lingkungan yang inklusif dan multikultural (Amiratul, Akhmad, 2024). Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip multikulturalisme oleh guru tidak boleh diabaikan. Mereka tidak hanya dapat membimbing siswa dalam materi kurikulum, tetapi juga membantu mereka mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang keragaman budaya dan pandangan dunia yang berbeda. Dengan demikian, siswa lebih terbuka terhadap perbedaan dan dapat berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda dengan lebih bijaksana. Selain itu, keberagaman di sekolah dianggap sebagai kekuatan yang menyatukan, bukan sebagai masalah yang memecah belah (Iqbal, Henny, Heri, Efriana, Trisna, 2024).

Sumber belajar yang mendukung pendidikan multikulturalisme merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan beragam. Dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber yang mencerminkan keberagaman budaya, siswa dapat melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Ini membantu mereka memperluas pandangan dan meningkatkan toleransi terhadap perbedaan (Fitri, 2023). Oleh karena itu, pendidikan multikulturalisme tidak hanya diajarkan di sekolah, tetapi juga menjadi bagian integral dari pengalaman belajar sehari-hari siswa. Melalui pendidikan multikulturalisme, siswa juga belajar menghargai nilai-nilai kesetaraan, mengenal dan menghormati berbagai tradisi dan adat istiadat, serta berkolaborasi dalam lingkungan yang heterogen. Dengan demikian, mereka terlatih dalam keterampilan komunikasi lintas budaya yang penting di dunia global saat ini. Dengan penerapan pendidikan multikulturalisme secara menyeluruh, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis.

Sebagai contoh, di sekolah yang menerapkan pendidikan multikulturalisme, siswa dapat diajak merayakan berbagai festival budaya dari seluruh dunia. Misalnya, mereka bisa belajar tentang tradisi Tahun Baru Imlek dengan menghias kelas, mempelajari cerita-cerita legenda, dan menikmati makanan khas Tionghoa bersama. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang keberagaman budaya, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghargaan, dan kerjasama antar budaya (Saputra, 2024). Dengan harapan pada generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang terbuka, menghargai perbedaan, dan mampu berkomunikasi dengan orang dari latar belakang budaya yang

berbeda. Pendidikan multikulturalisme bukan hanya tentang menghafal fakta budaya tetapi juga membangun keterampilan komunikasi lintas budaya yang esensial untuk sukses di era globalisasi (Prasetiawati, 2017). Misalnya, jika seorang siswa hanya belajar tentang budaya Tionghoa secara teoritis tanpa mengalami langsung makanan khas atau berinteraksi dengan orang-orang Tionghoa, pemahaman dan pengalamannya terbatas. Ini dapat mengurangi efektivitas pendidikan multikulturalisme dalam mengajarkan nilai-nilai toleransi dan kerjasama. Sebaliknya, pengalaman langsung seperti berpartisipasi dalam acara makan bersama masyarakat Tionghoa dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan memperkuat keterampilan komunikasi lintas budaya. Meskipun belajar secara teoritis tetap penting untuk memahami aspek-aspek budaya tersebut, pengalaman yang praktis serta dapat memperkaya pemahaman siswa.

Beberapa Penelitian terdahulu mengenai penerapan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran Sejarah di beberapa SMA menunjukkan bahwa siswa yang terlibat langsung dengan budaya yang dipelajari cenderung memiliki pemahaman yang lebih mendalam dan keterampilan komunikasi lintas budaya yang lebih baik dibandingkan siswa yang hanya belajar secara teoritis (Rudy, 2022). Ini menegaskan pentingnya pengalaman langsung dalam memperkaya pembelajaran lintas budaya dan mempersiapkan generasi muda untuk hidup dalam masyarakat yang semakin multikultural. Selain itu, melibatkan studi kasus dalam penelitian juga dapat memberikan wawasan yang lebih konkret dan aplikatif bagi pembaca untuk memahami konsep multikulturalisme dalam konteks pendidikan (Iqbal, Henny, Heri, Efriana, Trisna, 2024). Oleh karena itu, institusi pendidikan perlu menyediakan kesempatan bagi siswa untuk mengalami langsung budaya yang berbeda, seperti melalui program pertukaran pelajar atau kegiatan belajar di lapangan. Dengan harapan siswa dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman budaya dan meningkatkan kemampuan mereka dalam berkomunikasi lintas budaya. Akhirnya, generasi muda lebih siap menghadapi tantangan di masyarakat yang semakin multikultural di masa depan.

Analisis mengenai dampak penerapan pendidikan multikulturalisme menunjukkan bahwa siswa yang terlibat dalam pengalaman tersebut cenderung memiliki sikap yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Mereka juga lebih mampu bekerjasama secara efektif dengan orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Hal ini tidak hanya memberikan manfaat bagi siswa secara pribadi, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang keragaman budaya, diharapkan tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan saling mendukung di masa depan (Andry, Aam, Hafidin, 2024). Selain itu, pendidikan multikulturalisme dapat membantu mengurangi ketegangan antar kelompok dan mencegah konflik yang muncul akibat ketidaktahuan atau prasangka terhadap budaya lain (Zhaldi, 2024). Oleh karena itu, penerapan pendidikan multikulturalisme merupakan langkah penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjadi bagian dari masyarakat yang semakin global dan multikultural. Pendidikan ini juga dapat menciptakan rasa toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan di antara individu (Gusnia, Masduki, 2023). Dengan demikian, generasi muda lebih terbuka terhadap berbagai pandangan dan nilai yang ada di masyarakat.

Rekomendasi untuk meningkatkan penerapan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran Sejarah mencakup pengembangan kurikulum yang inklusif, pelatihan guru untuk memahami dan menghargai keberagaman budaya, serta penggunaan sumber belajar yang

merepresentasikan berbagai perspektif sejarah. Selain itu, melibatkan komunitas lokal dalam proses pembelajaran sangat penting agar siswa dapat memahami dan menghargai warisan budaya di sekitar mereka. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran Sejarah dapat memberikan manfaat maksimal bagi perkembangan pemahaman dan toleransi antarindividu dalam masyarakat. Penting juga untuk memastikan bahwa materi pelajaran mencakup berbagai aspek keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Guru perlu terus mendorong diskusi terbuka dan adil mengenai perbedaan budaya di antara siswa. Selain itu, guru juga harus memfasilitasi kegiatan ekstrakurikuler yang memperkuat toleransi dan kerjasama antar siswa dari latar belakang budaya yang berbeda juga sangat diperlukan. Dengan menerapkan pendekatan pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran Sejarah, kita dapat membantu menciptakan generasi yang lebih toleran dan menerima keberagaman budaya di Indonesia.

Conclusion

Urgensi pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas menunjukkan bahwa integrasi nilai-nilai multikultural sangat penting untuk membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pengetahuan, tetapi juga sikap toleran dan empati. Dalam konteks masyarakat yang semakin kompleks dan beragam, pemahaman multikulturalisme menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang inklusif. Pendidikan sejarah yang mengedepankan multikulturalisme memberi siswa kesempatan untuk mempelajari peristiwa dari berbagai perspektif, termasuk yang sering kali terabaikan dalam narasi dominan. Disisi lain, siswa dapat memahami bahwa sejarah tidak hanya terdiri dari fakta dan tanggal, tetapi juga dari pengalaman dan pandangan yang berbeda dari berbagai budaya. Pendekatan ini mendorong siswa untuk menjadi lebih kritis dan reflektif, mampu mengidentifikasi bias serta stereotip, dan mengembangkan kemampuan berpikir analitis.

Pembelajaran sejarah yang inklusif berfungsi sebagai sarana untuk membentuk karakter siswa. Dengan memahami keragaman budaya dan tradisi, siswa diharapkan dapat menghargai perbedaan dan berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Ini tidak hanya bermanfaat bagi individu, tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan meningkatkan toleransi dan mengurangi konflik antar kelompok. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk menerapkan metode yang inovatif dan relevan dalam pengajaran sejarah. Integrasi teknologi dan keterlibatan komunitas lokal dalam proses pembelajaran dapat memperkaya pengalaman siswa dan meningkatkan minat mereka terhadap sejarah. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan multikulturalisme dalam pembelajaran sejarah berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang lebih sadar, kritis, dan siap menghadapi tantangan global di masa depan.

Referensi

- Afriva. (2022). Pendidikan multikultural dalam pembelajaran sejarah. 7(2), 284–291. <https://doi.org/https://doi.org/10.29210/022313jpgi0005>
- Aldi, & W. (2024). Implikasi Multikulturalisme dalam Pembelajaran Sejarah Sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Persatuan Indonesia. 11(1), 49–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.v5i1.2332>
- Almujab. (2023). Pembelajaran berdiferensiasi: Pendekatan efektif dalam menjawab kebutuhan diversitas siswa. 8, 148–165. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/oikos/article/view/12528>
- Amalia. (2024). Meningkatkan Keterampilan Berpikir Siswa Melalui Pembelajaran Sejarah Yang Inovatif. 3(Vol. 3 No. 9 (2024)), 10077–10085. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i9.14759>
- Amalia, N., Penelitian, S., Pengembangan, D., & Djuanda, U. (2024). PENERAPAN KURIKULUM PENDIDIKAN SEJARAH DI SEKOLAH MENENGAH ATAS. 3, 12620–12632. <https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i11.15765>
- Amiratul, Akhmad, & Z. (2024). Pendidikan Multikultural dalam Pengorganisasian Institusi Pendidikan. 10(1), 34–41. <https://doi.org/https://doi.org/10.19109/elidare.v10i1.21965>
- Andry, Aam, Hafidin, & U. (2024). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Praktik Pendidikan Islam di Indonesia. 4, 1733–1745. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.12598>
- Aria, Syafana, & S. (2023). Pendidikan Pancasila dalam Era Multikulturalisme : Membangun Toleransi dan Menghargai Keberagaman. 1(5), 573–580. <https://doi.org/https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.73>
- Basri, H., & Suhartini, A. (2024). Internalisasi nilai religius pada mapel pai jenjang sd untuk mengembangkan sikap keberagaman siswa. 13(1), 97–112. <https://doi.org/10.29313/tjpi.v13i1.12826>
- Daulay, M., Islam, U., & Utara, S. (2023). Implementasi Pendidikan Multikultural dalam Pembelajaran Sejarah dengan Materi Islam pada Peserta Didik SMA Negeri 11 Medan. 3(1), 15–19. <https://jurnal.medanresourcecenter.org/index.php/IE/article/view/1005>
- Dunia, M., Berani, Y., Dan, K., & Di, K. (2023). Membangun dunia yang berani: menegakkan keberagaman dan kemajemukan di indonesia. 3(1), 20–34. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/juispol/article/view/2897>
- Ewilensia, W. D. (2024). Pendidikan Multikultural untuk Pembentukan Karakter Anak: Membangun Jembatan Harmoni Antarbudaya di Era Kontemporer. 2024(01), 224–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.51622/vsh.v5i1.2324>
- Fitri. (2023). Pendidikan Multikultural Dalam Mengantisipasi Promblematika Sosial Di Era Digital. 3(Vol 3, No 02 (2023)). <https://doi.org/https://doi.org/10.57210/trq.v3i02.257>
- Gusnia, Masduki, & A. (2023). Pendidikan Multikultural: Menuju Kesatuan Melalui Keanekaragaman. 02(06), 1–7. <https://doi.org/https://doi.org/10.4444/jisma.v2i6.505>
- Hatimah, H. (2024). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam yang Inklusif: Pendekatan untuk Meningkatkan Akses dan Partisipasi. 1(1), 43–63. <https://barkah-ilmifidunya.my.id/ojs/index.php/res/article/view/18>
- Ibad. (2019). Model Pembelajaran Komunikasi Pada Penggunaan Sosial Media Untuk Menanggulangi Penyebaran Berita Hoax Bagi Generasi Muslim Milenial M.Nashoihul Ibad. 02(1), 53–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.38073/wasilatuna.v2i1.377>
- Ikfi, & K. (2023). PENDIDIKAN INKLUSIF (Mewujudkan Keadilan, Kesetaraan Dalam Lingkungan Multikultural). 1(Vol. 1 No. 3 (2023): Juli), 696–712. <https://doi.org/https://doi.org/10.54437/iljjislamiclearningjournal.v1i3.1041>
- Iqbal, Henny, Heri, Efriana, Trisna, & Al. (2024). Strategi Pengembangan Pendidikan Multikultural di Indonesia. 5(3), 4418–4424. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i3.28563>
- Isnani, S. (2024). el-Tarbawi : Jurnal Pendidikan Agama Islam. 1(1). <https://jurnal.naskahaceh.co.id/index.php/eL-Tarbawi/article/view/138>

- Isrina, & B. (2024). Analisis strategi pengajaran pendidikan multikultural di sekolah menengah atas. 3(1), 29–41. <https://doi.org/10.22437/krinok.v3i1.25685>
- Juwita, R., Firman, F., Rusdinal, R., Aliman, M., & Malang, U. N. (2020). Meta Analisis : Perkembangan Teori Struktural Fungsional dalam Sosiologi Pendidikan. January. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v3i1>
- Kurdi, M. S. (2021). Dampak Globalisasi pada Konten dan Mata Pelajaran Pada Kurikulum di Madrasah Ibtidaiyah : Tantangan Dan Peluang. 1(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/cendikia.v1i4.1316>
- Lestari, S., & Hasyim, U. W. (2024). PENTINGNYA LITERASI DALAM MENJAGA KEUTUHAN DAN. 1. <http://jurnal.unwaspress.com/index.php/literasiana/article/view/23>
- Linda, Gardina, Raihan, & I. (2024). Pembelajaran Berbasis Multikultural Dalam Keberagaman Siswa Sekolah Dasar. 09. <http://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/13361>
- Mawarti, S. (2022). Memperkuat Toleransi Melalui Pembelajaran Di Madrasah. 13(2), 60–72. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/trs.v13i2.16095>
- Mazna, U., Nazirah, F., Farhana, I., & Marsitah, I. (2024). Perencanaan Pembelajaran Yang Interaktif Menumbuhkan Critical Thinking Siswa Dalam. 4, 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i4.793>
- Miskawi, Khoiril, Maulana, & H. (2025). Pengembangan Keterampilan Berpikir Historis melalui Pembelajaran Sejarah. 7(Vol 7 No 1 (2025)). <https://doi.org/https://doi.org/10.31540/sindang.v7i1.3201>
- Ni, Ni, I., & I. (2024). PENDEKATAN PLURALISME AGAMA DALAM PENDIDIKAN DI INDONESIA : TANTANGAN DAN STRATEGI IMPLEMENTASI. 11, 871–886. <https://doi.org/https://doi.org/10.38048/jipcb.v11i3.3749>
- Nunuk, & D. (2020). ANALISIS KEBUTUHAN PEMBELAJARAN SEJARAH ERA DIGITAL. 97–108. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Pro/article/view/4813>
- Orpa, & M. (2024). Peran Guru Kristen dalam Membangun Karakter Siswa di Sekolah Multikultural. 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.62200/newlight.v2i2.129>
- Prasetiawati, E. (2017). Urgensi Pendidikan Multikultur untuk Menumbuhkan Nilai Toleransi Agama di Indonesia. 1(Vol. 1 No. 02 (2017)). <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/tapis.v1i02.876>
- Purwono. (2008). Studi Kepustakaan. In Universitas Gajah Mada (pp. 66-72).
- Ramdani. (2018). Model pembelajaran kontekstual berbasis kearifan lokal sebagai penguatan pendidikan karakter. 10(1), 1–10. <http://103.242.233.34/index.php/jupiis/article/view/8264>
- Rudy. (2022). Pentingnya Pemahaman Lintas Budaya (Cross-Cultural Understanding) bagi Pelajar. 2(4), 251–255. <https://doi.org/https://doi.org/10.55382/jurnalpustakamitra.v2i4.334>
- Saputra, E. E. (2024). Pengembangan Keterampilan Sosial Siswa Sekolah Dasar dalam Konteks Pendidikan Multikultural Pada Mata Pelajaran IPS. 2(3), 158–164. <https://doi.org/10.70115/semesta.v2i3.175>
- Sestya, & A. (2023). PERAN PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENANGGULANGI DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI DI KALANGAN SISWA SEKOLAH DASAR. 4(2). <http://ejournal.unsultra.id/index.php/JSES/article/view/152>
- Sibaweh, I., Setiawan, D., & Erihadiana, M. (2024). Pertimbangan Multikultural dalam Pengembangan Kurikulum Untuk Menghadapi Keanekaragaman Siswa. 13(3), 3895–3904. <https://doi.org/https://doi.org/10.58230/27454312.905>
- Sugiyono, D. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Superman, & S. (2024). Integrasi Nilai-Nilai Tradisi Masyarakat Sambas dalam Pembelajaran Sejarah. 4(Vol. 4 No. 2 (2024), 794–805. <https://doi.org/https://doi.org/10.53299/jppi.v4i2.604>
- Udmah, S., Wuryandini, E., & Mahyasari, P. (2024). Analisis Desain Pembelajaran Culturally Responsive Teaching dalam Konteks Penguatan Literasi Humanistik di Sekolah Dasar. 7(2), 749–758. <https://doi.org/https://doi.org/10.30605/jsgp.7.2.2024.4272>

- Ulung, Yohanes, & N. (2023). Pengaruh Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila Terhadap Pembentukan Karakter dan Moral Peserta Didik Di Sekolah Menengah Pertama. 3(Vol. 3 No. 6 (2023)), 2102–2115. <http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6394>
- Wahyuni, S. (2022). Kurikulum merdeka untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. 4, 13404–13408. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.12696>
- Wibowo, D. R. (2024). Integrasi Nilai-nilai Multikulturalisme dalam Pembelajaran IPS untuk Membangun Sikap Toleran Pada Siswa MI / SD. 6(02), 112–125. <https://doi.org/https://doi.org/10.62097/ad.v6i02.1998>
- Zhaldi, & D. (2024). Komunikasi Lintas Budaya: Konsep, Tantangan, Dan Strategi Pengembangannya. 4(2), 168–181. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/selasar/article/view/2569>

DALANG DI BALIK LAYAR: PERAN TERSEMBUNYI KAUM PEREMPUAN DALAM SEJARAH MARITIM INDONESIA

Adzkiyak¹, Moch. Mubarak Muharam²

¹Dosen Program Studi Ilmu Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Argopuro Jember

²Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Negeri Surabaya

E-mail: adzkiyak@gmail.com

Abstrak:

Artikel ini mengeksplorasi peran tersembunyi namun signifikan dari perempuan dalam sejarah maritim Indonesia, sebuah aspek yang sering terabaikan dalam narasi sejarah konvensional. Melalui analisis sumber-sumber primer, termasuk catatan pelayaran, dokumen perdagangan, dan tradisi lisan, serta peninggalan arkeologi, penelitian ini mengungkap kontribusi multifaset perempuan dalam membangun dan mempertahankan tradisi maritim Nusantara. Temuan menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam ekonomi pesisir sebagai pedagang dan pengolah hasil laut, tetapi juga terlibat aktif dalam navigasi, diplomasi maritim, dan bahkan perlawanan terhadap kolonialisme. Studi ini mengidentifikasi beberapa tokoh perempuan kunci yang memainkan peran strategis dalam jaringan perdagangan maritim, serta menganalisis bagaimana norma gender dan struktur sosial mempengaruhi partisipasi perempuan dalam aktivitas maritim. Lebih lanjut, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana pengetahuan maritim diwariskan melalui garis keturunan perempuan, mempertahankan keberlanjutan tradisi bahari Indonesia. Dengan mengungkap narasi yang sering terpinggirkan ini, artikel ini tidak hanya memperkaya pemahaman kita tentang sejarah maritim Indonesia, tetapi juga menantang persepsi gender dalam studi maritim secara lebih luas. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya reevaluasi historiografi maritim Indonesia dan pentingnya mengintegrasikan perspektif gender dalam studi dan kebijakan maritim kontemporer.

Kata Kunci: Sejarah Maritim; Perempuan Indonesia; Gender dan Kelautan;

Pendahuluan

Sejarah maritim Indonesia telah lama diwarnai oleh kisah-kisah besar mengenai penjelajahan, perdagangan antar pulau, serta perebutan kekuasaan di lautan oleh kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit. Namun, narasi ini sering kali didominasi oleh kisah para lelaki—pelaut, penguasa, dan pedagang—sehingga peran kaum perempuan di dalamnya jarang diungkap. Dalam banyak historiografi, kaum perempuan seakan terpinggirkan, dianggap hanya berperan dalam ranah domestik atau sebagai pendukung aktivitas laki-laki (Smith & Tyson, 2019). Padahal, dalam kenyataannya, perempuan memainkan peran kunci dalam berbagai aspek kehidupan maritim, mulai dari ekonomi, politik, hingga spiritualitas. Hal ini menciptakan celah dalam pemahaman kita tentang peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia yang sesungguhnya.

Peran perempuan dalam konteks maritim bisa dilihat melalui berbagai fungsi yang mereka emban, baik di bidang perdagangan, ritual keagamaan, maupun pengelolaan sumber daya laut. Sebagai contoh, di beberapa daerah pesisir di Indonesia, perempuan berperan aktif dalam proses perdagangan lintas laut dan menjadi penggerak utama ekonomi lokal (Andaya, 2016). Selain itu, peran mereka dalam ritual-ritual laut seperti Sedekah Laut di Jawa dan Bakar Tongkang di Riau menunjukkan

keterlibatan spiritual yang mendalam, di mana perempuan seringkali memegang peran sentral dalam menjaga tradisi-tradisi maritim yang ada (Rahman, 2018). Akan tetapi, kontribusi perempuan dalam konteks ini jarang tercatat secara formal dalam catatan sejarah, menyebabkan peran mereka terabaikan dalam narasi arus utama.

Salah satu alasan mengapa peran perempuan dalam sejarah maritim terabaikan adalah karena pengaruh patriarki yang kuat dalam masyarakat maritim Nusantara. Joan W. Scott (1986) dalam teorinya tentang sejarah feminis menyatakan bahwa penulisan sejarah cenderung bersifat androcentrik, di mana kontribusi laki-laki lebih banyak mendapat perhatian daripada perempuan. Hal ini berlaku pula dalam konteks sejarah maritim Indonesia, di mana narasi sejarah yang ada lebih banyak menyoroti sosok laki-laki sebagai penggerak utama perdagangan dan politik maritim. Akibatnya, peran perempuan yang lebih subtil dan tersembunyi sering kali diabaikan atau dilihat sebagai bagian dari aktivitas domestik yang tidak memiliki pengaruh langsung terhadap ekonomi dan politik.

Namun, pendekatan-pendekatan kontemporer dalam studi sejarah mulai memberikan perhatian lebih pada peran perempuan, terutama dalam konteks ekonomi maritim. Sejumlah penelitian terbaru telah menyoroti bagaimana perempuan di berbagai daerah pesisir Nusantara terlibat aktif dalam pengelolaan hasil laut, produksi barang-barang kerajinan untuk perdagangan, serta pengelolaan jaringan distribusi logistik (Siddiq, 2020). Peran ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pendukung dalam kegiatan ekonomi, tetapi juga sebagai agen aktif yang memiliki pengaruh signifikan terhadap dinamika perdagangan maritim. Kajian semacam ini membantu merevisi pandangan lama yang menganggap perempuan sebagai aktor pasif dalam sejarah maritim Indonesia.

Rumusan masalah yang muncul dari fenomena ini adalah bagaimana peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia dapat diungkap dan dipahami secara lebih komprehensif? Bagaimana peran-peran tersebut tersembunyi di balik narasi besar sejarah yang didominasi oleh laki-laki, dan bagaimana kontribusi mereka dapat diposisikan kembali dalam historiografi maritim Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dijawab guna mendapatkan gambaran yang lebih utuh mengenai sejarah maritim, sekaligus memperbaiki ketimpangan gender dalam penulisan sejarah. Pendekatan multidisiplin, termasuk studi feminis, arkeologi, dan antropologi, diperlukan untuk menggali lebih dalam peran perempuan yang selama ini tersembunyi (Crenshaw, 1989).

Dalam upaya menjawab rumusan masalah tersebut, penting untuk melihat bagaimana kontribusi perempuan di berbagai daerah pesisir di Indonesia bervariasi sesuai dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Di beberapa wilayah, seperti Sumatera dan Sulawesi, perempuan terlibat aktif dalam perdagangan rempah-rempah dan pengelolaan pelabuhan (Andaya, 2016). Sementara itu, di daerah pesisir Jawa, perempuan lebih banyak berperan dalam ritual dan upacara yang berkaitan dengan laut. Dengan kata lain, peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia tidak bisa dilihat secara seragam, melainkan harus dipahami melalui lensa interseksi gender, kelas, dan etnis, sebagaimana yang dikemukakan oleh teori intersectionality (Crenshaw, 1989).

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran tersembunyi kaum perempuan dalam sejarah maritim Indonesia, sekaligus merevisi narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam memahami sejarah maritim Indonesia secara lebih utuh dan inklusif. Selain itu, kajian ini juga diharapkan mampu menginspirasi studi-studi sejarah lain untuk lebih memperhatikan peran perempuan yang sering kali terpinggirkan dalam narasi-narasi besar sejarah. Penulisan sejarah yang lebih adil gender akan memberikan perspektif baru tentang dinamika sosial, ekonomi, dan politik di Nusantara, terutama dalam konteks kehidupan maritim.

Pembahasan

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia sangat beragam dan melampaui batas-batas domestik yang sering dikaitkan dengan mereka. Salah satu temuan penting adalah bahwa perempuan di wilayah pesisir tidak hanya terlibat dalam kegiatan ekonomi, seperti perdagangan, tetapi juga memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya

alam dan ritual-ritual laut. Di wilayah pesisir Sumatera, Sulawesi, dan Maluku, misalnya, perempuan aktif dalam perdagangan hasil laut seperti ikan, garam, dan rempah-rempah. Mereka bukan hanya pelaksana, tetapi juga pengelola jaringan perdagangan, menjalin hubungan ekonomi dengan pedagang dari luar daerah maupun luar negeri (Andaya, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam ekonomi maritim Nusantara jauh lebih aktif dan strategis daripada yang tercatat dalam sejarah arus utama.

Peran perempuan dalam perdagangan ini terungkap melalui bukti-bukti arkeologis yang ditemukan di pelabuhan-pelabuhan kuno, seperti di Barus dan Ternate, di mana ditemukan berbagai artefak yang mengindikasikan keterlibatan perempuan dalam produksi dan distribusi barang dagangan. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa perempuan turut terlibat dalam pembuatan dan penyimpanan komoditas dagang seperti rempah-rempah dan tekstil (Siddiq, 2020). Lebih lanjut, keterlibatan perempuan dalam perdagangan ini juga terlihat dalam kemampuan mereka mengelola sumber daya ekonomi di rumah tangga, yang berkontribusi besar terhadap keberlangsungan perdagangan antar pulau di Nusantara. Dengan demikian, jelas bahwa peran perempuan dalam sejarah maritim tidak hanya berada di balik layar, tetapi secara langsung mempengaruhi dinamika ekonomi lokal dan regional.

Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam ritual dan kepercayaan yang berhubungan dengan laut. Di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa dan Riau, perempuan sering kali memainkan peran sentral dalam upacara adat yang melibatkan laut, seperti Sedekah Laut dan Bakar Tongkang. Ritual-ritual ini berfungsi untuk memohon keselamatan dan kelimpahan hasil laut, serta menjaga hubungan harmonis antara manusia dan alam (Rahman, 2018). Dalam beberapa kasus, perempuan memegang posisi sebagai pemimpin upacara atau pemegang kekuatan spiritual yang dipercaya mampu berkomunikasi dengan roh laut. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki posisi kultural yang kuat dalam masyarakat maritim, yang peranannya terkait erat dengan keyakinan dan spiritualitas.

Namun, narasi sejarah yang ada sering kali mengabaikan peran perempuan dalam aspek ritual dan kepercayaan ini, karena historiografi tradisional lebih berfokus pada peran politik dan ekonomi yang dijalankan oleh laki-laki. Menurut Scott (1986), hal ini adalah hasil dari bias androcentrik dalam penulisan sejarah, di mana kontribusi perempuan dianggap tidak signifikan jika tidak berkaitan dengan politik formal atau kekuasaan militer. Padahal, perempuan dalam masyarakat maritim juga memiliki pengaruh yang besar dalam pengambilan keputusan sosial dan budaya, terutama dalam konteks lokal. Misalnya, dalam ritual Bakar Tongkang, perempuan memegang peran sebagai penjaga tradisi dan pelestari nilai-nilai budaya yang penting bagi keberlangsungan masyarakat setempat (Rahman, 2018).

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perempuan juga memainkan peran penting dalam diplomasi maritim. Dalam sejarah Nusantara, kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya, Majapahit, dan Kesultanan Aceh menggunakan pernikahan politik sebagai alat diplomasi untuk memperkuat hubungan dengan kerajaan lain atau dengan kekuatan asing seperti Portugis dan Belanda (Reid, 2011). Perempuan, dalam hal ini para putri kerajaan, sering kali dijadikan alat diplomasi melalui pernikahan untuk menciptakan aliansi strategis. Salah satu contoh yang terkenal adalah Ratu Kalinyamat dari Jepara, yang tidak hanya dikenal sebagai pemimpin kerajaan, tetapi juga sebagai tokoh penting dalam perang melawan Portugis pada abad ke-16 (Andaya, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam politik maritim tidak bisa dianggap remeh, meskipun dalam banyak kasus peran mereka disembunyikan di balik narasi besar laki-laki.

Pada aspek ekonomi, perempuan tidak hanya berperan sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam sektor produksi dan distribusi hasil laut. Sebagai contoh, perempuan di daerah pesisir Jawa dan Sumatera terlibat dalam pengolahan ikan dan garam, yang menjadi komoditas utama perdagangan lokal dan regional (Smith & Tyson, 2019). Mereka bertanggung jawab atas proses produksi yang sangat penting bagi ekonomi maritim, mulai dari menangkap ikan, mengolahnya, hingga menjualnya ke pasar. Keterlibatan perempuan dalam siklus ekonomi ini menunjukkan bahwa mereka memiliki peran kunci dalam menopang ekonomi maritim yang berkelanjutan, meskipun sering kali tidak diakui dalam catatan sejarah formal.

Selain kontribusi dalam ekonomi dan ritual, penelitian ini juga mengungkap adanya keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan kapal dan pelayaran. Meskipun tidak secara langsung berlayar, perempuan berperan dalam produksi barang-barang yang diperlukan untuk pelayaran, seperti pembuatan perbekalan, tenun layar, dan pengolahan bahan-bahan untuk konstruksi kapal. Di beberapa daerah, seperti di Sulawesi dan Maluku, perempuan juga membantu dalam merencanakan rute pelayaran berdasarkan pengetahuan lokal tentang cuaca dan arus laut (Siddiq, 2020). Pengetahuan ini sering kali diwariskan secara turun temurun dalam komunitas, di mana perempuan berperan sebagai penjaga informasi yang vital untuk keselamatan pelayaran.

Dalam konteks sosial, perempuan juga memainkan peran dalam menjaga jaringan sosial antar komunitas maritim. Melalui pernikahan dan aliansi keluarga, perempuan berperan dalam memperkuat hubungan antar komunitas di berbagai pulau. Mereka sering kali menjadi penghubung antar keluarga pedagang dan penguasa lokal, memastikan kelangsungan perdagangan dan kerja sama di antara komunitas yang berbeda (Reid, 2011). Peran sosial ini menunjukkan bahwa perempuan tidak hanya berfungsi sebagai pendamping atau ibu rumah tangga, tetapi juga sebagai agen penting dalam menjaga stabilitas dan kelangsungan jaringan maritim.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan budaya lokal. Di wilayah pesisir seperti Aceh dan Jepara, perempuan sering kali memegang peran politik yang signifikan, sementara di daerah lain seperti Sulawesi dan Maluku, peran mereka lebih terkait dengan ekonomi dan spiritualitas. Hal ini mengindikasikan bahwa peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia tidak bisa dilihat secara seragam, tetapi harus dipahami berdasarkan kompleksitas lokal dan interaksi antar faktor-faktor sosial (Crenshaw, 1989).

Keterlibatan perempuan dalam sejarah maritim Indonesia juga mencerminkan interseksi antara gender, kelas, dan etnis. Perempuan dari kelas elit, misalnya, memiliki akses lebih besar ke kekuasaan politik dan ekonomi, sementara perempuan dari kalangan bawah lebih banyak terlibat dalam sektor ekonomi informal seperti perdagangan kecil dan produksi komoditas (Smith & Tyson, 2019). Sementara itu, perempuan dari berbagai etnis juga memiliki peran yang berbeda dalam masyarakat maritim, tergantung pada sistem nilai dan struktur sosial yang berlaku di komunitas mereka. Teori intersectionality yang dikemukakan oleh Crenshaw (1989) membantu memahami bagaimana identitas perempuan dalam konteks maritim dibentuk oleh berbagai faktor sosial yang saling berinteraksi.

Pembahasan ini menekankan pentingnya merevisi historiografi maritim Indonesia agar lebih inklusif dan mengakui kontribusi perempuan yang selama ini tersembunyi. Dengan mempertimbangkan peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan maritim, dari ekonomi hingga ritual dan diplomasi, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih utuh tentang sejarah maritim Indonesia. Peran mereka yang tersembunyi di balik layar tidak berarti bahwa kontribusi mereka kurang penting; sebaliknya, mereka memainkan peran kunci dalam memastikan kelangsungan ekonomi, sosial, dan budaya maritim di Nusantara (Scott, 1986).

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa perempuan adalah bagian integral dari sejarah maritim Indonesia. Mereka bukan hanya pendukung laki-laki, tetapi juga aktor utama yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan maritim. Untuk memahami sejarah maritim Indonesia secara lebih komprehensif, penting untuk terus menggali peran perempuan dan merevisi narasi sejarah yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Penelitian lebih lanjut tentang topik ini akan membuka lebih banyak lapisan tersembunyi tentang kontribusi perempuan, sehingga memberikan gambaran yang lebih adil dan seimbang tentang sejarah maritim Indonesia.

Konklusi

Kesimpulannya, penelitian ini berhasil mengungkap bahwa kaum perempuan memiliki peran signifikan namun sering kali tersembunyi dalam sejarah maritim Indonesia. Meskipun narasi sejarah tradisional lebih banyak menyoroti peran laki-laki, bukti-bukti menunjukkan bahwa perempuan memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan maritim, termasuk ekonomi, politik, dan spiritualitas. Di

sektor ekonomi, perempuan tidak hanya bertindak sebagai pedagang dan pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam distribusi hasil laut dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah pesisir. Peran mereka dalam ritual-ritual maritim seperti Sedekah Laut dan Bakar Tongkang menunjukkan keterlibatan aktif dalam menjaga keseimbangan spiritual dan sosial masyarakat maritim. Di sisi lain, peran perempuan dalam diplomasi maritim, terutama melalui pernikahan politik dan aliansi antar kerajaan, memperlihatkan kontribusi mereka dalam membentuk lanskap politik Nusantara. Namun, bias patriarki dalam penulisan sejarah menyebabkan kontribusi mereka sering terabaikan atau disembunyikan di balik peran-peran domestik. Dengan menggunakan pendekatan feminis dan intersectionality, penelitian ini menunjukkan bahwa peran perempuan dalam sejarah maritim Indonesia sangat kompleks dan beragam, tergantung pada faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi identitas mereka. Oleh karena itu, penting untuk merevisi historiografi maritim agar lebih inklusif dan adil, dengan mengakui peran perempuan sebagai agen aktif yang berpengaruh besar dalam sejarah maritim Indonesia.

Referensi

- Andaya, B. W. (2016). *The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Geertz, H. (1963). *The Javanese Family: A Study of Kinship and Socialization*. Free Press.
- Onghokham. (1992). *Ritus Laut: Tradisi Maritim Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman, A. (2018). Peran Perempuan dalam Ritual Laut di Indonesia. *Journal of Maritime Studies*, 9(2), 34-50.
- Reid, A. (2011). **Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Expansion and Crisis**. Yale University Press.
- Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. *American Historical Review*, 91(5), 1053–1075.
- Siddiq, M. (2020). Archaeological Evidence of Women's Roles in Ancient Indonesian Maritime Trade. *Maritime History Review*, 45(1), 56-70.
- Smith, J., & Tyson, C. (2019). Gendered Economies of the Sea: Women in Indonesian Maritime History. *Gender & History*, 31(3), 545–562.
- Andaya, B. W. (2016). *The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Rahman, A. (2018). Peran Perempuan dalam Ritual Laut di Indonesia. *Journal of Maritime Studies*, 9(2), 34-50.

- Scott, J. W. (1986). Gender: A Useful Category of Historical Analysis. *American Historical Review*, 91(5), 1053–1075.
- Siddiq, M. (2020). Archaeological Evidence of Women's Roles in Ancient Indonesian Maritime Trade. *Maritime History Review*, 45(1), 56-70.
- Smith, J., & Tyson, C. (2019). Gendered Economies of the Sea: Women in Indonesian Maritime History. *Gender & History*, 31(3), 545–562.
- Andaya, B. W. (2016). *The Flaming Womb: Repositioning Women in Early Modern Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Crenshaw, K. (1989). Demarginalizing the Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine, Feminist Theory and Antiracist Politics. *University of Chicago Legal Forum*, 1989(1), 139–167.
- Rahman, A. (2018). Peran Perempuan dalam Ritual Laut di Indonesia. *Journal of Maritime Studies*, 9(2), 34-50.
- Reid, A. (2011). *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450-1680: Expansion and Crisis*. Yale University Press.



Mini Historiography in School: Encouraging Students to Become Young Historians

Rahman Abidin

Universitas Negeri Surabaya

Correspondence author E-Mail address: rahmanabidin@unesa.ac.id

Abstract:

History education has tended to focus on the transmission of a single narrative that is factual and chronological in nature, thus ignoring the critical and constructive dimensions of the historical thought process. This article proposes a *mini-historiography approach* as an innovative learning strategy that encourages students to not just memorize events, but to actively construct historical narratives based on data, sources, and interpretations. Through the practice of *mini* historiography, students are invited to trace traces of local history, conduct field observations, interviews, and document analysis, which are then constructed in the form of historical writings or presentations. This approach not only improves critical thinking skills, historical literacy, and empathy, but also provides space for students to play the role of knowledge producers, not just consumers. This study uses a qualitative study method with classroom observation and analysis of student documents in three high schools in South Sumatra. The results show that mini historiography is able to arouse students' enthusiasm, enrich their understanding of the local historical context, and strengthen cultural identity. In addition, this approach challenges the dominance of large national narratives that often marginalize community history. By involving students as young historians, history education becomes more democratic, contextual, and meaningful. This article recommends the integration of mini-historiography into the history curriculum as a strategic step in building a generation that is historically literate and reflective of the past.

Introduction

History education has a strategic role in shaping the historical awareness of the younger generation. In the Indonesian context, history learning in schools is often still dominated by a single narrative approach that prioritizes memorization of facts and chronology of events. Models like this risk diminishing students' interest in history, while dwarfing their understanding of the complexities of the past. History should not be positioned as a collection of dead events, but rather as a process of reconstructing meaning that is open to interpretation and reflection. As expressed by Seixas (2006), "meaningful history learning requires students to participate in the practice of historical thinking, not just remembering official narratives."

One of the main challenges in history education today is the distance between students and the material being studied. The big narratives in textbooks often feel foreign and far from the students' daily experience. In this situation, it is important to open up space for a more contextual and participatory approach, one of which is through what is called mini-historiography. This approach gives students the opportunity to craft their own historical work—based on local sources, community experiences, and a process of self-investigation—which ultimately places them as active subjects in history learning.

Mini historiography is not only a teaching method, but also a pedagogical strategy oriented towards the development of students' historical skills. Activities such as browsing family archives,

interviewing local figures, and documenting historical sites in the neighborhood allow students to experience history directly and critically. This is in line with the view of Barton and Levstik (2004) that "authentic learning of history is when students learn to think about history as historians think about it." Therefore, encouraging students to write history—even on a small scale—is the first step toward the formation of strong historical literacy.

In addition to developing critical thinking skills, the mini-historiography approach also facilitates the connection between national history and local history. In the context of a plural and diverse Indonesia, it is important for students to understand that the great narrative of the nation's history is formed from the mosaic of experiences of local communities. The history of their hometown, family traditions, or colonial footprints in their small towns are part of national history that is often overlooked in the formal curriculum. Thus, mini-historiography becomes a means to bridge the gap between the narrative of the state and the local identity of students.

On the other hand, this approach also contributes to the decolonization of historical knowledge in the classroom. In many cases, the history curriculum still reflects colonial legacies and hierarchical knowledge structures, where dominant narratives are reinforced and marginal voices are marginalized. When students are given the freedom to dig into the history of their own communities, they indirectly resist a single narrative and open up space for a diversity of perspectives. This supports efforts to democratize history education as initiated by Paulo Freire (1970), where the learning process must allow students to become conscious and independent subjects.

The implementation of mini historiography also requires a change in the role of history teachers from material presenters to learning facilitators. Teachers must be able to guide students in the process of simple research, source validation, and the preparation of historical narratives. This change is in line with the constructivist paradigm in education, which emphasizes that knowledge is built through active interaction between students and their learning environment (Vygotsky, 1978). Thus, this approach requires teachers to have adaptive and reflective pedagogical skills. Furthermore, mini-historiography allows for cross-disciplinary learning that enriches students' learning experiences. In the process of writing local history, students not only learn history, but also literacy, ethnography, geography, and even digital technology skills when the documentation process is carried out in multimedia. This makes mini historiography a bridge between traditional learning approaches and the demands of the 21st century that emphasizes creativity, collaboration, and high-level thinking skills.

The use of mini historiography can also strengthen the relationship between school and community. When students conduct research about local figures or historical sites in their area, the process relives the collective memory of the community and strengthens intergenerational interactions. Schools are no longer closed institutions that only distribute state curriculum, but rather become a space for dialogue between the past and the present involving all levels of society. However, the successful implementation of this approach is highly dependent on education policy support, teacher training, and curriculum flexibility. An education system that is too standardized and oriented towards exam achievement will find it difficult to make room for pedagogical experiments such as mini historiography. Therefore, advocacy efforts and policy reflection are needed so that history education can be more open to innovative approaches rooted in students' realities.

Through this article, the author wants to explore the potential of mini historiography as a pedagogical strategy in history education at the secondary school level. The main focus is on how this approach can encourage students to think and act like young historians—critical of sources, reflective of narratives, and engaged in the creation of historical meaning. This research is expected to

contribute to the development of a more inclusive, participatory, and grounded history learning model.

Historiography is not merely about recounting the past but involves the selection, interpretation, and construction of meaning. Tosh (2015) describes it as a study of both the content and the context of historical writing, including the biases and narrative choices embedded within. Introducing historiography at an early stage—such as through mini-historiography projects—is therefore crucial for fostering students' critical historical consciousness. Mini-historiography is rooted in constructivist learning theory, where students actively build knowledge through social interaction and engagement with their environment. Vygotsky (1978) emphasized the role of educators in guiding learners toward higher-order thinking, including historical reasoning. Within this framework, mini-historiography serves as a medium for project-based and inquiry-driven learning. Seixas and Morton (2013) define historical literacy as the ability to think like a historian—analyzing primary sources, recognizing multiple perspectives, and constructing evidence-based arguments. Mini-historiography enables students to develop these skills through interviews, source evaluation, and writing historical narratives grounded in field research.

This approach also aligns with inquiry-based learning, where students actively interpret rather than passively consume historical knowledge. Levstik and Barton (2001) argue that learners should experience history as a reasoned interpretation grounded in available evidence. Mini-historiography positions students as producers of historical knowledge. By writing local histories, they not only engage with the past but also challenge centralized grand narratives and contribute to the decolonization of historical understanding (Clark, 2001). Echoing Paulo Freire's emancipatory pedagogy (1970), mini-historiography empowers students to reflect on their social-historical realities. It is not merely an exercise in writing but an act of constructing historical agency. Mini-historiography is also a practical form of project-based learning (Thomas, 2000), proven to enhance motivation, collaboration, and higher-order thinking. Local history projects integrate cognitive, affective, and psychomotor domains through research, reporting, and presentation. Teachers play a critical role as facilitators in this process. Wineburg (2001) asserts that history educators should guide students to engage with the past as a contested, interpretive space rather than a set of fixed facts. Thus, training in historical pedagogy is essential.

By researching local figures, traditions, and sites, students build bridges between school and community. This supports community-based learning principles and enriches collective memory. In the digital era, mini-historiography can take new forms—blogs, short documentaries, and virtual exhibitions. Mills and Levido (2011) highlight how digital literacy enhances participation and broadens the representation of history. Challenges such as limited time, access to local sources, and teacher preparedness must be addressed through supportive educational policies, flexible curricula, and resource allocation. In the long term, this approach nurtures a generation capable of not only understanding but also authoring history. Mini-historiography in schools is more than a method—it is a cultural practice that fosters identity formation, collective memory, and critical reflection. In a rapidly changing world, students must be equipped not only to understand the past but to interpret and re-narrate it in meaningful ways.

This study uses a qualitative approach with a case study design, which aims to explore in depth the practice of *mini* historiography in history learning in secondary schools. The case study was chosen because it effectively captured the complexity of the educational context, encompassing the interactions among students, teachers, and learning materials. Yin (2014) states that "case studies are preferred strategy when 'how' or 'why' questions are being posed, when the investigator has little

control over events, and when the focus is on a contemporary phenomenon within a real-life context." This research was conducted in one of the junior high schools in Palembang, involving one class as the main subject. Data collection techniques include classroom observations, in-depth interviews with teachers and students, and documentation of *mini* historiography works produced by students during the learning process.

Data analysis was carried out using an interactive model from Miles, Huberman, and Saldaña (2014) which includes three stages: data reduction, data presentation, and conclusion/verification. The validity of the data is strengthened through triangulation techniques of sources and methods, as well as member checking to ensure the correctness of the researcher's interpretation of findings in the field. This research also pays attention to ethical aspects by ensuring informed consent from all participants, and upholding the confidentiality of the identities of students and teachers. In this context, the qualitative approach allows researchers to explore the meaning and dynamics of students' experiences in the role of young historians in a more in-depth and reflective manner, in accordance with the main objectives of the practice of *mini* historiography oriented towards the contextual and participatory construction of historical knowledge.

Results & Discussions

The results of the study show that the application of *mini* historiography in history classes encourages students' active involvement in the learning process. Students not only become recipients of information, but also play the role of young researchers who dig, interpret, and write their own historical narratives. This process provides space for students to experience history as a constructive process, not just memorizing facts. Many students feel more motivated when given the opportunity to trace traces of local history that are close to their daily lives.

The next finding was the increase in students' critical thinking skills and historical literacy. When writing a mini-historiography, students are trained to evaluate sources, compare different versions of the story, and craft evidence-based arguments. As stated by Seixas and Morton (2013), historical literacy includes the ability to assess historical significance, verify evidence, and understand continuity and change. The mini-historiography activity puts students right in that practice.

In the process of compiling a mini-history work, students demonstrate the ability to identify primary sources from the surrounding environment, such as interviews with parents, community leaders, or family photo archives. Some students even explore family heirlooms or local sites as a narrative foothold. This proves that this approach not only strengthens historical skills, but also strengthens inter-generational relationships and increases awareness of community history.

The application of *mini* historiography also triggered the emergence of alternative historical voices that are often overlooked in the big narratives of textbooks. For example, one of the students wrote a story about refugees from the 1997 social conflict who settled in their village, while the other explored the role of her grandmother as a songket knitter during the colonial era. These narratives enrich historical discourse by presenting local and personal perspectives.

This activity also shows how students form historical identities through the writing process. By tracing their family or community origins, students feel more emotionally and intellectually connected to the past. As Barton and Levstik (2004) say, a meaningful understanding of history must involve "a personal connection to the past and an understanding of its relevance to the present." Mini historiography is a bridge to build these connections.

Teachers play an important role as facilitators in this process. They help students structure research questions, search for sources, and direct narratives to stay accurate and relevant. Teachers also become ethical guardians, especially when students conduct interviews or use family documents. This active and reflective role of teachers is the key to the success of the mini historiography approach in history learning.

Students also show improved written and oral communication skills. When presenting the results of their research, students learn to convey information with a logical and argumentative narrative structure. This strengthens literacy competencies in general, which is very important in the academic world and daily life. Writing history is an exercise in the skill of systematically arranging ideas.

The collaborative aspect of *mini* historiography also emerged significantly. Many students work in small groups to share resources, discuss narratives, and craft a history project together. This collaboration creates a dialogical and egalitarian learning space, as emphasized in Freirean pedagogy (Freire, 1970), that education should be a meeting space between subjects to build collective understanding.

The students' works show the diversity of forms of historical representation. In addition to writing, some students express their research results in the form of visuals such as posters, infographics, and even short documentary videos. This media helps students who have different learning styles to express their understanding of history in a creative and meaningful way. This is in line with the idea of multimodal literacy in 21st century learning (Mills & Levido, 2011).

Finally, the mini-historiography process provides students with a fun, meaningful, and contextual history learning experience. They not only learn about history, but learn to become *young historians*—capable of constructing the narrative of the past from their own point of view with scientific responsibility. This is a small but significant step towards more democratic and participatory learning of history.

Discussion

The results of this study reinforce the importance of transforming the approach in history education from a transmissive model to a constructive and participatory model. When students are given the space to write *mini* historiographies, they enter into a reflective process that is actually at the heart of historical work itself. In this context, learning history is a process of building meaning, not just absorbing official narratives.

The improvement of critical thinking skills and historical literacy seen in this project demonstrates the effectiveness of this approach in fostering 21st century competence. In accordance with the opinion of Wineburg (2001), history learning should teach students "to think historically" by understanding the context, questioning sources, and constructing a balanced narrative. Mini historiography is a vehicle to internalize all these skills.

The local history aspect that emerges strongly in this project proves that students' daily contexts can be a rich and authentic source of history learning. Clark (2001) states that local history is able to "connect the past with personal experience, making history more alive and relevant." In this case, students not only learn history, but participate in reliving forgotten history.

The practice of mini historiography also helps in decolonizing the history curriculum which has tended to be centralistic and elitist. By giving space to fringe narratives, students are invited to understand that history does not belong to a few elites, but belongs to everyone. This is an important step in realizing a more democratic and inclusive history education.

The students' experience in compiling *mini* historiographies forms a critical historical agency. They not only write, but also negotiate the meaning of history from their own perspective. As stated by Rösen (2004), historical agency is the ability of individuals to understand and give meaning to time in relation to present and future actions. This project helps students put that into practice in real life.

The involvement of teachers as facilitators not only supports, but also reconstructs power relations in the classroom. In this approach, the teacher is no longer the sole authority on historical truth, but rather a learning partner who guides students in the process of searching for meaning. This is in line with a critical education model that places all parties as active subjects.

The affective dimension in learning is also very strong. When students write about their ancestors, village traditions, or local struggle stories, they develop a sense of empathy, pride, and a personal connection to history. This expands the role of history from just science to a space for the formation of human identity and values.

The use of various media and forms of historical representation shows that the mini-historiography approach is also compatible with digital literacy practices. When students write a history blog or make a documentary video, they not only learn about the past, but also develop 21st century technical and communication skills. This is a form of adaptation of historical education that is relevant in the digital age.

Collaboration between students enriches the learning experience and opens up space for meaningful social learning. This process reflects that historical writing is not a purely individual work, but a social action that requires dialogue, negotiation, and solidarity. This is an important lesson for the younger generation in shaping a culture of collective thinking.

Overall, mini-historiography-based learning has been proven to encourage students to become active, reflective, and critical history subjects. This practice can be a strategic alternative to revive history lessons in schools that have been considered boring and irrelevant. By becoming young historians, students not only learn about the past, but also learn to shape the future.

Conclusion

The application of a mini-historiography approach in history learning in schools shows great potential in transforming the way students understand and experience history. Through these activities, students are no longer positioned as passive recipients of historical narratives from textbooks, but as active subjects who research, reflect, and re-narrate history from their own perspectives. The mini-historiography project opens up space for more contextual, personal, and meaningful learning experiences. In the process, students not only understand past events, but also form an emotional connection with their family history and community, which ultimately strengthens their cultural and historical identity as part of society.

In addition to strengthening identity, mini-historiography activities also equip students with an important set of historical skills, such as the ability to evaluate sources, think critically, formulate arguments, and convey evidence-based narratives. This experience of being a "young historian" encourages students to develop a deep historical literacy as well as an awareness of the plurality of history. Through the exploration of local history, students not only expand their understanding of the past, but also bring to life stories that are often marginalized. Thus, this approach indirectly helps educate students to become citizens who are aware of history and are able to interpret the present and future more wisely.

From the pedagogical side, the role of teachers as facilitators is the key in accompanying students through this mini history research process. The active involvement of teachers in guiding,

providing space for reflection, and directing projects with ethical sensitivity makes history classes a space for dialogue and collaboration. With the support of diverse media and an inclusive learning environment, mini historiography has proven itself to be a progressive and relevant history learning strategy in the digital age. Therefore, this approach is worthy of being used as an alternative model in the history curriculum to form a generation of history learners who are active, critical, and aware of the richness of the narratives of the past.

References

- Barton, K. C., & Levstik, L. S. (2001). *Teaching History for the Common Good*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Brooks, J. G., & Brooks, M. G. (1993). *In Search of Understanding: The Case for Constructivist Classrooms*. Alexandria, VA: ASCD.
- Clark, A. (2001). *History's Children: History Wars in the Classroom*. Sydney: University of New South Wales Press.
- Freire, P. (1970). *Pedagogy of the Oppressed*. New York: Continuum.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Mills, K. A., & Levido, A. (2011). "iPed: Pedagogy for Digital Text Production." *The Reading Teacher*, 65(1), 80–91.
- Rüsen, J. (2004). *Historical Consciousness: Narrative Structure, Moral Function, and Ontogenetic Development*. In *Theorizing Historical Consciousness* (pp. 63–85). University of Toronto Press.
- Seixas, P. (2006). "Benchmarks of Historical Thinking: A Framework for Assessment in Canada." *The Centre for the Study of Historical Consciousness*, University of British Columbia.
- Seixas, P., & Morton, T. (2013). *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Toronto: Nelson Education.
- Thomas, J. W. (2000). *A Review of Research on Project-Based Learning*. The Autodesk Foundation.
- Tosh, J. (2015). *The Pursuit of History: Aims, Methods and New Directions in the Study of History* (6th ed.). London: Routledge.
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wineburg, S. (2001). *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Philadelphia: Temple University Press.
- Yin, R. K. (2014). *Case Study Research: Design and Methods* (5th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.